



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan BPPK 2024

TRANSFORMASI PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN



DAFTAR ISI

BAB 1: KILAS KINERJA 2024

10

1.1.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2020-2024	10
1.1.1	RENCANA STRATEGIS BPPK 2020-2024	11
1.1.2	PROGRAM INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN	14
1.2.	PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI	15
1.3.	RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	17
1.3.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	17
1.3.2	NERACA	18
1.3.3	LAPORAN OPERASIONAL (LO)	18
1.3.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	19
1.4.	BPPK DALAM ANGKA	20
1.5.	PERISTIWA PENTING	21
1.6.	PENGHARGAAN BPPK	57
1.6.1	TOP DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 #LEVEL STARS 5 PADA AJANG TOP DIGITAL AWARDS 2024	57
1.6.2	TOP LEADER ON DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 PADA AJANG TOP DIGITAL AWARDS 2024	57
1.6.3	GOLDEN TROPHY IT WORKS TOP DIGITAL AWARDS 2024	57
1.6.4	PENGHARGAAN PPID TINGKAT I KEMENKEU KATEGORI INFORMATIF	58
1.6.5	INOVASI GAMIFIKASI PEMBELAJARAN	59
1.6.6	PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)	59
1.6.7	PENGHARGAAN MITRA STRATEGIS KPK	60
1.6.8	PENGHARGAAN ACCA INDONESIA INSTITUTION PARTNER OF THE YEAR 2024 (ACCA QUALIFICATION) KEPADA PKN STAN	60
1.6.9	PKN STAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN TERBAIK I BANTEN SDGS AWARDS KATEGORI PERGURUAN TINGGI/MAHASISWA	61
1.6.10	LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DENGAN KATEGORI AKREDITASI A DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DENGAN KATEGORI AKREDITASI A	61
1.6.11	PPID TINGKAT II KATEGORI INFORMASTIF PADA PKN STAN	62
1.6.12	PENGHARGAAN TOP 3 BEST PAPER PADA PUBLIC SECTOR INTERNATIONAL CONFERENCE (PSIC)	63
1.6.13	PENGHARGAAN KARYA TULIS ILMIAH TERBAIK	63
1.6.14	PENGHARGAAN DUTA TRANSFORMASI TERBAIK KEMENKEU	63
1.6.15	PENGHARGAAN NAGARA DANA RAKCA UTAMA	64
1.6.16	PENGHARGAAN NAGARA KSATRIA KOLABORASI	64
1.6.17	PENGHARGAAN NAGARA KSATRIA INSPIRASI	65
1.7.	BENCHMARKING UNIT LAIN KE BPPK	65

BAB 2: PROFIL BPPK**68**

2.1.	VISI, MISI DAN TATA NILAI.....	68
2.1.1	VISI.....	68
2.1.2	MISI.....	69
2.1.3	TATA NILAI.....	70
2.2.	SEJARAH BPPK.....	70
2.2.1	PENDIDIKAN JANGKA PANJANG DAN PENDEK PADA MASA SEBELUM BPLK.....	70
2.2.2	LAHIRNYA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN (BPLK).....	71
2.2.3	TERBENTUKNYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.....	71
2.3.	STRUKTUR ORGANISASI.....	72
2.4.	PROFIL PEJABAT.....	73

BAB 3: SUMBER DAYA MANUSIA**82**

3.1.	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA.....	82
3.2.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	85
3.2.1	MANAJEMEN TALENTA.....	85
3.2.2	TUGAS BELAJAR MANDIRI.....	85
3.2.3	TUGAS BELAJAR DIBIYAI.....	86
3.2.4	PELATIHAN DI BPPK.....	86
3.2.5	PELATIHAN DI LUAR BADAN.....	87

BAB 4: ANALISIS KINERJA**90**

4.1.	PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN.....	90
4.2.	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KEUANGAN NEGARA.....	91
4.2.1	PEMBELAJARAN DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN.....	93
4.2.2	PEMBELAJARAN DI BIDANG PAJAK.....	97
4.2.3	PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.....	100
4.2.4	PEMBELAJARAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN.....	104
4.2.5	PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL.....	107
4.2.6	PEMBELAJARAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA LAINNYA.....	110
4.3.	PENGELOLAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI.....	113
4.3.1	SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN OLEH PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI.....	113
4.3.2	SERTIFIKASI KOMPETENSI KEUANGAN NEGARA DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN OLEH PUSDIKLAT KNPK.....	114
4.3.3	SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS ANGGARAN OLEH PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN.....	115
4.3.4	SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK.....	116
4.4.	PENGELOLAAN AKREDITASI.....	117
4.5.	PENGELOLAAN BEASISWA.....	118
4.5.1	BEASISWA MINISTERIAL SCHOLARSHIP (MINTS).....	118
4.5.2	BEASISWA INSTITUSIONAL.....	120

4.6.	PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	121
4.6.1	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	121
4.6.2	PENELITIAN	125
4.6.3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	130
4.7.	LEARNING ORGANIZATION.....	131
4.8.	KNOWLEDGE MANAGEMENT	132
4.9.	PEMBELAJARAN TERINTEGRASI.....	134
4.10.	SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN 2024.....	135

BAB 5: TATA KELOLA PEMERINTAHAN

138

5.1.	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	138
5.2.	MANAJEMEN RISIKO.....	140
5.2.1	KERANGKA MANAJEMEN RISIKO	140
5.2.2	UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO	141
5.2.3	IMPLEMETASI MANAJEMEN RISIKO DI BPPK.....	141
5.3.	WHISTLE BLOWING SYSTEM.....	142
5.4.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	142
5.4.1	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	142
5.4.2	STRUKTUR PERANGKAT PPID TINGKAT I BPPK.....	143
5.4.3	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	143
5.4.4	STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPPK TAHUN 2023	145

BAB 6: KEMITRAAN STRATEGIS

148

6.1.	KERJA SAMA PROGRAM PEMBELAJARAN (KSPP) KEUANGAN NEGARA.....	149
6.2.	NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING	150
6.3.	KERJA SAMA LAINNYA	152

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1: RINGKASAN LRA BPPK TA 2024	17
GAMBAR I.1: DOKUMENTASI KEGIATAN KEMITRAAN STRATEGIS IPDN DAN PUSDIKLAT AP	21
GAMBAR I.2: DOKUMENTASI DKRO BPPK TRIWULAN IV TAHUN 2023.....	22
GAMBAR I.3: DOKUMENTASI KUNJUNGAN MENTERI KEUANGAN KE LOKASI PEMBANGUNAN BDK DENPASAR.....	23
GAMBAR I.4: DOKUMENTASI PELANTIKAN PEJABAT ESELON II DI KEMENKEU	24
GAMBAR I.5: DOKUMENTASI <i>LEARNING COUNCIL MEETING</i> TAHUN 2024.....	25
GAMBAR I.6: DOKUMENTASI TOWN HALL MEETING BPPK SEMESTER I TAHUN 2024	26
GAMBAR I.7: DOKUMENTASI <i>CAPACITY BUILDING</i> BPPK TRIWULAN I TAHUN 2024.....	27
GAMBAR I.8: EXECUTIVE COURSE PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ANGKATAN	28
GAMBAR I. 9: DOKUMENTASI USKP APRIL TAHUN 2024	29
GAMBAR I. 10: DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI BPPK SEMESTER I TAHUN 2024	30
GAMBAR I.11: DOKUMENTASI ACARA PUNCAK HARI KREATIVITAS BELAJAR KE-49 BPPK.....	31
GAMBAR I.12: DOKUMENTASI KCT ADAPTIVE & AGILE : AN EXIT STRATEGY FOR CHANGE	32
GAMBAR I.13: DOKUMENTASI EXECUTIVE COURSE PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ANGKATAN II	33
GAMBAR I.14: DOKUMENTASI <i>WORKSHOP ON THE PRE-ACCREDITATION OF CUSTOMS MODERNIZATION ADVISORS SPECIALIZED IN HRMD</i>	34
GAMBAR I. 15: DOKUMENTASI SEMINAR KETAHANAN KELUARGA: <i>POSITIVE DISCIPLINE</i> DALAM PENGASUHAN ANAK.....	35
GAMBAR I.16: DOKUMENTASI EXECUTIVE COURSE PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA ANGKATAN III.....	36
GAMBAR I.17: PELANTIKAN 18 PEJABAT FUNGSIONAL & STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BPPK.....	37
GAMBAR I. 18: SOSIALISASI PUG DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER.....	38
GAMBAR I. 19: DOKUMENTASI <i>EXECUTIVE COURSE</i> PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA AK. IV	39
GAMBAR I. 20: DOKUMENTASI WORKSHOP PENDAMPINGAN BUM DESA.....	40
GAMBAR I. 21: DOKUMENTASI CAPACITY BUILDING BPPK “JUDI ONLINE: ANCAMAN TERSEMBUNYI BAGI MENTAL DAN INTEGRITAS”	41
GAMBAR I. 22: DOKUMENTASI FORUM PEMBELAJARAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2024.....	42
GAMBAR I. 23: DOKUMENTASI SEMINAR MOBILISASI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS ESG	43
GAMBAR I.24: DOKUMENTASI SEMINAR “WOMEN TO WOMEN CAREER MENTORSHIP”	44
GAMBAR I.25: DOKUMENTASI PELUNCURAN KEMENKEU LEARNING FESTIVAL 2024	45
GAMBAR I.25: DOKUMENTASI SERAH TERIMA MAHASISWA BARU RDTL.....	46
GAMBAR I.26: DOKUMENTASI KEGIATAN PELUNCURAN BUKU AUTHORIZED BIOGRAPHY SRI MULYANI INDRAWATI. 47	
GAMBAR I.26: DOKUMENTASI SEMINAR PELUANG DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN BERBASIS, SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND GOVERNANCE (ESG)	48

GAMBAR I.27: DOKUMENTASI 4TH WCO RTC INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE 2024.....	49
GAMBAR I.28: DOKUMENTASI HIGH LEVEL MEETING (HLM) 2024.....	50
GAMBAR I. 29: DOKUMENTASI WISUDA PKN STAN 2024.....	51
GAMBAR I. 30: DOKUMENTASI PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BPPK.....	52
GAMBAR I.31: DOKUMENTASI TOWN HALL MEETING SEMESTER II.....	53
GAMBAR I. 32: DOKUMENTASI SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PKN STAN 2024.....	54
GAMBAR I. 33: DOKUMENTASI PELAKSANAAN USKP PERIODE DESEMBER 2024.....	55
GAMBAR I. 34: DOKUMENTASI PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BPPK.....	56
GAMBAR I. 35: DOKUMENTASI TOP DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 #LEVEL STARS 5.....	57
GAMBAR I. 36: DOKUMENTASI TROPHY TOP DIGITAL AWARDS 2024.....	58
GAMBAR I. 37: DOKUMENTASI PENGHARGAAN PPID TINGKAT I KEMENKEU KATEGORI INFORMATIF.....	58
GAMBAR I. 38: DOKUMENTASI PENGHARGAAN PTP CONNECT.....	59
GAMBAR I. 39: DOKUMENTASI PENERIMAAN PREDIKAT WBBM.....	59
GAMBAR I. 40: DOKUMENTASI PENGHARGAAN MITRA STRATEGIS KPK.....	60
GAMBAR I. 41: DOKUMENTASI PENGHARGAAN ACCA INDONESIA.....	60
GAMBAR I. 42: DOKUMENTASI PENGHARGAAN TERBAIK I BANTEN SDGS AWARDS KATEGORI PERGURUAN TINGGI/MAHASISWA.....	61
GAMBAR I. 43: DOKUMENTASI AKREDITASI DARI LAN RI.....	62
GAMBAR I. 44: DOKUMENTASI PENGHARGAAN PPID TINGKAT II PKN STAN KATEGORI INFORMATIF.....	62
GAMBAR I. 45: DOKUMENTASI PENGHARGAAN DUTA TRANSFORMASI TERBAIK TAHUN 2024.....	63
GAMBAR II.1: STRUKTUR ORGANISASI BPPK.....	72
GAMBAR III.1: KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN.....	84
GAMBAR III.2: KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	84
GAMBAR IV.1: PERAN UNIT PENGGUNA DALAM LEARNING VALUE CHAIN.....	92
GAMBAR IV.2: PROGRAM PEMBELAJARAN DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDARAAN.....	94
GAMBAR IV.3: JUMLAH PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN.....	94
GAMBAR IV.4: JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN DI BIDANG PERPAJAKAN.....	97
GAMBAR IV.5: JUMLAH PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG PERPAJAKAN.....	98
GAMBAR IV.6: JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.....	101
GAMBAR IV.7: JUMLAH PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.....	101
GAMBAR IV.8: JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN.....	105
GAMBAR IV.9: JUMLAH PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN.....	106
GAMBAR IV.10: JUMLAH PROGRAM DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL.....	108
GAMBAR IV.11: JUMLAH PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL.....	108
GAMBAR IV.12: JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN DI BIDANG KEUANGAN LAINNYA.....	111
GAMBAR IV.13: REALISASI PESERTA PEMBELAJARAN DI BIDANG KEUANGAN LAINNYA.....	111
GAMBAR IV. 14 : JUMLAH PENDAFTAR BEASISWA MINTS.....	119
GAMBAR IV. 15 : KOMPOSISI TEMA PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2024.....	130
GAMBAR IV. 16 : JUMLAH ASET INTELEKTUAL TIAP LEVEL AKSES.....	133
GAMBAR V.1: KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO.....	140
GAMBAR V.2: STRUKTUR PERANGKAT PPID BPPK.....	143
GAMBAR V.3: TOPIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEPADA BPPK TAHUN 2024.....	145

DAFTAR TABEL

TABEL I.1: RINGKASAN NERACA BPPK TA 2024.....	18
TABEL I.2: RINGKASAN LAPORAN OPERASIONAL BPPK TA 2024.....	18
TABEL I.3: RINGKASAN LPE BPPK TA 2024.....	19
TABEL III.1: JUMLAH SDM BPPK BERDASARKAN UNIT PADA TAHUN 2024.....	82
TABEL III.2: PEGAWAI BPPK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN.....	86
TABEL III.3: JUMLAH PEGAWAI TUGAS BELAJAR DIBIYAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN.....	86
TABEL III.4: HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN BAGI PEGAWAI BPPK.....	86
TABEL III.5: DIKLAT LUAR BADAN PEGAWAI BPPK.....	87
TABEL IV.1: RINCIAN PELAKSANAAN <i>EXECUTIVE COURSE</i>	95
TABEL IV.2: RINCIAN INDIKATIF PINJAMAN.....	96
TABEL IV.3: PROGRAM UNGGULAN PUSDIKLAT PAJAK TAHUN 2024.....	99
TABEL IV.4: RINCIAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK (DE-ESKALASI).....	102
TABEL IV.5: RINCIAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN SARANA PENGANGKUT (SARKUT) PERBATASAN DARAT.....	103
TABEL IV.6: RINCIAN PELAKSANAAN PELATIHAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (<i>BLENDED LEARNING</i>).....	107
TABEL IV.7: SEBARAN PESERTA <i>E-LEARNING MANAGING CHANGE: BEING ADAPTIVE AND AGILE</i>	110
TABEL IV.8: PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEUANGAN NEGARA DI PUSDIKLAT KNPK TAHUN 2024.....	114
TABEL IV.9: PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG.....	115
TABEL IV.10: PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN.....	116
TABEL IV.11: PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK TAHUN 2024.....	116
TABEL IV. 12: JUMLAH KARYASISWA YANG DIKELOLA PUSDIKLAT KM.....	118
TABEL IV.13: RINCIAN JUMLAH MAHASISWA PKN STAN.....	122
TABEL IV.14: HASIL PELAKSANAAN SPMB REGULER TAHUN 2024.....	123
TABEL IV.15: ALOKASI HASIL SPMB REGULER TAHUN 2024.....	123
TABEL IV.16: HASIL PELAKSANAAN SPMB ALIH PROGRAM TAHUN 2024.....	123
TABEL IV.17: ALOKASI HASIL SPMB ALIH PROGRAM TAHUN 2024.....	124
TABEL IV.18: ALOKASI HASIL SPMB RDTL TAHUN 2024.....	124
TABEL IV.19: ALOKASI HASIL SPMB PROGRAM TIAS TAHUN 2024.....	124
TABEL IV.20: DAFTAR PENELITIAN SELESAI DI TAHUN 2024.....	125
TABEL IV.21: INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN (IKPL) BPPK TAHUN 2024.....	136
TABEL V.1: DAFTAR RISIKO BPPK YANG DIMITIGASI PADA TAHUN 2024.....	141
TABEL V.2: TINDAK LANJUT ATAS PERMINTAAN INFOMASI PUBLIK KEPADA BPPK TAHUN 2024.....	145

SAMBUTAN KEPALA BPPK



Para *stakeholders* BPPK, para pemelajar, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom.

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang masing-masing. Untuk itu, BPPK hadir sebagai motor penggerak dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization*.

Di era yang penuh disrupsi ini, transformasi pembelajaran menjadi kunci utama. BPPK tidak

hanya fokus pada pengembangan program pembelajaran terstruktur di bidang keuangan negara, tetapi juga mengadopsi pendekatan pembelajaran secara holistik dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program pembelajaran terintegrasi dengan mengoptimalkan berbagai bentuk pembelajaran mulai dari belajar mandiri (*self-learning*), pembelajaran terstruktur (*structured learning*), belajar dari orang lain di lingkungan sosial (*social learning/learning from others*), hingga praktik di tempat kerja (*learning from experience/learning while working*). Di samping itu, BPPK juga berperan penting dalam menyediakan berbagai sumber pembelajaran secara mandiri dan meningkatkan retensi aset intelektual organisasi yang dapat diakses secara mudah melalui *Knowledge Management System* (KMS) BPPK yakni Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

Laporan Tahunan BPPK disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas BPPK dalam menyelenggarakan layanan publik. Selain itu, laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi BPPK untuk mengkomunikasikan peran, tugas, fungsi, arah dan kebijakan organisasi, capaian kinerja organisasi, penggunaan sumber daya, serta informasi lain yang dapat bermanfaat bagi *stakeholders* dan pengguna layanan.

Pada Tahun 2024, BPPK mencatatkan beberapa capaian positif, di antaranya 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BPPK yang berada pada angka 4,71 dari skala 5 (kategori "Sangat Puas"); dan 2) Tingkat Kematangan *Knowledge Management* mencapai nilai 5 dari skala 5 yang menunjukkan implementasi pembelajaran dan manajemen pengetahuan yang optimal di BPPK. Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari dukungan para *stakeholders* dan pengguna layanan BPPK. Untuk itu, kami beserta jajaran pimpinan BPPK mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga kami mampu mencatatkan kinerja yang positif di tahun

2024. Kami berkomitmen agar BPPK mampu terus hadir dan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para *stakeholders* dan pengguna layanan, khususnya dalam penguatan kompetensi di bidang keuangan negara. BPPK juga berkomitmen untuk mewujudkan organisasi yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, serta selalu berupaya menyempurnakan layanan yang diberikan melalui transformasi dan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada *stakeholders* dan pengguna layanan. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan *stakeholders* dan pengguna layanan sangat kami butuhkan agar dapat mencapai kinerja terbaik.

BPPK #Naikkelas #Naikterus.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BAB 1:

KILAS KINERJA 2024



1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2020-2024

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPPK memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan agenda pembangunan nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan negara berintegritas dan berkinerja tinggi. Dalam menjalankan tugas

dan peran tersebut, perlu adanya kebijakan strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Kemenkeu.



1.1.1 RENCANA STRATEGIS BPPK 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi BPPK sepanjang tahun 2020–2024 dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kemenkeu, dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit-for-purposes* di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan menyiapkan SDM pengelola keuangan negara melalui penyelenggaraan

pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kemenkeu, penyelenggaraan pendidikan oleh PKN STAN didasarkan pada kebutuhan SDM keuangan negara dan perkembangan keilmuan di bidang keuangan negara. Pendidikan vokasi memiliki keunggulan dalam menerapkan aspek-aspek praktis yang didukung oleh teori yang tepat. Dalam rangka mengantisipasi dan merespons dinamika keilmuan di bidang keuangan negara, PKN STAN menyiapkan program pendidikan (program studi) dengan

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan (*fit-for-purposes*) agar alumninya dapat berhasil meraih kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pengguna baik di Kemenkeu maupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) lainnya.

Upaya PKN STAN dalam mencetak SDM keuangan negara yang berkualitas didukung oleh penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Saat ini, dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan karakteristik utama penggunaan teknologi digital yang dominan, termasuk penggunaan *artificial intelligence* (AI). Implementasi transformasi digital yang dilakukan sebagai respons atas perkembangan global sejalan dengan misi kelima Kemenkeu, yakni mengembangkan proses bisnis (*probis*) inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Hal ini juga senada dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa pegawai Kemenkeu harus memiliki *basic competency information technology* (IT) yang mendukung sistem pengelolaan keuangan negara.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain:

- a. Penguatan kurikulum pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link-and-match*) dan berbasis nilai (*value-based education*).

PKN STAN merupakan *college* pada Kemenkeu Corpu, yang berperan sebagai salah satu sumber rekrutmen SDM keuangan negara. Dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan, PKN STAN memperhatikan kebutuhan *stakeholders* baik dari kuantitas maupun kualitas. Pendidikan yang *fit-for-purposes* menjadi pegangan dalam arah pengembangan pendidikan tinggi khususnya pendidikan vokasi di PKN STAN untuk memastikan setiap peserta didik meraih kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas

alumni PKN STAN dan mempersiapkan SDM pengelola keuangan negara yang andal, PKN STAN senantiasa melakukan penyempurnaan kurikulum secara relevan. Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) juga dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan *minus-growth* SDM Kemenkeu dan kebijakan nasional.

- b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip *good university governance*. Penguatan kelembagaan PKN STAN dan penyempurnaan kurikulum dilaksanakan dengan mempertimbangkan arahan penyederhanaan birokrasi serta optimalisasi tata kelola pendidikan tinggi, termasuk pemerataan beban kerja, penajaman dan penguatan fungsi, serta pengembangan *probis*. Hal ini dilakukan dalam rangka menghasilkan SDM keuangan negara yang tidak hanya berkompetensi tinggi, namun juga berkarakter, berintegritas, dan memahami nilai keberagaman dan inklusivitas.

2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal

Program beasiswa Kemenkeu oleh BPPK telah diintegrasikan dengan kebijakan manajemen talenta. Dengan integrasi ini, beasiswa Kemenkeu turut berperan sebagai *talents' factory* yang memunculkan calon pemimpin Kemenkeu. Untuk mendukung kebijakan tersebut BPPK juga terus meningkatkan kemitraan strategis dengan universitas top dunia. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan beasiswa Kemenkeu, BPPK juga mengembangkan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara

Pembelajaran keuangan negara yang dikelola BPPK tidak hanya menyoar internal Kemenkeu namun juga melingkupi

pembelajaran keuangan negara pada Kementerian, Lembaga, Institusi Daerah (KLID) dan masyarakat sesuai kebijakan Kemenkeu.

Strategi yang telah dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

- a. Melaksanakan penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAI (Relevant, Applicable, Impactful, dan Accessible) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kemenkeu.
- b. Mengoptimalkan penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan pelatihan/pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID.
- d. Mengimplementasikan sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan

Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi seluruh SDM keuangan negara baik di Kemenkeu, KLID, dan masyarakat telah dilaksanakan dengan optimal dan sesuai kebijakan Kemenkeu. Strategi yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Mengharmonisasikan kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- b. Melakukan penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang efektif dan efisien.

5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kemenkeu

Implementasi manajemen pengetahuan di BPPK telah dilaksanakan secara andal dan memiliki tingkat kematangan yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Membangun kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan negara; dan
- b. Meningkatkan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

6. Organisasi dan SDM yang agile dalam rangka penguatan implementasi Kemenkeu Corporate University

Melalui implementasi Kemenkeu Corpu, BPPK telah senantiasa mewujudkan organisasi dan SDM yang agile dan berorientasi pada pelayanan terhadap *stakeholders*. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

- a. Melakukan penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kemenkeu Corporate University.
- b. Mengembangkan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi.
- c. Melakukan penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi terbaik.
- d. Mengelola Badan Layanan Umum (BLU) secara efektif dan efisien.

7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien

- a. Pembangunan infrastruktur dan penguatan implementasi *sharing facilities* berbasis keunggulan komparatif.
- b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

1.1.2 PROGRAM INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam Inisiatif Strategis (IS) Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2024 terdapat dua IS yang menjadi tanggung jawab BPPK sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2024 tentang implementasi inisiatif strategis Kemenkeu, yaitu: 1) Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui bagi *Learning Path* Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (JFKN); dan 2) *Data Analytics: Penerapan Artificial Intelligence (AI) pada Platform Knowledge Management System* Kemenkeu.

1. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

IS yang pertama bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan SDM Pengelola Keuangan Negara yang semakin terstruktur dan efektif melalui penyusunan *learning path* bagi JFKN.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pola pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara yang *link-and-match* dengan *career path*, dan dengan telah ditetapkannya PermenPAN-RB nomor 11 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, BPPK perlu menyusun *Learning Path* atau Jalur Pembelajaran. *Learning Path* adalah rangkaian tahapan pengembangan kompetensi pegawai dan program pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan baik untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu sesuai jalur kariernya dari jenjang terendah hingga tertinggi.

Learning Path merupakan suatu kebutuhan karena merupakan salah satu acuan dalam menghasilkan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang lebih akurat, khususnya untuk pengembangan JFKN. Di samping itu, *Learning Path* dapat mendukung terwujudnya SDM yang *engage* dan berkinerja

tinggi, terutama untuk JFKN tersebut. Dalam rangka mewadahi kebutuhan tersebut, BPPK telah menyusun *charter* Inisiatif Strategis Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif Berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi JFKN, atau disebut sebagai IS *Learning Path*. Terobosan yang dilakukan untuk mewujudkan IS ini adalah menyusun pola pengembangan SDM terstruktur dan efektif berbasis peran bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

2. *Data Analytics: Penerapan Artificial Intelligence (AI) pada Platform Knowledge Management System* Kemenkeu

IS yang kedua bertujuan untuk meningkatkan *learning experience* pada *platform knowledge Management system* Kemenkeu dengan pemanfaatan *artificial intelligence*.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Kemenkeu menjadi *knowledge institution*, BPPK mengembangkan berbagai metode pembelajaran baik klasikal maupun digital. Pembelajaran digital di Kemenkeu dilaksanakan melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC), yang terdiri dari *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang senantiasa mengalami pengembangan dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan pergeseran budaya belajar dari klasikal menjadi digital *learning* (berbasis teknologi informasi) yang cukup masif dalam dunia pendidikan dan pelatihan akhir-akhir ini. Selain itu, pengembangan terus dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah aset intelektual di KMS yang pemanfaatannya belum optimal, khususnya dalam mendukung pembelajaran mandiri (*self-learning*) dan menjadi salah satu sumber referensi pengetahuan terkait keuangan negara. Hal ini penting sebagaiantisipasi kebutuhan budaya belajar yang semakin interaktif.

Mengingat berbagai hal tersebut, perlu adanya inovasi pada aplikasi KMS dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* (AI), berupa fitur ChatGPT terkait pengetahuan keuangan negara. Dalam rangka mewadahi kebutuhan pengembangan tersebut, BPPK menginisiasi Inisiatif Strategis *Data Analytics: Penerapan AI pada Platform Knowledge Management System* Kemenkeu

Terobosan yang dilakukan untuk mewujudkan IS ini adalah menyediakan fitur AI pada KMS Kemenkeu, untuk memudahkan dan mempercepat pengguna memahami pengetahuan yang ada dan memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap suatu tema, sekaligus mengarahkan pengguna pada aset intelektual yang tepat.

1.2. PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

BPPK telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) sejak tahun 2007. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan BPPK meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja (PK). Detil tahapan pengelolaan kinerja tahun 2024 sebagai berikut.

1. **Refinement Perjanjian Kinerja dan Risiko Kemenkeu-One BPPK**

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko 2024 diawali dengan pelaksanaan reviu atas PK dan Piagam Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan PK dan Piagam MR Tahun 2024 yang dikenal dengan *Refinement* Kinerja dan Risiko. Proses *Refinement* ini dimulai sejak triwulan IV tahun 2023 yang ditandai dengan pelaksanaan rapat pembahasan konsep Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPK untuk Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 dan dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja di BPPK. Agenda pembahasan pada rapat tersebut adalah 1) Penyampaian kebijakan *Refinement* 2024; 2) Identifikasi target pada Renstra dan Renja 2024; dan 3) Reviu Kinerja tahun 2023. Rapat dibuka dengan penyampaian arahan Wakil Menteri Keuangan pada DKRO Kemenkeu

Triwulan III dan arahan Kepala Badan pada DKRO BPPK periode sebelumnya.

Tahap berikutnya adalah pembahasan bersama antara Pengelola Kinerja dan Risiko Organisasi Kemenkeu-*One BPPK* dan Kemenkeu-*Two-Three* di lingkungan BPPK. Cakupan pembahasan meliputi Peta Strategi, IKU, dan target IKU BPPK tahun 2024.

Perumusan tersebut mengacu pada:

- a. visi, misi dan program kerja Kemenkeu;
- b. dokumen perencanaan strategis BPPK antara lain Renstra BPPK 2020-2024 dan/ atau Rencana Kerja (Renja) 2024;
- c. peraturan terkait pengelolaan kinerja;
- d. arahan Wakil Menteri Keuangan dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan III;
- e. arahan Kepala BPPK dalam DKRO BPPK dan rapat pimpinan lainnya;
- f. Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK);
- g. hasil *refinement* level Kemenkeu dan kebijakan *refinement*.

Hasil kesepakatan pembahasan pada level pengelola kinerja selanjutnya dibahas bersama antara Kepala Badan, Sekretaris Badan, Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kapusdiklat), Direktur PKN STAN, dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Kabalai).

2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka menjaga komitmen seluruh jajaran BPPK untuk mewujudkan visi BPPK, hasil pembahasan *refinement* dituangkan dalam PK Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Pusdiklat, Direktur PKN STAN, dan Kepala Balai Diklat.

Penandatanganan PK Kepala Badan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan PK Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan serta pejabat eselon I lain di lingkungan Kemenkeu yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024. Selanjutnya, proses penandatanganan PK juga dilakukan oleh seluruh pejabat eselon II hingga level pelaksana di seluruh unit kerja BPPK.

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Komitmen Pimpinan Dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO)

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja BPPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap triwulan sebagai bentuk komitmen pimpinan BPPK. Proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rapat pimpinan yang disebut dengan DKRO dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Badan, Para Kepala Pusdiklat, Direktur PKN STAN, dan Para Kepala Balai Diklat yang didampingi oleh para manajer kinerja serta manajer risiko.

Dalam DKRO, pembahasan tidak hanya difokuskan untuk membahas kinerja tetapi juga dilakukan pembahasan terkait risiko yang berdampak pada pencapaian sasaran organisasi. Selain itu dalam DKRO, pembahasan juga difokuskan pada isu strategis, dampak terhadap pencapaian kinerja dan penetapan rencana aksi.

4. Perhitungan Nilai Kinerja Berdasarkan Kualitas Perjanjian Kinerja

BPPK menerapkan mekanisme yang dapat mendorong diferensiasi kinerja antar pegawai dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berkesinambungan. Mekanisme tersebut bertujuan mewujudkan penilaian kinerja yang lebih objektif. Diimplementasikan melalui penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3). Penilaian K3, dilakukan terhadap dua komponen yaitu kualitas IKU pegawai dan kualitas target IKU yang telah ditetapkan. NKP yang merupakan kombinasi nilai capaian kinerja pegawai dan nilai perilaku, kemudian dikalikan dengan nilai K3 sehingga dihasilkan NKP K3. Dengan adanya penghitungan NKP K3 ini diharapkan seluruh pegawai menyusun IKU yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan *output* dari pekerjaannya, serta menetapkan target yang menantang setiap tahunnya.

Dalam proses penilaian NKP K3 juga dilakukan *reviu* PK secara berjenjang. Mulai dari atasan langsung kemudian dilanjutkan oleh pengelola kinerja organisasi setiap level. Pelaksanaan *reviu* tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-performance*.

Selanjutnya, atas kinerja organisasi juga dilakukan penilaian berdasarkan Kualitas PK. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK pada tahun 2024 mencapai 111,48 sedangkan NKO berdasarkan K3 mencapai 120 dengan status kinerja Istimewa.

1.3. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, BPPK melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan BPPK TA 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

BPPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah

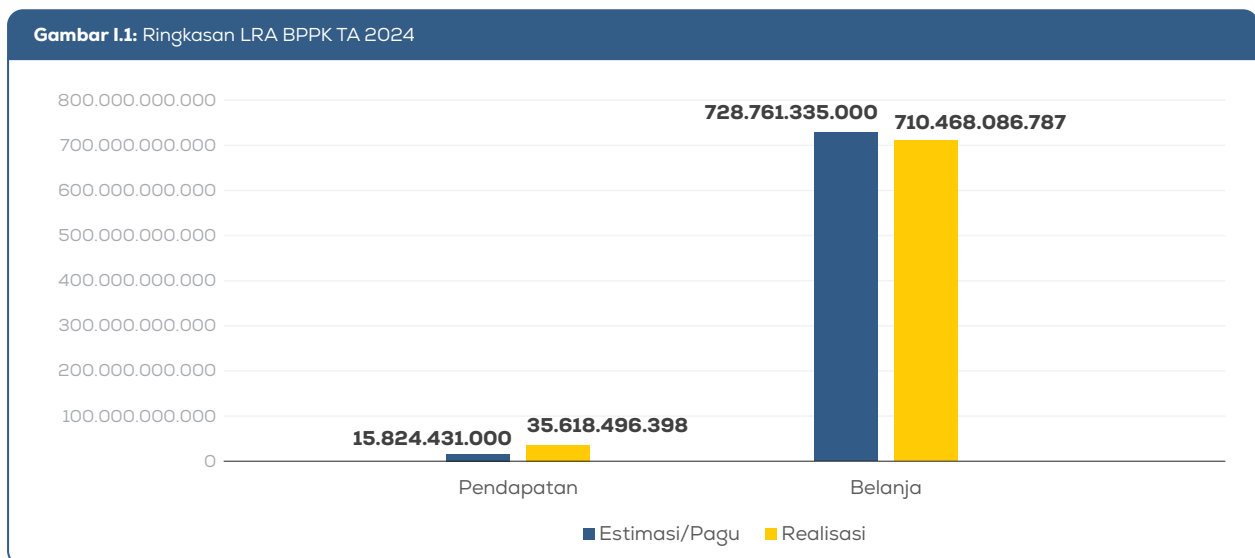
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan mencapai 225,03% dan Realisasi Belanja mencapai 97,49%.

Berikut ini adalah gambar yang menggambarkan ringkasan dari Laporan Realisasi Anggaran BPPK pada TA 2024 yang diambil dari Laporan Keuangan BPPK Tahun 2024.



1.3.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, total Aset BPPK mengalami kenaikan 3,93%, Kewajiban mengalami

kenaikan 1.008,00%, dan Ekuitas mengalami kenaikan 3,53%. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan ringkasan Neraca BPPK pada TA 2024.

Tabel I.1: Ringkasan Neraca BPPK TA 2024

Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Kenaikan/Penurunan
Aset Lancar	147.979.217.661	138.041.564.673	7,2
Aset Tetap	7.262.992.263.931	7.017.633.837.944	3,5
Piutang Jangka Panjang	-	-	-
Aset Lainnya	30.744.714.473	4.873.437.368	530,86
Total Aset	7.441.716.196.065	7.160.548.839.985	3,93
Kewajiban	31.678.012.608	2.859.013.911	1.008,00
Ekuitas	7.410.038.183.457	7.157.689.826.074	3,53
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.441.716.196.065	7.160.548.839.985	3,93

1.3.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan ringkasan dari Laporan Operasional BPPK TA 2024 yang diambil dari Laporan Keuangan BPPK Tahun 2024.

Tabel I.2: Ringkasan Laporan Operasional BPPK TA 2024

Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Operasional	29.669.765.550	21.112.420.317
Beban Operasional	461.689.425.379	438.291.763.132
Surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional	(432.019.659.829)	(417.179.342.815)
Kegiatan Non-Operasional		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.002.075.401	1.898.388.733
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.042.348.829	2.048.746.705
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	231.833.777	160.722.974
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	126.978.733	180.956.546
Surplus Kegiatan Non Operasional	2.064.581.616	(170.591.544)
Defisit LO	(429.955.078.213)	(417.349.934.359)

1.3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan ringkasan dari Laporan Perubahan Ekuitas BPPK TA 2024.

Tabel I.3: Ringkasan LPE BPPK TA 2024

Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	7.157.689.826.074	7.177.140.299.363
Surplus/Defisit LO	(429.955.078.213)	(417.349.934.359)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	2.309.737.134	(31.641.991)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	48.139.415
Koreksi atas Reklasifikasi	-	11.169.000
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	390.732.415	(90.950.406)
Lain-lain	1.919.004.719	-
Transaksi Antar Entitas	679.993.698.462	397.931.103.061
Kenaikan/Penurunan Entitas	252.348.357.383	(19.450.473.289)
Ekuitas Akhir	7.410.038.183.457	7.157.689.826.074

1.4. BPPK DALAM ANGKA

Nilai kinerja organisasi

111,48
dari skala 100

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

4,71 skala 5

Tingkat Implementasi *Learning Organization*

96,31

Jumlah Penelitian

152 penelitian

Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

134 kegiatan

Tingkat Maturitas Manajemen Pengetahuan

5 skala 5

Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi

95,61

Jumlah Mahasiswa PKN STAN

4.180 mahasiswa

Jumlah Lulusan PKN STAN

560 lulusan

Jumlah SDM

1.235
orang

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

842 orang

Perempuan

393 orang

Persentase realisasi anggaran

97,49%

Jumlah Pagu Anggaran

Rp728.761.335.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran

Rp710.468.086.787,-

Jumlah Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Barang

Rp377.207.846.742,-

Belanja Pegawai

Rp9.661.431.780,-

Belanja Modal

Rp323.598.808.265,-

1.5. PERISTIWA PENTING



4 Januari 2024

Kemitraan Strategis IPDN dan Pusdiklat AP

Gambar I.1: Dokumentasi Kegiatan Kemitraan Strategis IPDN dan Pusdiklat AP



Dalam rangka kerja sama kemitraan strategis antar dua Lembaga, Pusdiklat AP mengundang Dekan Fakultas Manajemen IPDN secara luring pada tanggal 4 Januari 2024. Kegiatan ini membahas rencana penyusunan kajian akademis/ penelitian bersama antara Pusdiklat AP dengan

IPDN dan juga terkait program pembelajaran unggulan tahun 2024 yang menasar para eksekutif pengelola keuangan di daerah. Kerja sama kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjembatani penguatan kompetensi pengelola keuangan negara di pusat dan daerah.



23 Januari 2024

DKRO Triwulan IV Tahun 2023**Gambar I.2:** Dokumentasi DKRO BPPK Triwulan IV Tahun 2023

Mengawali tahun 2024, BPPK menyelenggarakan DKRO pada tanggal 23 Januari 2024 dengan agenda pembahasan capaian kinerja dan pemantauan risiko BPPK sampai dengan Triwulan IV 2023. Acara dilakukan secara luring di BDK Cimahi dan daring melalui aplikasi Zoom.

Dalam acara ini hadir Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto, Plt. Sekretaris BPPK, Bapak Bambang

Juli Istanto, para Kepala Pusdiklat, para Kepala Balai, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPPK, serta para pengelola kinerja organisasi. Selain capaian kinerja dan risiko atas indikator kinerja utama (IKU) yang ada di BPPK, turut disampaikan pula rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan untuk masing-masing IKU pada tahun 2024.



26 Januari 2024

Kunjungan Menteri Keuangan ke Lokasi Pembangunan Gedung BDK Denpasar

Gambar I.3: Dokumentasi Kunjungan Menteri Keuangan ke Lokasi Pembangunan BDK Denpasar



Pada 26 Januari 2024, Menteri Keuangan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Bapak Heru Pambudi, dan Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto berkunjung secara langsung ke lokasi pembangunan gedung baru Balai Diklat Keuangan Denpasar dan Rumah Susun

Negara di kawasan Renon, Kota Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Ibu Sri Mulyani melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar dan Rusunara Kemenkeu Bali.



16 Februari 2024

Menteri Keuangan Lantik 3 Pejabat Eselon II di Lingkungan BPPK

Gambar I.4: Dokumentasi Pelantikan Pejabat Eselon II di Kemenkeu



Pada 16 Februari 2024 Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melantik 30 (tiga puluh) Pejabat Eselon II dan Pejabat Unit Organisasi Non Eselon di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta. Dari ketigapuluh Pejabat Tinggi Pratama (JPTP) yang dilantik tersebut, tiga di antaranya merupakan JPTP di lingkungan BPPK.

Adapun pejabat yang dilantik di lingkungan BPPK yaitu:

1. **Bapak Bambang Juli Istanto, S.E., M.M.** sebagai Sekretaris BPPK. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
2. **Bapak Bhimantara Widyajala, S.H., Ak., MSF.** sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Sekretaris DJPK.
3. **Bapak Dr. Agus Bandiyono, S.E., M.Si., M.Ak.** sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik, PKN STAN. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Dosen Lektor Kepala Program D-IV Manajemen Keuangan Negara, PKN STAN.

Selain 3 (tiga) pejabat tersebut, terdapat 1 (satu) JPTP di lingkungan BPPK yang dilantik menduduki jabatan diluar BPPK, yakni Ibu Heni Kartikawati, S.Psi., M.A., M.Psi. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, BPPK.



8 Maret 2024

Learning Council Meeting sebagai Forum Pimpinan Tertinggi dalam rangka Pembahasan Kebijakan Pembelajaran di Kemenkeu

Gambar I.5: Dokumentasi *Learning Council Meeting* Tahun 2024



Bertempat di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, pada 8 Maret 2024 telah dilaksanakan *Learning Council Meeting* (LCM) Tahun 2024. LCM merupakan forum tertinggi yang menentukan arah dan kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kemenkeu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, para Pimpinan Unit Eselon I/LNSW yang didampingi oleh para pejabat eselon II terkait, dan *Chief CTO*.

LCM 2024 diintegrasikan ke dalam Rapat Koordinasi Gabungan Dukungan Manajemen (Rakorgab Dukman) yang diselenggarakan oleh BPPK berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal dan *Central Transformation Office*. Dengan tema "Optimalisasi Peran Dukungan untuk Kemenkeu Melayani Lebih Baik", Rakorgab Dukman tahun ini mengangkat isu terkait Program Ekosistem *Human Capital Development* dan Program Ekosistem Kerja, Layanan, dan Kolaborasi.



26 Maret 2024

Town Hall Meeting BPPK Semester I Tahun 2024

Gambar I.6: Dokumentasi Town Hall Meeting BPPK Semester I Tahun 2024



Pada tanggal 26 Maret 2024, BPPK menyelenggarakan *Town Hall Meeting* Semester I Tahun 2024 secara luring di Aula BPPK Purnawarman dan disiarkan secara daring melalui Teams dan Youtube BPPK Kementerian RI. THM BPPK kali ini mengusung tema *Melangkah Bersama dalam Transformasi BPPK*. Ini adalah salah satu bentuk komitmen memperkuat semangat

kolaboratif dan solidaritas di antara seluruh anggota keluarga besar BPPK dalam penguatan dinamika organisasi menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam langkah-langkah menuju perubahan organisasi BPPK. THM BPPK 2024 juga dimeriahkan dengan pengumuman pemenang Liga Inovasi BPPK Tahun 2023, serta *Kick off* Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 BPPK.



27 Maret 2024

Capacity Building BPPK Triwulan I Tahun 2024

Gambar I.7: Dokumentasi Capacity Building BPPK Triwulan I Tahun 2024



Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BPPK, pada tanggal 27 Maret 2024 BPPK menyelenggarakan kegiatan *capacity building* dengan tema Persiapkan Liga Inovasi BPPK dengan *Design Thinking: Solusi, Kreatif, Inovatif* secara hybrid. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Gedung B

Lantai 5, Sekretariat BPPK dan secara daring melalui Teams dan kanal Youtube BPPK Kemenkeu RI dan diikuti oleh para pegawai BPPK dari berbagai unit. Dalam *capacity building* periode ini, BPPK menghadirkan narasumber yang merupakan *Founder The Local Enablers*, Dr Dwi Indra Purnomo.



22 s.d. 23 April 2024

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan I

Gambar I.8: Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan I



Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara berkualitas, harmonisasi kebijakan fiskal nasional, dan peningkatan pendanaan publik di daerah, Kolaborasi Kemenkeu Satu (BPPK c.q. Pusdiklat AP, DJPb, dan DJPK) bersinergi dengan Kemendagri meluncurkan Program Pembelajaran Unggulan *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Program Pembelajaran Unggulan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong implementasi HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) dan

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP No. 1 Tahun 2024). Menargetkan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia, program ini rencananya akan dilaksanakan dalam beberapa angkatan di 2024, dengan angkatan perdananya diselenggarakan pada 22-23 April 2024 di Palembang. Angkatan pertama dihadiri oleh 60 orang Sekda dan Kepala BPKAD dari 46 pemda dan dibuka oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan, didampingi oleh Kepala BPPK, Direktur Jenderal Perbendaharaan serta Staff Ahli Pengeluaran Negara.



24 s.d. 25 April 2024

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode I

Gambar I.9: Dokumentasi USKP April Tahun 2024



Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat SKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Pada tanggal 24 dan 25 April, BPPK melalui Pusdiklat Pajak telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Periode I. Selain dilaksanakan di Pusdiklat Pajak, lokasi pelaksanaan USKP juga tersebar di berbagai unit vertikal Kemenkeu. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran peserta Ujian Konsultan Pajak Periode I Tahun Anggaran 2024 terdapat 1.304 peserta yang berhasil lolos verifikasi USKP.



6 Mei 2024

Rapat Koordinasi BPPK Semester I Tahun 2024

Gambar I.10: Dokumentasi Rapat Koordinasi BPPK Semester I Tahun 2024



Pada 6 Mei 2024, BPPK telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2024 bertempat di Gedung B lantai 5 Sekretariat BPPK. Rapat Koordinasi kali ini mengusung tema “Menuju BPPK yang Inklusif, Adaptif, dan Kreatif”. Rapat Koordinasi kali ini dihadiri oleh Kepala BPPK,

Sekretaris BPPK, Direktur dan Wakil Direktur PKN STAN, seluruh Kepala Balai Diklat, para Kepala Bidang di Pusdiklat, para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat BPPK dan PKN STAN, serta perwakilan Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Unit Pusat dan Daerah.



7 Mei 2024

Acara Puncak Hari Kreativitas Belajar ke-49 BPPK

Gambar I.11: Dokumentasi Acara Puncak Hari Kreativitas Belajar ke-49 BPPK



Sebagai rangkaian dari Hari Kreativitas Belajar Ke-49 BPPK pada Selasa 7 Mei 2024, BPPK menyelenggarakan Acara Puncak Hari Kreativitas Belajar ke-49 BPPK. Kegiatan diselenggarakan di Gedung G, PKN STAN. Selain *Talk Show* dengan Narasumber yang merupakan *Founder Gerakan*

Anak Petani Cerdas (Heni Sri Sudnani) dan *Founder Tasawuf Underground* (Halim Ambiya), Acara Puncak ini juga diisi beragam hiburan musik dari pegawai BPPK dan Penyerahan Piala Juara berbagai Lomba Hari Kreativitas Belajar.



28 Mei 2024

KCT Adaptive & Agile : an Exit Strategy For Change**Gambar I.12:** Dokumentasi KCT Adaptive & Agile : an Exit Strategy For Change

Kemenkeu *Corpu Talk* dengan tema “*Adaptive & Agile: An Exit Strategy for Change*” berhasil diselenggarakan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada Selasa, 28 Mei 2024 di Aula Mezzanine Kemenkeu. Acara ini juga sekaligus menjadi momentum diluncurkannya *E-Learning “Managing Change: Being Adaptive & Agile”*

yang diresmikan oleh Bapak Agus Rofudin, Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI. Kegiatan yang diikuti oleh 1.176 peserta ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu, Bapak Agus Uji Hantara (Asisten Deputi Kemenpan RB), Ibu Ari Wahyuni (Kepala Biro Organta), Bapak Subandono (*Chief Reporting Officer* Tim RBTK Pusat) dan Prof. Rhenald Kasali.



28-29 Mei 2024

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan II

Gambar I.13: Dokumentasi Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan II



Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Angkatan II telah diselenggarakan di Jakarta pada 28 – 29 Mei 2024. Acara dibuka dengan *keynote speech* dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Bapak Luki Alfirman. Acara ini dihadiri sejumlah jajaran pejabat di lingkungan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan para Sekretaris Daerah. Adapun

tema yang diusung kali ini adalah Harmonisasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Optimalisasi Pelayanan Publik.

Peserta dalam *Executive Course* Angkatan II kali ini berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BPKAD/Bapenda/BKD dari berbagai provinsi/kabupaten/kota. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kegiatan.



3 s.d. 7 Juni 2024

Workshop on the Pre-Accreditation of Customs Modernization Advisors Specialized in HRMD

Gambar I.14: Dokumentasi Workshop on the Pre-Accreditation of Customs Modernization Advisors Specialized in HRMD



Pada 3-7 Juni 2024, Pusdiklat Bea dan Cukai (BC) bekerjasama dengan *Customs Cooperation Fund Japan* menyelenggarakan *Workshop on the Pre-Accreditation of Customs Modernization Advisors specialized in Human Resources Management and Development (HRMD)*. *Workshop* diikuti oleh 11 orang peserta yang berasal dari Indonesia, People Republic of China, Jepang, Nepal, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Sri-Lanka, Thailand, dan Vietnam. Fasilitator pada *workshop* ini berasal dari *World Customs*

Organization (WCO), yaitu Mr. Dahsqin Aliyev dan Ms. Karolyn Salcedo. *Workshop* ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi kepabeanan negara anggota dalam berkontribusi secara efektif terhadap tujuan pembangunan dan strategi modernisasi kepabeanan di lingkup regional dan nasional melalui pembentukan kumpulan pakar (*pool of technical expert*) yang siap menjalankan dukungan teknis pelatihan (*technical assistance*) di *Regional Training Centre (RTC)* dalam hal ini Pusdiklat Bea dan Cukai.



26 Juni 2024

Seminar Ketahanan Keluarga: *Positive Discipline* dalam Pengasuhan Anak

Pada hari Rabu 26 Juni 2024, BPPK menyelenggarakan Seminar Ketahanan Keluarga dengan tema *Positive Discipline* dalam Pengasuhan Anak yang materinya dibawakan oleh Ibu Irma Gustiana Andriani seorang psikolog sekaligus *founder* klinik psikologi Ruang Tumbuh. Seminar ini dihadiri oleh pegawai BPPK serta

pegawai Kemenkeu dan non-Kemenkeu yang hadir secara daring melalui channel Youtube @ bppkmenkeu. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan disiplin positif dalam pengasuhan anak di keluarga masing-masing, sehingga tercipta keluarga yang harmonis guna mendukung kinerja pegawai.



25 s.d. 26 Juni 2024

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Angkatan III

Gambar I.16: Dokumentasi Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Angkatan III



Pada 25 s.d. 26 Juni 2024, *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan program unggulan Pusdiklat AP kembali diselenggarakan. Kegiatan dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD dari wilayah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. *Executive Course* ini

merupakan angkatan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Palembang dan Jakarta. Program Unggulan BPPK ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong implementasi sinergi kebijakan fiskal nasional dan strategi pendanaan publik untuk mewujudkan harmonisasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



11 Juli 2024

Pelantikan 18 Pejabat Fungsional & Struktural di Lingkungan BPPK

Gambar I.17: Pelantikan 18 Pejabat Fungsional & Struktural di Lingkungan BPPK



Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto melantik 10 pejabat fungsional baru Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Pertama, 2 orang Widyaiswara Ahli Utama, dan 6 orang pejabat struktural. Pelantikan dilangsungkan di Aula

Gedung B BPPK pada Kamis pagi, 11 Juli 2024. Sejumlah 14 orang pegawai dilantik luring, dan 4 pegawai lainnya yang berada di luar Jabodetabek dilantik secara daring.



12 Juli 2024

Sosialisasi PUG dalam Mendorong Implementasi Kesetaraan Gender

Gambar I.18: Sosialisasi PUG dalam Mendorong Implementasi Kesetaraan Gender



Pada 12 Juli 2024, Dengan mengusung tema “Gender Action Budget untuk BPPK yang Inklusif”, BPPK menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan BPPK. Acara yang berlangsung *hybrid* secara luring di Aula Gedung B lantai 5 Sekretariat Badan serta daring melalui Ms. Teams dan Youtube ini menghadirkan Yudi Irmawan, Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan,

Sekretariat Jenderal, Kemenkeu dan Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai narasumber. Seminar ini merupakan salah satu program dari TIm PUG Sekretariat BPPK untuk mendorong implementasi PUG di lingkungan BPPK.



30 s.d. 31 Juli 2024

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Ak. IV

Gambar I.19: Dokumentasi *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Ak. IV



Pada tanggal 30 s.d. 31 Juli 2024, *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan program unggulan Pusdiklat AP kembali diselenggarakan di Jakarta. Peserta pada kegiatan kali ini adalah para pejabat setingkat eselon II di Pemerintah Daerah yang merupakan Kepala BPKAD/BKAD, Sekretaris

Daerah dan Asisten I/III/Administrasi Umum dan Keuangan. Program Unggulan BPPK yang bertujuan untuk mendorong implementasi sinergi kebijakan fiskal nasional dan strategi pendanaan publik untuk mewujudkan harmonisasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkeu dan Kemendagri.



15 Agustus 2024

Workshop Pendampingan BUM Desa

Gambar 1.20: Dokumentasi Workshop Pendampingan BUM Desa



Berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PKN STAN menyelenggarakan *Workshop* Pendampingan BUM Desa dalam Sinergi Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan BUM Desa pada Kamis, 15 Agustus 2024. Bertempat di Gedung N Kampus PKN STAN, kegiatan ini dibuka oleh sambutan Direktur PKN STAN Ibu Evy Mulyani dan *keynote speech* dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Luky Alfirman. *Workshop* ini

dihadiri oleh Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta para Kepala KPPN di wilayah Banten dan Bogor. Selain untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUM Desa, *workshop* ini juga bertujuan untuk membantu BUM Desa memecahkan permasalahan kelembagaan dan pengembangan usaha demi mewujudkan akuntabilitas.



21 Agustus 2024

Capacity Building BPPK “Judi Online: Ancaman Tersembunyi bagi Mental dan Integritas”**Gambar I.21:** Dokumentasi Capacity Building BPPK “Judi Online: Ancaman Tersembunyi bagi Mental dan Integritas”

Maraknya judi *online* di Indonesia, menimbulkan kekhawtiran mengingat dampaknya yang sangat merugikan baik secara hukum, mental, maupun integritas pribadi. Sebagai ASN, menjaga integritas dan kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Untuk meningkatkan *awareness* para pegawainya, BPPK melaksanakan kegiatan *Capacity Building* bertema “Judi Online: Ancaman

Tersembunyi bagi Mental dan Integritas” yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 21 Agustus 2024. Kegiatan luring dilaksanakan di Aula Pusdiklat Keuangan Umum dan disiarkan melalui *teams* dan kanal Youtube. Narasumber pada *Capacity Building* kali ini adalah Ibu Imita Fazriach yang merupakan Psikolog klinis dewasa dan industri organisasi.



13 Agustus 2024

Penyelenggaraan Forum Pembelajaran Keuangan Negara Tahun 2024

Gambar I.22: Dokumentasi Forum Pembelajaran Keuangan Negara Tahun 2024



Sebagai upaya penguatan pembelajaran keuangan negara, terutama program pembelajaran terkait standardisasi kompetensi di bidang anggaran dan perbendaharaan serta kekayaan negara, bertempat di Aula Gedung Catleya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK menyelenggarakan Forum Pembelajaran Keuangan Negara Tahun 2024. Kegiatan ini

dihadiri oleh perwakilan dari 32 Kementerian/ Lembaga mitra BPPK. Selain membahas evaluasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara Tahun 2024, pada forum ini juga dibahas informasi terkait Layanan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di BPPK Tahun 2025.



5 September 2024

Seminar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG



Upaya mengatasi perubahan iklim dan menciptakan ekosistem bumi yang lebih berkualitas, memerlukan pembiayaan yang berkesinambungan. Mobilisasi pembiayaan untuk pembangunan perlu memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan berdampak positif dari segi sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan sesuai panduan

konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait dengan mobilisasi pembiayaan yang memperhatikan prinsip-prinsip ESG, Pusdiklat KU menyelenggarakan Seminar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG pada 5 September 2024.



10 September 2024

Seminar “Women to Women Career Mentorship”

Gambar I.24: Dokumentasi Seminar “Women to Women Career Mentorship”



Pada 10 September 2024, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan Seminar “Women to Women Career Mentorship” di Aula Gedung B BPPK Purnawarman. Acara dihadiri oleh para *talent* Kemenkeu dan bertujuan untuk meningkatkan *awareness* terkait pengembangan karir, keseimbangan karir dan keluarga, serta implementasi dari *women to women mentorship*. Pada acara ini juga dilaksanakan *launching* “Layanan Women to Women Career Mentorship pada platform Cocolate” yang dilakukan oleh kepala Pusdiklat KM, Bapak W.K Romadhoni.

Seminar ini mendatangkan narasumber inspiratif yaitu Ibu Sumiyati (Komisaris IFG dan Inspektur Jenderal tahun 2017-2021), Ibu Dwi Astuti (Direktur P2 Humas DJP) dan juga Bapak Dodi Gusdiyandi (Kabag Penghargaan, Penegakan Disiplin, Pensiun, dan Regulasi SDM Biro SDM Setjen Kemenkeu). Ibu R. Wiwin Istanti (Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kemenkeu sekaligus Ketua Penggerak Implementasi PUG Kemenkeu) juga turut hadir memberikan *keynote speech* pada acara tersebut.



12 September s.d. 12 November 2024

Pelaksanaan Kemenkeu Learning Festival (KLF) 2024

Gambar I.25: Dokumentasi Peluncuran Kemenkeu Learning Festival 2024



KLF 2024 mengusung tema “Tumbuh Bersama, Unggul Berkarya”. “Tumbuh Bersama” berarti saling mendukung, saling belajar, dan terus meningkatkan kapasitas diri dan tim agar mampu menjawab setiap tantangan yang ada. Pada saat yang sama, “Unggul Berkarya” mengajak kita semua untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan.

Rangkaian kegiatan KLF 2024 terdiri dari Peluncuran (12 September 2024), Learning Bootcamp (17–21 September 2024), Ideas Chamber (1–3 Oktober 2024), Kemenkeu Learning Week (8–11 Oktober 2024), Simposium Nasional Keuangan Negara (15 Oktober 2024), Be a Champion (12 September–22 Oktober 2024), Education Fair (22 Oktober 2024), dan Acara Puncak (12 November 2024).



17 September 2024

Serah Terima Mahasiswa Baru Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)

Gambar I.25: Dokumentasi Serah Terima Mahasiswa Baru RDTL



Bertempat di Gedung M Kampus PKN STAN, diselenggarakan acara serah terima Mahasiswa Baru PKN STAN yang berasal dari Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) pada Selasa, 17 September 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh delegasi dari Kemenkeu RDTL serta perwakilan lembaga dari PKN STAN. Dalam kesempatan ini, secara resmi dilakukan serah terima 15 Mahasiswa Baru Angkatan 2024 dari pihak RDTL kepada PKN STAN. Lima belas mahasiswa dan empat delegasi RDTL tiba di Indonesia pada Sabtu, 14

September 2024. Para mahasiswa diberikan pengarahan serta pengenalan singkat mengenai PKN STAN, termasuk pendidikan berasrama yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Atas kolaborasi yang baik dengan semua pihak, kerja sama PKN STAN dan Kemenkeu RDTL akan terus ditingkatkan. Di antaranya adalah kerja sama pendidikan nonreguler untuk 30 mahasiswa secara bertahap mulai dari SPMB tahun 2025 dan SPMB tahun 2026.



20 September 2024

Peluncuran Buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati

Gambar I.26: Dokumentasi Kegiatan Peluncuran Buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati



Buku biografi profesional Sri Mulyani Indrawati yang berjudul “No Limits: Reformasi dengan Hati” diluncurkan pada Jumat malam, 20 September 2024. Penyusunan buku ini dimulai sejak Desember 2019 dan ditulis oleh Metta Dharmasaputra. Peluncuran buku ini merupakan tradisi dari Kementerian Keuangan untuk mendokumentasikan pemikiran dan perjalanan karier para tokoh yang pernah menjabat sebagai bendahara negara. Dalam buku tersebut, Sri Mulyani mengenang 20 tahun terakhir pengabdianya di pemerintahan, di mana ia menghadapi berbagai peristiwa penting dan sulit, mulai dari tsunami Aceh, krisis keuangan global, pandemi Covid-19, hingga kondisi geopolitik yang menyebabkan harga minyak tinggi.

Acara peluncuran buku yang diadakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh penting. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta para mantan Menteri Keuangan seperti Agus Martowardojo, Chatib Basri, dan Bambang Brodjonegoro. Selain itu, hadir pula mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan pengusaha Chairul Tanjung, serta aktor Reza Rahadian.



25 s.d. 26 September 2024

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Ak. V

Gambar I.26: Dokumentasi *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Ak. V



BPPK melalui Pusdiklat AP kembali berkolaborasi dengan DJPB, DJPK dan Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan kegiatan *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda Ak. V pada tanggal 25 - 26 September 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Kegiatan dihadiri oleh para Sekretaris daerah dan Kepala BPKAD dari wilayah di regional Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua dan beberapa wilayah Indonesia timur lainnya. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan *offline* terakhir dari rangkaian *Executive Course* yang dilaksanakan tahun ini.



8 s.d. 9 Oktober 2024

4th WCO RTC Indonesia International Conference 2024

Gambar I.27: Dokumentasi 4th WCO RTC Indonesia International Conference 2024



Pusdiklat Bea dan Cukai berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Politeknik Keuangan Negara STAN telah sukses menyelenggarakan 4th WCO RTC Indonesia International Conference: *Building a Seamless Future Through Disruptive Technologies in Customs and Multi-Stakeholder Collaboration*. Konferensi diselenggarakan *hybrid* pada tanggal 8-9 Oktober

2024 di Aula Mezzanine Djuanda 1, Kantor Pusat Kemenkeu dan Media daring Zoom dan *Youtube* Pusdiklat Bea dan Cukai. Penyelenggaraan konferensi ini telah didahului dengan proses *call for paper* yang dimulai tanggal 3 Juli s.d. 2 September 2024 dan pengumuman pemenang pada tanggal 23 September 2024.



8 s.d. 9 Oktober 2024

High Level Meeting (HLM) 2024

Gambar I.28: Dokumentasi High Level Meeting (HLM) 2024



Delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Arik Hariyono (Direktur Penilaian DJKN), Bapak Heru Wibowo (Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan), Bapak Ganti Lis Ariyadi (Kepala Pusdiklat Keuangan Umum), dan Bapak Agus Bandiyono (Wakil Direktur Bidang Akademik, Politeknik Keuangan Negara STAN) menghadiri HLM 2024 yang dilaksanakan di Parkroyal Penang Resort Hotel, Penang pada tanggal 8-9 Oktober 2024. Tujuan utama HLM

2024 adalah memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), DJKN (Direktorat Penilaian), BPPK (Pusdiklat KNPk dan PKN STAN) dalam hal penelitian, pelatihan, dan pendidikan di bidang properti (*real estate*). HLM tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, namun juga untuk membahas perencanaan kegiatan di tahun 2025.



9 Oktober 2024

Wisuda PKN STAN 2024

Gambar I.29: Dokumentasi Wisuda PKN STAN 2024



Politeknik Keuangan Negara STAN menggelar Wisuda untuk para lulusan Tahun Akademik 2023/2024 di gedung Student Center Kampus PKN STAN pada 9 Oktober 2024. Acara wisuda dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I dan II, jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, KPK dan BPKP, Ketua Ikatan Keluarga Alumni STAN Heru Muara Sidik, serta mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri. Total lulusan PKN

STAN pada tahun 2024 adalah sebanyak 560 orang yang merupakan mahasiswa alih program (tugas belajar) dari sembilan program studi pada jenjang Diploma III dan Sarjana Terapan. Rata-rata capaian IPK lulusan adalah 3,69 dengan IPK tertinggi 3,98. Tidak hanya dari Kemenkeu, lulusan alih program ini juga berasal dari pegawai tugas belajar Kementerian PUPR, BPKP, Kementerian BUMN, Kementerian Desa PDTT serta Kementerian Perhubungan.



19 November 2024

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPPK

Gambar I.30: Dokumentasi Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPPK



Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto hari ini resmi melantik 9 (sembilan) pejabat fungsional di lingkungan BPPK yang terdiri dari 2 (dua) jabatan fungsional widyaiswara, 6 (enam) jabatan

fungsional pranata komputer, dan 1 (satu) jabatan fungsional arsiparis. Pelantikan diselenggarakan *hybrid* secara luring di ruang D101 Sekretariat Badan dan secara daring melalui aplikasi Zoom.



12 November 2024

Town Hall Meeting Semester II

Gambar I.31: Dokumentasi Town Hall Meeting Semester II



Town Hall Meeting BPPK adalah salah satu pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh BPPK, dimana Pimpinan BPPK memberikan informasi terkini, berbicara tentang isu-isu strategis, dan memberikan kesempatan kepada Pegawai BPPK untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atas informasi terkini atau isu-isu strategis tersebut. Tema besar dari penyelenggaraan THM BPPK Semester II Tahun 2024 kali ini adalah Transformasi dan

Fungsionalisasi Menuju Pembelajaran Berdampak Tinggi. Kegiatan diselenggarakan pada hari Selasa, 12 November 2024 dan diikuti oleh seluruh pegawai BPPK baik secara luring udi Aula Gedung B BPPK Purnawarman dan daring melalui *teams*. Selain diisi dengan sesi tanya jawab antara pimpinan dan para pegawai BPPK pada kegiatan Town Hall Meeting BPPK juga disampaikan para pemenang dari Feta Awards 2024.



21 November 2024

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN

Gambar I.32: Dokumentasi Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN 2024



PKN STAN kembali menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SEMBADHA) tahun 2024. Gelaran SEMBADHA yang keenam ini mengusung tema '*From Waste to Wonder? Transforming Our World Through Circular Economy Principles*'. SEMBADHA 2024 diselenggarakan dalam tiga rangkaian kegiatan, yaitu Seminar Nasional, *Call for Paper*, serta

Pameran. Seminar Nasional diselenggarakan pada Kamis, 21 November 2024 di Gedung N Kampus PKN STAN dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Bersamaan dengan kegiatan ini, dilaksanakan pula pameran yang diikuti oleh sejumlah booth dari K/L, perguruan tinggi, serta UMKM.



3 s.d. 5 Desember 2024

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Periode III 2024

Gambar I.33: Dokumentasi Pelaksanaan USKP Periode Desember 2024



Selama tiga hari berturut-turut, mulai 3 sampai dengan 5 Desember 2024, BPPK menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode III yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ujian ini memberikan kesempatan kepada para profesional di bidang perpajakan untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, yang nantinya menjadi syarat utama

dalam mengantongi izin praktik resmi sebagai konsultan pajak di Indonesia. Panitia USKP, yang berada di bawah koordinasi Kemenkeu, secara aktif memastikan seluruh rangkaian ujian berjalan lancar, tertib, dan transparan. Tahun ini, total 2.114 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti ujian yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat A, B, dan C.



24 Desember 2024

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPPK

Gambar I.34: Dokumentasi Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPPK



Sekretaris BPPK, Bambang Juli Istanto, melantik 9 (sembilan) pejabat fungsional di lingkungan BPPK. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 1 (satu) jabatan fungsional dosen dan 8 (delapan) jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

Pelantikan diselenggarakan *hybrid* secara luring di ruang D101, Gedung B, Sekretariat BPPK dan secara daring melalui *Teams*.

1.6. PENGHARGAAN BPPK

1.6.1 TOP DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 #LEVEL STARS 5 PADA AJANG TOP DIGITAL AWARDS 2024

Untuk ketiga kalinya, BPPK meraih penghargaan *Top Digital Awards* berturut-turut sejak tahun 2022, 2023, dan 2024 dari *Majalah IT Works*. Penghargaan ini diberikan karena Tim IT BPPK telah mengimplementasikan pengembangan sistem berbasis *project*, *IT Masterplan* berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

dan *Enterprise Architecture*, bahkan pemanfaatan *Generative AI (Artificial Intelligence)* pada Modul *Chatbot Aplikasi Knowledge Management System* serta Modul *Chatbot Tutor Mingo* pada *E-Learning Managing Change: Be Adaptive and Agile*, KLC LMS.

Gambar 1.35: Dokumentasi *Top Digital Implementation 2024 #Level Stars 5*



1.6.2 TOP LEADER ON DIGITAL IMPLEMENTATION 2024 PADA AJANG TOP DIGITAL AWARDS 2024

Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto juga meraih penghargaan sebagai *Top Leader on Digital*

Implementation 2024 pada Ajang *Top Digital Awards 2024* yang digelar oleh *Majalah It Works*.

1.6.3 GOLDEN TROPHY IT WORKS TOP DIGITAL AWARDS 2024

Untuk pertama kalinya BPPK meraih penghargaan "*Golden Trophy*". Penghargaan ini diberikan atas pencapaian BPPK tiga kali berturut-turut meraih trophy

bintang lima dalam *Top Digital Implementation* dan *Top Leader on Digital Implementation*

Gambar I.36: Dokumentasi Trophy Top Digital Awards 2024



1.6.4 PENGHARGAAN PPID TINGKAT I KEMENKEU KATEGORI INFORMATIF

PPID Tingkat I BPPK berhasil memperoleh predikat informatif. Perolehan ini diumumkan pada kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu 2024 dengan tema Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 di Aula Mezzanine,

Jakarta Pusat. Predikat informatif merupakan kategori tertinggi dalam kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen BPPK untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

Gambar I.37: Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif



1.6.5 INOVASI GAMIFIKASI PEMBELAJARAN

BPPK berhasil menyabet gelar atas inovasinya dalam bidang teknologi pembelajaran. Inovasi Gamifikasi Pembelajaran yang dirancang oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Pusdiklat KM berhasil membawa nama BPPK Kemenkeu mendapatkan penghargaan dari Pusdatin Kemendikbudristek.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara PTP Connect yang merupakan salah satu ajang unjuk kreasi inovasi PTP dari seluruh Indonesia. Pada acara ini puluhan inovasi teknologi pembelajaran dari berbagai K/L dipamerkan untuk mendorong kreativitas dalam pengembangan teknologi pembelajaran.



Gambar I.38: Dokumentasi Penghargaan PTP Connect

1.6.6 PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pada tanggal 11 Desember 2024, Pusdiklat Bea dan Cukai menerima penganugerahan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam acara “Satu Dekade Zona Integritas” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi. Dalam momen ini, Pusdiklat Bea dan Cukai mewakili BPPK menjadi salah satu unit yang turut memberikan kontribusi bagi Kemenkeu dalam meraih penghargaan *Honorable Award* atas capaian tertinggi ZI WBBM tingkat nasional dengan capaian 39 Unit.



Gambar I.39: Dokumentasi Penerimaan Predikat WBBM

1.6.7 PENGHARGAAN MITRA STRATEGIS KPK

Pusdiklat KM kembali mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra strategis KPK yang telah melaksanakan

kerjasama program diklat dan sertifikasi sektor antikorupsi tahun 2024.

Gambar 1.40: Dokumentasi Penghargaan Mitra Strategis KPK



1.6.8 PENGHARGAAN ACCA INDONESIA INSTITUTION PARTNER OF THE YEAR 2024 (ACCA QUALIFICATION) KEPADA PKN STAN

Politeknik Keuangan Negara STAN menerima penghargaan ACCA Indonesia *Institution Partner of The Year 2024 (ACCA Qualification)*. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan

atas pencapaian PKN STAN sebagai mitra institusi pendidikan terbesar yang menyelenggarakan *ACCA Qualification Program* di Indonesia

Gambar I.41: Dokumentasi Penghargaan ACCA Indonesia



1.6.9 PKN STAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN TERBAIK I BANTEN SDGS AWARDS KATEGORI PERGURUAN TINGGI/MAHASISWA

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Center Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN berhasil meraih penghargaan Terbaik I Banten SDGs Awards Kategori Perguruan Tinggi/ Mahasiswa Tahun 2024. Apresiasi ini diserahkan dalam acara Forum Tahunan SDGs Banten 2024 dan Pameran Pangan Lokal di Gedung Auditorium

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Pemberian penghargaan ini merupakan wujud terima kasih dari Pemerintah Provinsi Banten kepada pihak yang berkontribusi dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs di Provinsi Banten.

Gambar I.42: Dokumentasi Penghargaan Terbaik I Banten SDGS Awards Kategori Perguruan Tinggi/Mahasiswa



1.6.10 LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DENGAN KATEGORI AKREDITASI A DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DENGAN KATEGORI AKREDITASI A

Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Administrator dengan kategori akreditasi A dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori Akreditasi A. Akreditasi ini berlaku dengan masa 5 (lima) tahun.

Gambar I.43: Dokumentasi Akreditasi dari LAN RI



1.6.11 PPID TINGKAT II KATEGORI INFORMATIF PADA PKN STAN

PKN STAN selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tingkat II di Lingkungan Kemenkeu berhasil mendapatkan

Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu Tahun 2024.

Gambar I.44: Dokumentasi Penghargaan PPID Tingkat II PKN STAN Kategori Informatif



1.6.12 PENGHARGAAN TOP 3 BEST PAPER PADA PUBLIC SECTOR INTERNATIONAL CONFERENCE (PSIC)

Bapak Eri Hariyanto, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum berhasil memperoleh "Top 3 Best Paper" dengan mengangkat paper tentang Upaya Peningkatan Inovasi Pembiayaan di Indonesia, terutama dengan mekanisme KPBU yang menggunakan skema syariah pada kegiatan

Public Sector International Conference (PSIC) 2024 dengan tema "Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals 2030" yang diselenggarakan tanggal 11 s.d. 12 September 2024 di Nusa Tenggara Barat.

1.6.13 PENGHARGAAN KARYA TULIS ILMIAH TERBAIK

Pada puncak acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional (PITNAS) Widyaiswara dengan Tema "Penghargaan Karya Tulis Ilmiah Terbaik" pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Widyaiswara yang dilangsungkan tanggal 21 September 2024, Ibu Jamila Lestyowati, Widyaiswara Ahli Madya

/ Utama Pusdiklat Keuangan Umum, berhasil menyabet penghargaan Karya Tulis Ilmiah Terbaik dengan judul "Membangun Budaya Knowledge Sharing pada Pegawai Dalam Kerangka Learning Organization"

1.6.14 PENGHARGAAN DUTA TRANSFORMASI TERBAIK KEMENKEU

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM.1/2025, BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum berhasil menjadi salah satu dari sepuluh Duta Transformasi Terbaik Kemenkeu Tahun 2024.

Duta Transformasi merupakan perpanjangan tangan pimpinan Kemenkeu dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi manajemen perubahan RBTK terhadap seluruh pegawai Kemenkeu,

Gambar I.45: Dokumentasi Penghargaan Duta Transformasi Terbaik Tahun 2024

I. DUTA TRANSFORMASI TERBAIK TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

1.6.15 PENGHARGAAN NAGARA DANA RAKCA UTAMA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 382 Tahun 2024, Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto meraih penghargaan Nagara Dana Rakca Utama. Penghargaan ini diberikan karena dedikasi/kinerja/prestasi beliau diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Memprakarsai pengembangan dan penerapan pembelajaran terintegrasi kolaborasi, pembelajaran berbasis *leveling*, Kemenkeu *Learning Center* (KLC), dan Manajemen Pengetahuan untuk mewujudkan Kemenkeu sebagai *Learning Organization* (LO).
- b. Memprakarsai pengembangan dan penerapan inklusivitas pembelajaran Keuangan Negara melalui Open Access Programs pada KLC yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkeu dan pihak eksternal Kemenkeu dengan waktu

dan tempat yang lebih fleksibel dimana realisasinya telah mencapai 832 program digital-klasikal yang diikuti oleh lebih dari 806.500 peserta.

- c. Memprakarsai pengembangan dan penerapan *learning path* Jabatan Fungsional Keuangan Negara secara terstruktur, berbasis jenjang dan bidang tugas, yang selaras dengan jalur karier fungsional.
- d. Memprakarsai pengembangan dan penerapan perbaikan tata kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), memperluas cakupan penerima beasiswa hingga mencapai lebih dari 10.000 *awardee* dalam tahun 2023, serta memperluas pembiayaan riset, sasaram beasiswa pada perguruan tinggi unggulan, dan pemberdayaan lulusan LPDP.

1.6.16 PENGHARGAAN NAGARA KSATRIA KOLABORASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 382 Tahun 2024, dua pejabat di lingkungan BPPK yaitu Ibu Endang Pancawardani (Kepala BDK Denpasar) dan Bapak Irfan Ramdani (Kepala Subbidang TPMP Pusdiklat KU) berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Ksatria Kolaborasi. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, kinerja dan kontribusi nyata yang diberikan oleh kedua pejabat tersebut.

Berikut ini adalah dedikasi/kinerja/prestasi yang telah diberikan oleh Ibu Endang Pancawardani:

- a. Memprakarsai pemberdayaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2022; dan
- b. Berkolaborasi dengan Pemkab Belu, Kanwil DJPB Prov. Nusa Tenggara Timur, dan PKN STAN tahun 2023 untuk menyelenggarakan edukasi kepemimpinan dan pengelolaan

dana desa berbasis *Sustainable Development Goals* yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Kabupaten Belu.

Adapun dedikasi/kinerja/prestasi yang diberikan oleh Bapak Irfan Ramdani adalah sebagai berikut:

- a. Memprakarsai pengembangan dan berhasil mengkolaborasikan penyusunan Aset Intelektual di seluruh wilayah kerja BDK Manado sebanyak 41 unit kerja yang tersebar di 4 provinsi yang menghasilkan lebih dari 80 aset intelektual di KMS Kemenkeu; dan
- b. Menyusun *Dashboard Learning Consultant* sehingga memudahkan Pengelola Mitra dan Unit Mitra dalam implementasi *Learning Organization*.

1.6.17 PENGHARGAAN NAGARA KSATRIA INSPIRASI

Tim Akselerasi Pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan UMKM melalui Program Pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Ksatria Inspirasi atas dedikasi dan jasanya dalam rangka memprakarsai pengembangan dan penerapan program pembelajaran *E-Learning* Dasar-Dasar Pengelolaan UMKM di KLC yang telah diikuti oleh ribuan peserta.

Selain itu, Tim Akselerasi Pelaksaan Program

Unggulan Pusdiklat Keuangan Umum yang terdiri dari Ibu Heni Kartikawati, Bapak Arfiansyah Darwin, Ibu Jamila Lestyowati, Bapak Gathot Subroto, Bapak Irwan Hermawan, Ibu Khotimatus Sa'dyah dan Bapak M. Syahriawan Donny juga berjasa dalam menginisiasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis terkait perpajakan, pemasaran digital, pembukuan, dan pelapran keuangan untuk para pelaku UMKM di Balikpapan, Manado, Malang, Bandung dan Palembang.

1.7. BENCHMARKING UNIT LAIN KE BPPK

Pada periode tahun 2024, BPPK menjadi tujuan patok banding (*benchmark*) dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari *good practices* yang diterapkan di BPPK diantaranya terkait

Corporate University, pengelolaan pembelajaran, *Knowledge Management System* dan hal-hal baik lain yang sudah diimplementasikan di BPPK. Berikut ini adalah daftar kunjungan dalam rangka *benchmark* sepanjang tahun 2024.

No	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
1	Politeknik Statistika STIS	17 Januari 2024	Benchmark ke PKN STAN terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu (Tim Contact Center Hai DJPB)	25 Januari 2024	Benchmark ke Pusdiklat KNPk terkait peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan pada operasionalisasi kanal layanan media sosial (broadcasting dan live streaming).
3	Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR	31 Januari 2024	Benchmark ke Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mempelajari penyusunan pedoman evaluasi pasca pembelajaran.
4	Kementerian Kesehatan	6 Februari 2024	Benchmark ke Pusdiklat KU terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui pengembangan teknologi pembelajaran.
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM	7 Februari 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK terkait Penjaminan Mutu Pelatihan.
6	Balai Besar Pelatihan Kesehatan	12 Februari 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK terkait pengembangan digitalisasi pelatihan di Kemenkeu khususnya terkait Massive Open Online Course (MOOC), Microlearning, dan Kemenkeu Learning Center (KLC).
7	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	12 Februari 2024	Benchmark ke PKN STAN terkait pembentukan program studi baru dan pengembangan kurikulum.

No	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
8	Pusdiklatwas BPPK	27 Februari 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari learning value chain yang mengedepankan pengalaman belajar pemelajar serta mempelajari Massive Open Online Courses (MOOC) di Kemenkeu Corporate University.
9	Pusdiklatwas BPPK	29 Februari 2024	Benchmark ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terkait pengelolaan pembelajaran.
10	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	5 Maret 2024	Benchmark ke PKN STAN dalam rangka Knowledge Sharing Penyusunan Peta Jalan (roadmap) Penyesuaian Hasil Evaluasi PTKL.
11	BPJS	7 Maret 2024	Benchmark ke Pusdiklat KU untuk mempelajari ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation).
12	Mahkamah Konstitusi	13 Maret 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Kemenkeu Learning Center (KLC) dan kebijakan pembelajaran.
13	Bank DKI	3 Mei 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari: Dukungan Top Management dalam implementasi Corporate University; Program Unggulan; Keterlibatan Learning Partner dalam Kegiatan Pembelajaran; Standardisasi Proses Learning Value Chain; Desain Pembelajaran Berbasis Teori 10:20:70;
14	BPSDM Kemendagri	22 Mei 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Corporate University.
15	Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)	03 Juni 2024	Benchmark ke PKN STAN untuk mempelajari Persiapan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan.
16	BPSDM Pemprov Kaltim	7 Juni 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Knowledge Management System di BPPK.
17	BKKBN	13 Juni 2024	Benchmark ke Sekretariat BPPK untuk mempelajari Implementasi Corporate University di Kemenkeu.
18	Politeknik Penerbangan Surabaya	21 Juni 2024	Benchmark ke PKN STAN untuk mempelajari Pengasuhan Pembangunan Karakter Mahasiswa.
19	Pusdiklatwas BPPK	15 Juli 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk melakukan pendalaman pengelolaan jabatan fungsional Widyaiswara, pembahasan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pelatihan.
20	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kemenkes	17 Juli 2024	Benchmark ke Pusdiklat KM untuk mempelajari Modul e-learning pelatihan manajerial dan sosial kultural.
21	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, BPPK	19 Juli 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi JFA.
22	Kementerian Luar Negeri	22 Juli 2024	Implementasi Corporate University di Kemenkeu.
23	Politeknik Pekerjaan Umum	01 Agustus 2024	Benchmark ke PKN STAN untuk mempelajari Tata Kelola Satuan Penjaminan Mutu.
24	Politeknik STIA LAN Bandung	20 Agustus 2024	Benchmark ke PKN STAN untuk mempelajari Pengelolaan Tax Center.
25	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	28 Agustus 2024	Benchmark ke PKN STAN untuk mempelajari Satuan Biaya, Standardisasi honorarium bagi tenaga pendidik, penyusun RPS, modul, dan bahan ajar.
26	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian LHK	30 Agustus 2024	Benchmark ke Pusdiklat KM untuk mempelajari Pembelajaran Jarak Jauh, khususnya Massive Open Online Courses (MOOC) di Kemenkeu Corporate University.

No	Nama KLID	Waktu Pelaksanaan	Materi
27	Kemenkumham	11 September 2024	Benchmark ke BPPK untuk mempelajari Corpu dan KLC.
28	BPSDM Kementerian Hukum dan HAM	13 September 2024	Benchmark ke BPPK Pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Kemenkeu.
29	PPSDM Kementerian Tenaga Kerja	24 September 2024	Benchmark ke BPPK untuk mempelajari : Blue print / Design Pengembangan Kemenkeu Corpu dan Pengembangan Knowledge Management System pada Kemenkeu Corpu.
30	Sekretariat DJBC	13 November 2024	Benchmark ke Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memahami lebih jauh proses evaluasi pasca pembelajaran bagi para pegawai Bagian Pengembangan.
31	Lemdiklat POLRI	26 November 2024	Benchmark ke Pusdiklat KM untuk mempelajari: Overview KLDP, Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang sesuai KLDP, Pembelajaran untuk mendukung KLDP; dan Pengembangan Konten E-Learning.
32	BPSDM Jawa Timur	28 November 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Implementasi Corporate University dan Pembelajaran Modern.
33	BBPK Ciloto (Kementerian Kesehatan)	19 Desember 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
34	Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	20 Desember 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan Pelatihan Keuangan Negara dan Sertifikasi.
35	BPSDM Kemenkumham	20 Desember 2024	Benchmark ke Pusdiklat AP untuk mempelajari Pengelolaan Pelatihan Keuangan Negara dan Sertifikasi.

BAB 2:

PROFIL BPPK



2.1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

2.1.1 VISI

Visi BPPK Tahun 2020-2024 adalah Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kemenkeu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.” Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi

dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kemenkeu dan juga Indonesia.



2.1.2 MISI

Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kemenkeu Nomor 5 “Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”. Adapun misi BPPK ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka *Kemenkeu Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka *Kemenkeu Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka *Kemenkeu Corporate University*.
5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

2.1.3 TATA NILAI

Tata nilai yang berlaku pada BPPK mengacu pada tata nilai yang berlaku di lingkungan Kemenkeu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, nilai-nilai Kemenkeu terdiri dari:

1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

2.2. SEJARAH BPPK

2.2.1 PENDIDIKAN JANGKA PANJANG DAN PENDEK PADA MASA SEBELUM BPLK

Sebelum terbentuknya BPLK, Pendidikan dan Pelatihan pegawai Kemenkeu ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal dan dapat digolongkan menjadi Pendidikan yang dilaksanakan dalam jangka Panjang dan jangka pendek.

1. Jangka Panjang

Pendidikan jangka Panjang terdiri dari:

- a. Akademi Pajak dan Pabean (AP2)
- b. Kursus Thesauri Negara
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN)
- d. Akademi Thesauri Negara (ATN)
- e. Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK)
- f. Pendidikan Tenaga Akuntan
- g. Akademi Perbendaharaan Negara (APBN)
- h. Institut Ilmu Keuangan

2. Jangka Pendek

- a. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Anggaran
- b. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Pajak
- c. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah)
- d. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Pendidikan dan Latihan di bidang Pengawasan Keuangan Negara

2.2.2 LAHIRNYA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN (BPLK)

BPLK terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang diikuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang meliputi:

1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
2. Pusdiklat Kebendaharaan Umum;
3. Pusdiklat Perpajakan;
4. Pusdiklat Bea dan Cukai;

5. Pusdiklat Pengawasan;
6. Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian; dan
7. Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Dengan lahirnya BPLK, pendidikan dan pelatihan pegawai Kemenkeu yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK. Dalam perjalanannya organisasi BPLK mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perubahan lingkungan maupun tuntutan yang harus dihadapi.

2.2.3 TERBENTUKNYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tahun 2001, perubahan organisasi BPLK kembali terjadi dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001. Nama BPLK berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan susunan Sekretariat Badan, Pusdiklat Pegawai, Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, dan Pusdiklat Keuangan Umum. STAN secara status quo tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan selanjutnya kembali terjadi dengan ditetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yaitu Sekretariat Badan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Umum, dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. STAN secara status quo tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI

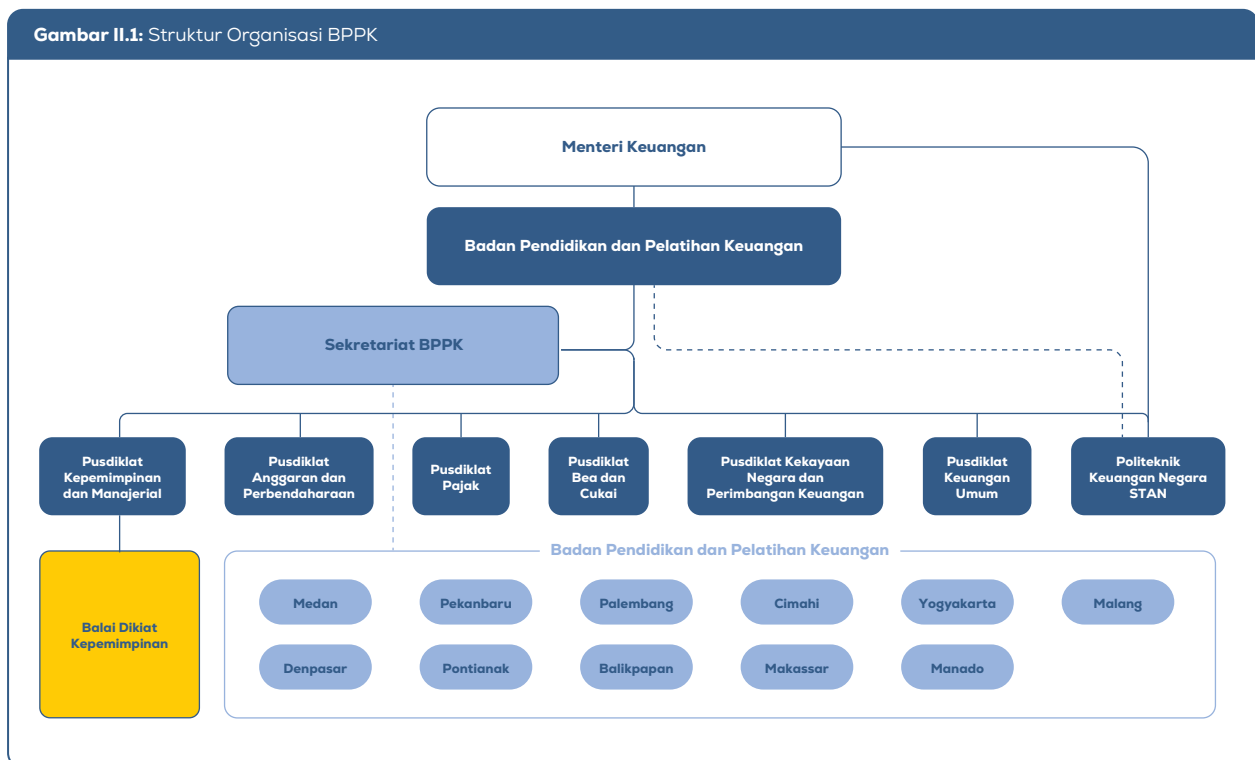
BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
2. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
4. pelaksanaan administrasi BPPK; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pusat maupun Unit Teknis di daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Adapun struktur organisasi BPPK menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu dapat dilihat pada gambar berikut:



2.4. PROFIL PEJABAT



Andin Hadiyanto, S.E., M.A., Ph.D.

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

Lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Juni 1965. Menamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada 1989. Mendapatkan gelar Master of Art (1997) & Doctor of Philosophy (2000) dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012). Pada 7 Desember 2018 kembali menempati posisi sebagai Direktur

Eksekutif Bank Dunia, yang mewakili 11 negara ASEAN di Bank Dunia, Washington DC. Pada tanggal 22 Juli 2019 dilantik sebagai Dirjen Perbendaharaan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Terakhir, Andin Hadiyanto dilantik oleh Sri Mulyani sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 12 Maret 2021 menggantikan Rionald Silaban.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2021 menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX tahun. Selain itu, beliau juga meraih penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2022-2024 dari Majalah It Works.



Bambang Juli Istanto, S.E., M.M

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Juli 1971. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Sebelas Maret di tahun 1994 dan meraih gelar Master dari STIE Artha Bodhi Iswara tahun 2008.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2009. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, dilantik sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan hingga saat ini.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016 menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



Wahyu Kusuma Romadhoni, S.E., M.Si.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan dan Manajerial

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1974. Beliau menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2001 dan meraih gelar Master dari Universitas Indonesia tahun 2006.

Mengawali karir di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 1995. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang kemudian berganti nama menjadi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2021 hingga saat ini.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



Bhimantara Widyajala, S.H., Ak., M.S.F.

Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Anggaran dan
Perbendaharaan

Lahir di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1967. Menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan meraih gelar Akuntan pada tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan pada the George Washington University di Washington, DC, USA pada tahun 1999 dengan meraih gelar Master of Science in Finance (MSF).

Selain gelar pendidikan formal, beberapa Sertifikat Profesi (*Professional Designations*) dari lembaga/asosiasi terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri telah diperolehnya, yaitu: *Certified Internal Auditors (CIA)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, *Fellow Certified Practicing Accountant Australia (F CPA[Aust])*, *ASEAN CPA*, *Certified Professional in Human Resources Management*, *Qualified Government Internal Auditor*, *Certified Professional Management Accountant (CPMA)*, dan *Indonesia Internal Auditor Practitioner (IIAP)*.

Mengawali karir sebagai Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 1988. Pada awal 2007 memulai tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Surat Berharga Negara dan dikukuhkan sebagai Direktur Surat

Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada tahun 2011. Mengemban tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada tahun 2012. Dipercaya menjadi Direktur Eksekutif the Asian Development Bank selama 2 periode, yaitu tahun 2013 s.d. 2017, yang mewakili 8 negara anggota, yaitu Armenia, Cook's Islands, Indonesia, Kyrgyz Republic, New Zealand, Samoa, dan Tonga. Pernah menjabat di berbagai posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Dua) lainnya pada Kementerian Keuangan, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Plt. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, pada Sekretariat Jenderal, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, hingga kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Setelah menyelesaikan rangkaian tugas di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, saat ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan (Kapusdiklat AP) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun.



Ir. Retno Sri Sulistyani, M.A.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

Lahir di Pacitan pada tanggal 7 Oktober 1968. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar Master dari The City University of London.

Mengawali karir di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan pada tahun 1993. Diangkat sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi sebelum kemudian menjadi Kepala Pusklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di tahun 2023 hingga saat ini.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



Heru Wibowo, S.E., M.A., Ph.D.

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan

Lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Desember 1971. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Brawijaya di tahun 1995 dan meraih gelar Master dari International University of Japan tahun 2005. Gelar Doktor diperolehnya dari The University of Western Australia pada tahun 2012.

Mengawali karir di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada tahun 1999. Diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan

Anggaran dan Penghargaan Risiko Fiskal di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2019. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan pada tahun 2021 hingga saat ini.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



Ganti Lis Ariyadi, S.E., M.Ed.

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum

Lahir di Cilacap pada tanggal 2 Januari 1976. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Jenderal Soedirman di tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan pada *Flinders University of South Australia* pada tahun 2007 dengan meraih gelar *Master of Education (Leadership and Management)*.

Mengawali karir dengan diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2017. Kemudian menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mulai dari tahun 2021 s.d. 2024. Dan saat ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



Evy Mulyani, S.E., AK., M.B.A., Ph.D.

Direktur Politeknik
Keuangan Negara STAN

Lahir di Bandung pada tanggal 18 April 1976, beliau menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1999. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari Nanzan University Japan pada tahun 2004, dan gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari Deakin University, Australia pada tahun 2014.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif, Pusat Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2015 dan sebagai Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan

Hubungan Investor, Badan Kebijakan Fiskal (2018-2019). Pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 2021-2023 beliau dipercaya sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada 2 November 2023 beliau dilantik sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.

Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.



BAB 3:

SUMBER DAYA MANUSIA



3.1. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel III.1: Jumlah SDM BPPK Berdasarkan Unit Pada Tahun 2024

No	Unit	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat Badan	231
2.	Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	105
3.	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	92
4.	Pusdiklat Pajak	87
5.	Pusdiklat Bea dan Cukai	74
6.	Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	60
7.	Pusdiklat Keuangan Umum	77
8.	Politeknik Keuangan Negara STAN	258



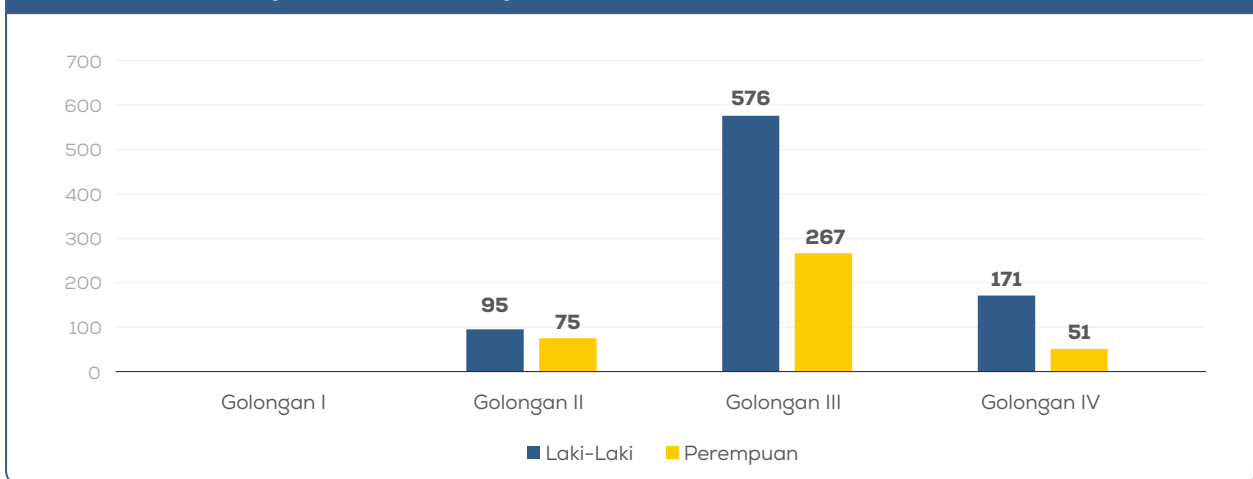
No	Unit	Jumlah Pegawai
9.	Balai Diklat Keuangan Medan	18
10.	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	21
11.	Balai Diklat Keuangan Palembang	16
12.	Balai Diklat Keuangan Cimahi	20
13.	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	25
14.	Balai Diklat Keuangan Malang	28
15.	Balai Diklat Keuangan Denpasar	18
16.	Balai Diklat Keuangan Pontianak	17
17.	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	21
18.	Balai Diklat Keuangan Makassar	21
19.	Balai Diklat Keuangan Manado	19
20.	Balai Diklat Kepemimpinan	26

BPPK melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

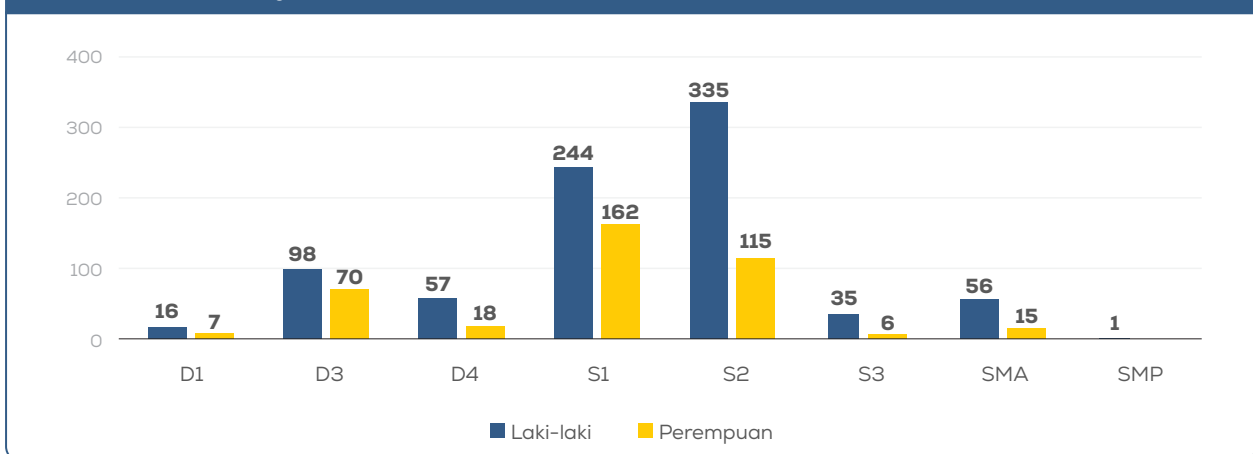
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPPK Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 1.235 pegawai. Jumlah tersebut terus mengalami

penurunan dari periode yang sama tahun 2023 dan 2022 yaitu sebanyak 1.258 dan 1.285 pegawai, Penurunan jumlah pegawai di BPPK sejalan dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menerapkan pertumbuhan negatif jumlah SDM (*minus growth*) sesuai Renstra BPPK pada tingkat pertumbuhan selama periode tahun 2020-2024. SDM BPPK per 31 Desember 2024 dilihat dari kelompok jabatan terdiri dari 1 orang JPT Madya, 10 orang JPT Pratama, 46 pejabat administrator, 128 pejabat pengawas, 655 pelaksana, diikuti kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 131 Widyaiswara, 108 Dosen, 30 Pranata Komputer, 35 Pengembang Teknologi Pembelajaran, 8 APK APBN, 16 PK APBN, 5 Arsiparis, 5 Asesor SDM Aparatur, dan 6 Pustakawan.

Gambar III.1: Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar III.2: Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



3.2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.2.1 MANAJEMEN TALENTA

Dalam rangka pemenuhan formasi jabatan, BPPK telah menyelenggarakan program Manajemen Talenta Tahun 2024. Manajemen Talenta di BPPK bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola pegawai-pegawai terbaik di BPPK untuk diproyeksikan dalam mengisi jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.

Ruang lingkup Manajemen Talenta di BPPK pada tahun 2024 hanya meliputi manajemen talenta bagi jabatan Pengawas, dikarenakan pemenuhan kebutuhan formasi bagi jabatan Administrator

masih menggunakan hasil Manajemen Talenta Tahun 2023

Dari hasil Analisis Kebutuhan *Talent*, pada tahun 2024 terdapat 2 jabatan target di lingkungan BPPK yang perlu diisi, meliputi:

1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK (tidak menyebut jumlah dan lokasi)
2. Kepala Subbag TUKI BDK (tidak menyebut jumlah dan lokasi).

3.2.2 TUGAS BELAJAR MANDIRI

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan di lingkungan Kemenkeu namun tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan organisasi, pengelolaan tugas belajar di Kemenkeu diatur dengan peraturan tersendiri. Pada tanggal 29 Mei 2024, Kemenkeu Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 6 September 2024.

Dengan diberlakukannya PMK ini, beberapa peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

1. PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;
2. PMK Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk PNS di Lingkungan Kemenkeu.

Pengertian tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier. Sesuai dengan PMK Nomor 34 Tahun 2024 tugas belajar dibagi menjadi dua, yaitu tugas belajar mandiri dan tugas belajar dibiayai. Tugas belajar mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan tugas belajar.

Pada Tahun 2024, terdapat 31 pegawai BPPK yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2: Pegawai BPPK yang Mengajukan Permohonan Tugas Belajar Mandiri Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang	Jumlah Pegawai
S1	12 Pegawai
S2	15 Pegawai
S3	4 Pegawai

3.2.3 TUGAS BELAJAR DIBIYAI

Tugas Belajar Dibiayai adalah tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan

Tugas Belajar. Sampai dengan berakhirnya tahun 2024 terdapat 55 pegawai BPPK yang tengah berstatus sebagai pegawai tugas belajar dibiayai.

Tabel III.3: Jumlah Pegawai Tugas Belajar Dibiayai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang	Jumlah Pegawai
D3	2 Pegawai
D4	8 Pegawai
S1	1 Pegawai
S2	32 Pegawai
S3	12 Pegawai

3.2.4 PELATIHAN DI BPPK

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 4.186 penugasan pelatihan kepada pegawai BPPK, yang terdiri atas pelatihan hasil Analisis Kebutuhan

Pembelajaran (AKP) Reguler dan AKP Insidental dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III.4: Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran bagi Pegawai BPPK

Pemilik Program	Individu	Insidental	Jabatan	Mandatori	Strategis
Pusdiklat KM	61	58	110	1437	157
Pusdiklat AP	98	211	66	-	39
Pusdiklat Pajak	-	7	-	-	36
Pusdiklat BC	4	115	-	-	-
Pusdiklat KNPk	57	1	83	324	65
Pusdiklat KU	211	149	652	27	218
Total	431	541	911	1788	515

3.2.5 PELATIHAN DI LUAR BADAN

Selain mengikuti pelatihan di BPPK, beberapa pegawai di BPPK juga melaksanakan pelatihan di lembaga pelatihan eksternal (pelatihan di luar badan). BPPK telah melaksanakan 34 program Diklat di Luar Badan (DLB) pada Tahun 2024.

Peserta program tersebut berasal dari seluruh unit di lingkungan BPPK dengan total peserta sebanyak 336 pegawai. Berikut ini adalah rincian Diklat Luar Badan yang diikuti oleh pegawai BPPK sepanjang tahun 2024.

Tabel III.5: Diklat Luar Badan Pegawai BPPK

No	Nama Pelatihan	Realisasi Peserta	Penyelenggara
1	Pelatihan <i>First Step to Contact Center Service</i>	4	Telexindo
2	Pelatihan <i>Coaching</i> untuk Generasi Z (CMC)	17	Coaching Indonesia
3	Pelatihan Profiling Potensi Pejabat Pengawas	106	Firstasia
4	Pelatihan dan Sertifikasi Teknis Audit ISO 27001:2022	19	PT. Catur Daya Solusi
5	Pelatihan <i>Strategic Planning and Effective Corporate Budgeting</i>	1	Ikatan Akuntansi Indonesia
6	Pelatihan <i>Feedback in Assessment Center</i>	7	Prasetiya Mulya Executive Learning Institute
7	Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak (<i>Certified Professional Contract Drafter (CPCD)</i>)	4	"Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis
8	Pelatihan <i>Evolving your Corporate University Strategic Positioning</i>	1	<i>Global Council of Corporate University (GlobalCCU)</i>
9	Pelatihan <i>Mastering AI's Impact on your Corporate University</i>	4	<i>Global Council of Corporate University (GlobalCCU)</i>
10	Pelatihan <i>Branding a Corporate University like a Business</i>	2	<i>Global Council of Corporate University (GlobalCCU)</i>
11	Pelatihan Bahasa Inggris (<i>Delivering Content in English</i>) bagi Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN	21	Lembaga Bahasa Universitas Indonesia
12	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi <i>Comptia Security+</i>	1	<i>Tranocate Consultancy</i>
13	Pelatihan <i>Motion Graphic</i> Kelas Reguler Level I	2	Hellomotion
14	Workshop Pengampu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun Anggaran 2024	6	Lembaga Administrasi Negara
15	Seminar <i>Journey to Pursuit A World-Class Contact Center</i> by Halo BCA	2	Halo BCA
16	<i>Leveraging AI for Enhanced Content Creation</i>	5	Coursera
17	Pelatihan <i>The 7 Habits of Highly Effective People</i>	2	Dunamis
18	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Accelerated Growth Coach Certification Program</i>	2	<i>Coaching Indonesia</i>
19	Pelatihan <i>Interpersonal Skill</i>	3	<i>GRC Consultant</i>
20	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Corporate Culture Agent</i> BNSP	1	ESQ
21	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum (<i>Certified Legal Auditor</i>)	1	Jimly School of Law and Government
22	Sertifikasi Penelaah Karya Tulis Ilmiah	1	Lembaga Sertifikasi Profesi Penerbitan
23	<i>Certified Human Capital Officer</i>	1	PT. Sahabat Karir Indonesia

No	Nama Pelatihan	Realisasi Peserta	Penyelenggara
24	Pelatihan <i>Speaking English Short Course 2 Private</i>	1	PT. Lister Teknologi Edukasi
25	Pelatihan <i>Academic Writing Level Intermediate</i>	1	Lembaga Bahasa Internasional, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
26	Pelatihan <i>Emerging Leader Program (ELP)</i>	1	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)
27	Pelatihan <i>Psychology for Non-psychologist: Promoting Employee Well-being at Work</i>	27	Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI)
28	Pelatihan Filmora 12 & 13: Complete Video Editing Course For Everyone	1	Udemy
29	Pelatihan <i>Advance Power Bi</i>	1	Udemy
30	Pelatihan <i>From Zero to NVivo 13</i>	4	Udemy
31	Workshop <i>Coaching, Mentoring dan Counseling</i> bagi Pejabat BPPK	83	Coaching Indonesia
32	Sertifikasi Nasional Penerjemah	1	Himpunan Penerjemah Indonesia
33	Pelatihan <i>Motion Graphic Kelas Reguler Level II</i>	2	Hellomotion
34	<i>Neuro-Linguistic Programming (NLP) Practitioner Certificate</i>	1	Udemy



BAB 4:

ANALISIS KINERJA



4.1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN

Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara, BPPK telah melakukan pemenuhan kebutuhan pembelajaran strategis terkait keuangan negara yang merupakan kebutuhan spesifik masing-masing unit eselon I untuk peningkatan kinerja organisasi di Kemenkeu. Selain itu, BPPK juga telah melakukan Inisiasi Pembelajaran Keuangan Negara untuk KLID dan masyarakat umum melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Untuk membangun budaya belajar di lingkungan Kemenkeu, BPPK telah menginisiasi diterbitkannya berbagai ketentuan yang menjadi dasar implementasi *learning*

organization (organisasi pembelajar) di lingkungan Kemenkeu. Sedangkan untuk menunjang proses pembelajaran dan retensi aset intelektual, BPPK telah mengembangkan *Learning and Knowledge Management System* di Lingkungan Kemenkeu pada *platform* KLC 1 yang kemudian dimutakhirkan dengan KLC 2 dalam mendukung *platform* pembelajaran yang *agile* dan terkini.

Selain di bidang Pembelajaran, BPPK juga melakukan penguatan di bidang pendidikan vokasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui tranformasi kelembagaan PKN STAN dan penataan program dan kurikulum Pendidikan PKN STAN.



4.2. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KEUANGAN NEGARA

Peran strategis Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara perlu didukung dengan sumber daya manusia yang andal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak sumber daya manusia dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang dengan kebutuhan organisasi. Sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang terus digerakkan di Kemenkeu, implementasi *Corporate University*

menjadi salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian visi dan misi Kemenkeu.

Kemenkeu Corpu merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kemenkeu melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja

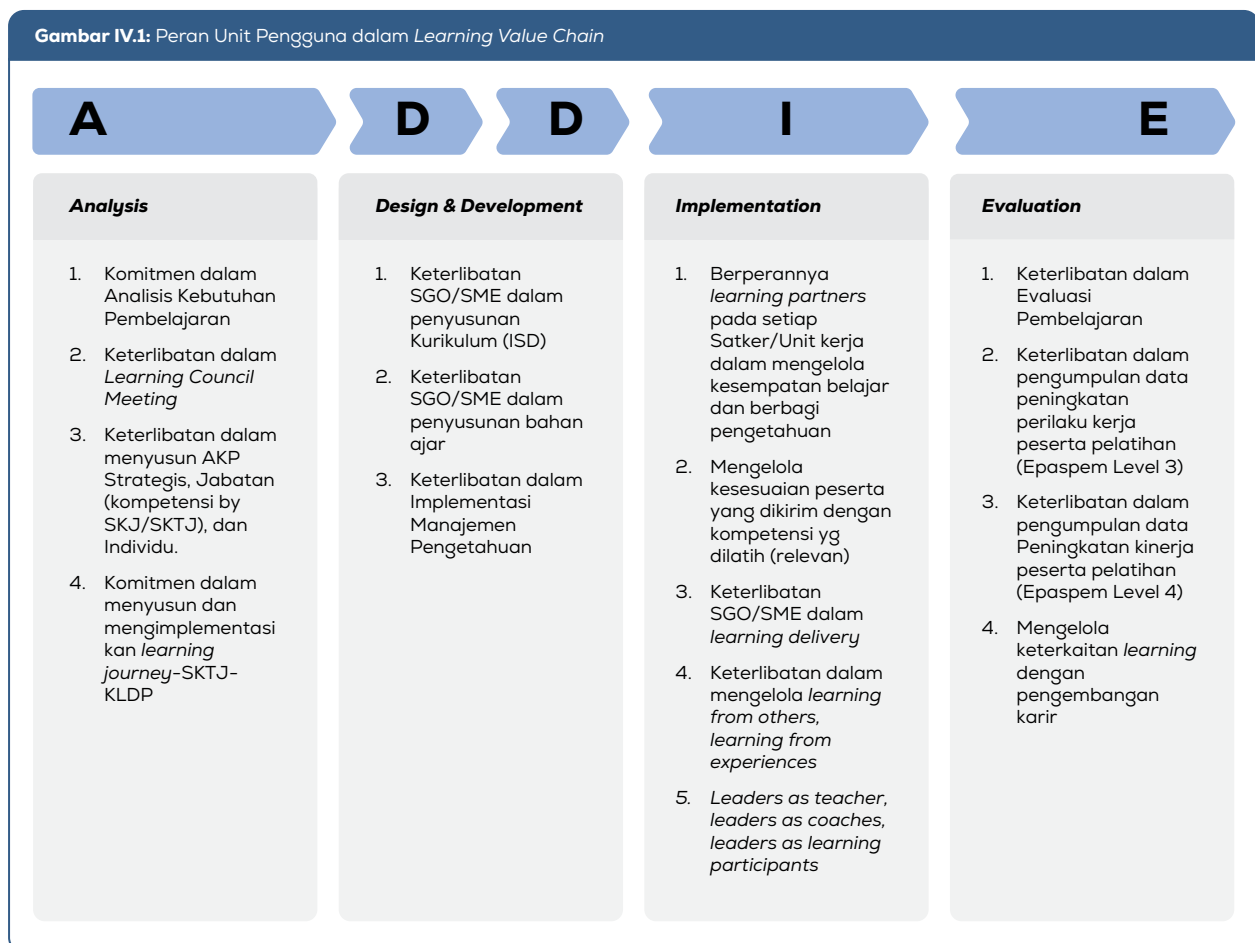
yang didukung dengan manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam kerangka Kemenkeu Corpu terdiri atas pendidikan dan/atau pembelajaran. Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal atau pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Sedangkan Pembelajaran dilakukan melalui jalur klasikal dan/atau non klasikal dengan mengutamakan pendekatan Model Pembelajaran Terintegrasi. Model Pembelajaran Terintegrasi merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengombinasikan model belajar mandiri (*self-learning*), pembelajaran terstruktur (*structured learning*), belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), dan/atau pembelajaran praktik di tempat Kerja (*learning*

from experience/learning while working) yang dikelola secara sistematis serta didukung dengan manajemen pengetahuan.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu, bukan hanya merupakan tanggung jawab BPPK sebagai Unit Pengelola pembelajaran namun seluruh Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna pembelajaran juga memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang pencapaian target kinerja organisasi. Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki peran dalam setiap tahapan *learning value chain* yang meliputi *analysis, design, development, implementation* dan *evaluation*.

Berikut ini ilustrasi peran Unit Eselon I dalam setiap tahapan *learning value chain*:

Gambar IV.1: Peran Unit Pengguna dalam *Learning Value Chain*



Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan kapasitas pegawai di Kemenkeu adalah besarnya jumlah pegawai yang membutuhkan pengembangan serta lokasi unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembelajaran klasikal dirasakan belum maksimal karena hanya menyentuh sebagian kecil pegawai. Dengan semangat transformasi pembelajaran, lahirlah *Modern E-Learning*.

Modern E-Learning adalah salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kemenkeu. *Modern E-Learning* merupakan alat utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan pengembangan kapasitas pegawai secara masif dengan bantuan TIK. Tujuannya adalah menghasilkan SDM Kemenkeu yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan,

aplikatif, berdampak nyata, dan mudah diakses. Pada pelaksanaannya, modern *e-learning* tidak hanya berupa pembelajaran via KLC, tapi bisa juga melalui *virtual meeting* dan *knowledge sharing* di seluruh unit.

Untuk memastikan bahwa *stakeholder* menerima layanan dalam kualitas yang terbaik, BPPK mengimplementasikan Manajemen Mutu Pembelajaran. Manajemen mutu pembelajaran di BPPK dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-94/PP/2021 tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan BPPK, Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-50/PP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan BPPK dan KEP 250 Tahun 2024 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pembelajaran yang mulai berlaku tanggal 11 Januari 2025 dan mencabut 2 KEP sebelumnya.

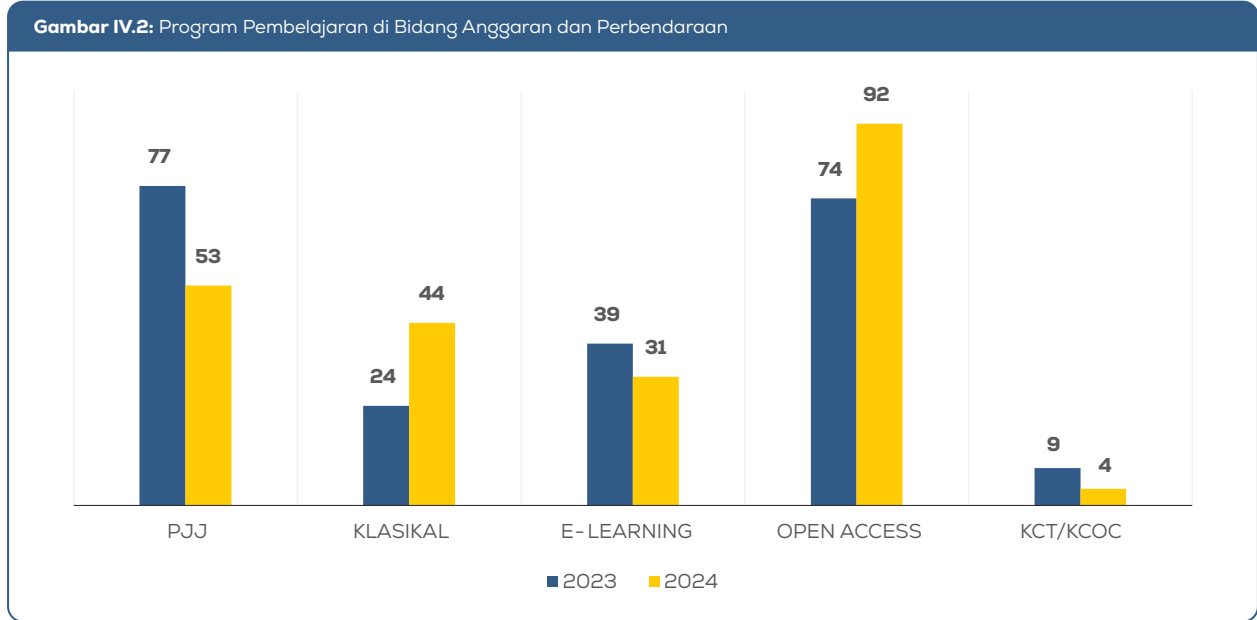
4.2.1 PEMBELAJARAN DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Sebagai penyelenggara pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, *stakeholder* utama Pusdiklat AP adalah para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Namun demikian, karena kompetensi terkait dengan anggaran negara merupakan kompetensi generik yang ada pada seluruh Instansi Pemerintah, Pusdiklat AP juga melayani *stakeholder* yang berasal dari Unit Eselon I lainnya di Kemenkeu, maupun Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (KLDI). Selain itu, terdapat kompetensi-kompetensi di Bidang Perbendaharaan Negara yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun tingkat Desa. Kompetensi dimaksud diantaranya adalah kompetensi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian, *stakeholder* Pusdiklat AP juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selama periode tahun 2024, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyelenggarakan 220 program pembelajaran yang diselenggarakan di Pusdiklat maupun di Balai Diklat, dimana 176 program merupakan pembelajaran digital yang terdiri dari pelatihan jarak jauh, *e-learning* dan *microlearning* baik yang bersifat undangan ataupun *open access*. Selain pembelajaran digital, sepanjang tahun 2024 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga menyelenggarakan 44 program pembelajaran klasikal. Jumlah program pembelajaran yang diselenggarakan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah program pembelajaran pada tahun 2023 yang berjumlah 236 program pembelajaran. Sepanjang tahun 2024 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga menyelenggarakan 4 edukasi publik di bidang keuangan negara dalam bentuk webinar melalui kegiatan Kemenkeu Corpu *Open Class* (AP Corner) dan Kemenkeu Corpu *Talk*. Selain itu terdapat 6 program *Open Class* Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan.

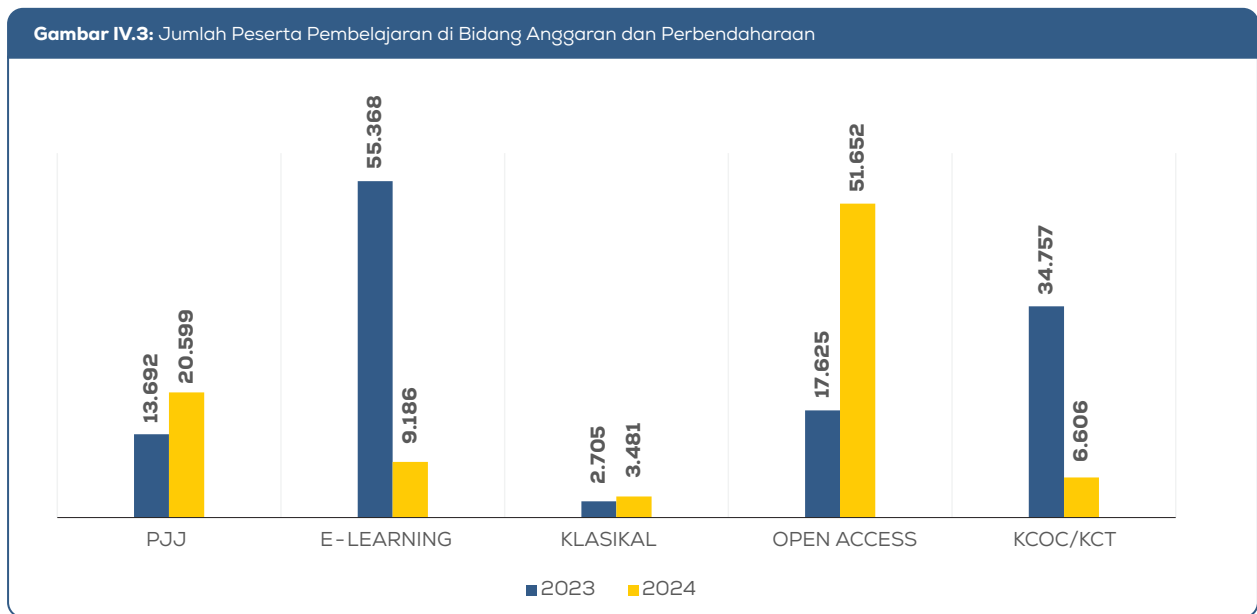
Open Class dan Kemenkeu Corpu Talk merupakan upaya BPPK dalam menghadirkan program edukasi di bidang keuangan negara yang mudah diakses dan inklusif.

Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan komposisi jumlah program pembelajaran Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan selama tahun 2023 dan 2024.



Seiring dengan penurunan jumlah program pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2024, jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Jumlah peserta pembelajaran pada tahun 2024 adalah sebanyak 91.524 orang, menurun apabila dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun 2023 yang berjumlah 124.147 orang. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan capaian peserta pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan selama tahun 2023 dan 2024.



Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara berkualitas, harmonisasi kebijakan fiskal nasional, strategi pendanaan publik, dan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah, yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan di lingkungan pemerintah daerah, pada tahun 2024 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan program unggulan berupa

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sebagai pelengkap program unggulan yang diusung pada tahun 2024 ini, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga menyelenggarakan dua program *e-learning* dengan pelaksanaan yang lebih *masive* sehingga bisa menjangkau lebih banyak peserta.

4.2.1.1 PROGRAM EXECUTIVE COURSE PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Program *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara klasikal dan menyasar pada eksekutif pengelola keuangan daerah, yaitu Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau pejabat setingkat eselon II penanggungjawab pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Metode pembelajaran berupa diskusi dua arah antara narasumber dengan peserta. Narasumber adalah pejabat setingkat Eselon I pada Kemenkeu (DJPB, DJPK, DJA, BKF, DJPPR), Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah), KPK, dan BPK. Moderator adalah pejabat

setingkat Eselon II di Kemenkeu atau Kementerian Dalam Negeri. Durasi pembelajaran 21 JP atau dua hari kerja. Adapun target peserta sebanyak 551 orang yang merupakan perwakilan dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia (didasarkan atas data Badan Pusat Statistik tahun 2022). Kegiatan telah diselenggarakan dalam 5 kelas/angkatan pada periode April - September 2024 dengan lokasi di Palembang, Jakarta, Surabaya. Sepanjang tahun 2024 terlaksana 5 angkatan Program *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut

Tabel IV.1: Rincian Pelaksanaan *Executive Course*

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu Penyelenggara	Rencana Peserta	Realisasi Peserta
1	<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan I	Palembang	22-23 April 2024	63	60
2	<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan II	Jakarta	28-29 Mei 2024	79	68
3	<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan III	Surabaya	30-31 Juni 2024	60	49
4	<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan IV	Jakarta	30-31 Juli 2024	65	65
5	<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan V	Jakarta	25-26 Sep 2024	76	57

Peserta yang terlibat dalam proses pembelajaran ini berjumlah 299 orang yang merupakan pimpinan tinggi daerah yaitu 133 Sekretaris Daerah, 166 Kepala BPKAD dan pejabat eselon II lainnya. Capaian tersebut merepresentasikan cakupan wilayah sebanyak 183 Kabupaten, 51 kota, dan

23 provinsi di seluruh Indonesia yaitu dari 100% peserta yang hadir pada batch 1 sampai batch 5, 44% dari Sumatera, 25 % dari Jawa, 11% dari Kalimantan, 11% dari Sulawesi, 5% dari Bali-NTT-NTB, dan 4% dari Maluku-Papua

4.2.1.2 E-LEARNING PROGRAM UNGGULAN

Selain dalam bentuk seminar, program unggulan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga dilengkapi dengan dua *e-learning* yaitu *E-Learning* Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan *E-Learning* Penguatan *Local Taxing Power*. *E-Learning* bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai sinergi kebijakan fiskal dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dengan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Program *e-learning* ini diselenggarakan secara *masive* dengan metode *asynchronous* mandiri (*open access*) bagi para pejabat/pegawai pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. *E-Learning* tersebut terselenggara sebanyak 8 (delapan) angkatan dengan realisasi peserta sebagai berikut:

1. *E-Learning* Harmonisasi Kebijakan Fiskal dengan realisasi peserta 1255 peserta; dan
2. *E-Learning* Penguatan *Local Taxing Power* di Daerah dengan realisasi peserta 303 peserta.

Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak/*outcome* yang positif pada implementasi Sinergi Kebijakan Fiskal di tingkat daerah dimana sebanyak 23 provinsi (60,53%) telah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan telah dinilai kesesuaiannya dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM PPKF) tahun 2025 oleh DJPK. *Executive Course* juga berhasil memberikan pemahaman sinergi pendanaan guna mendukung Pembangunan di Daerah, baik dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, salah satunya dengan skema Pinjaman Daerah dari PT SMI. Dampak positif tersebut tergambar dari catatan PT SMI dimana 16 Pemda berminat untuk beraudiensi, 8 diantaranya sudah dilakukan tindak lanjut dengan nilai pinjaman indikatif total Rp. 2,03 Triliun.

Tabel IV.2: Rincian Indikatif Pinjaman

No.	Nama Pemda	Proyek Indikatif Pinjaman	Nilai
1	Kab. Lampung Selatan	Penanganan Ruas Jalan dan Pembangunan Kantor DPRD	Rp 200 miliar
2	Kab. Manggarai Barat	Pasar	TBC
3	Kab. Pangandaran	Pembiayaan Portfolio	Rp 350 Miliar
4	Kab. Purworejo	RSUD	Rp 40 Miliar
5	Kab. Raja Ampat	Pembelian Kapal	TBC
6	Kota Kediri	Ring Road, Perumahan, Pasar, Kawasan Bisnis, Persampahan	Rp 1.014 miliar
7	Kota Manado	SPAM	Rp 80 miliar
8	Prov. Kalbar	2 RSUD	Rp 346 miliar
Total indikatif Pinjaman			Rp 2,03 Triliun

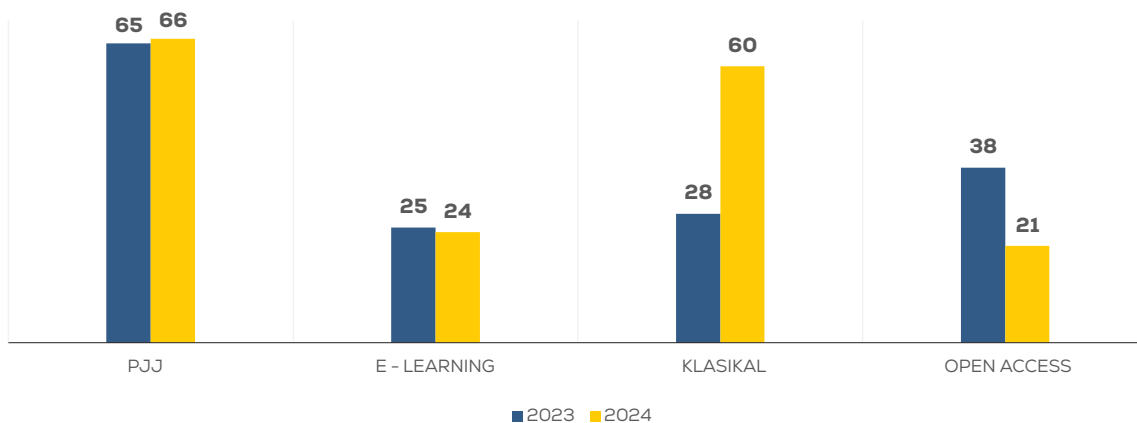
4.2.2 PEMBELAJARAN DI BIDANG PAJAK

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kemenkeu yaitu “mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif”, BPPK melalui Pusdiklat Pajak menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang khususnya diperuntukkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan aparatur negara lainnya yang berhubungan erat dengan perpajakan. Sebagai penyelenggara pembelajaran di Bidang Perpajakan, *stakeholder* utama Pusdiklat Pajak adalah para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, karena kompetensi perpajakan merupakan kompetensi yang juga dibutuhkan oleh

Unit Eselon 1 lain maupun instansi/Kementerian lain, maka *stakeholder* Pusdiklat Pajak juga dapat berasal dari Unit Eselon I lain dan/atau instansi dan Kementerian lainnya.

Jumlah program pembelajaran di bidang perpajakan baik yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak ataupun di Balai Diklat Keuangan pada tahun 2024 mencapai 171 program pembelajaran. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah program pembelajaran pada tahun 2023 yang berjumlah 156. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan komposisi jumlah program pembelajaran pada Pusdiklat Pajak selama tahun 2023 dan 2024.

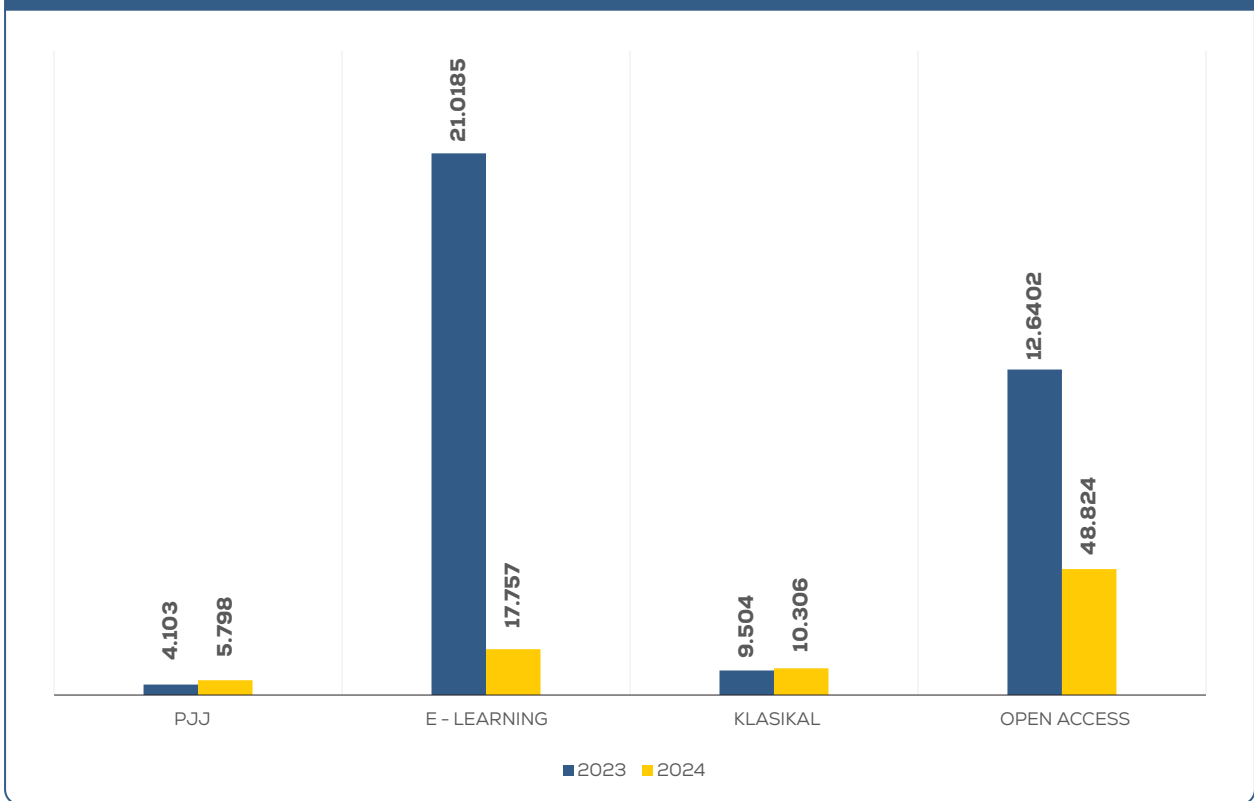
Gambar IV.4: Jumlah Program Pembelajaran di Bidang Perpajakan



Berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah program pembelajaran di bidang perpajakan, jumlah peserta pembelajaran pada program pembelajaran di bidang perpajakan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2023. Jumlah peserta pembelajaran di Pusdiklat Pajak pada tahun 2024 adalah sebanyak 82.685

orang, turun jika dibandingkan jumlah pada tahun 2023 yang mencapai 350.194 orang. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan capaian peserta pembelajaran di Bidang Perpajakan selama tahun 2023 dan 2024. Penurunan jumlah peserta terutama terdapat pada pembelajaran digital baik *e-learning* reguler ataupun *e-learning open access*.

Gambar IV.5: Jumlah Peserta Pembelajaran di Bidang Perpajakan



Dalam rangka membekali pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terdampak perluasan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, utamanya dengan *basic knowledge* pemeriksaan pajak dan pengetahuan teknis sesuai dengan rumpunnya, Pusdiklat Pajak mencanangkan program unggulan berupa Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Perpajakan – Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsioanl (JF) Pemeriksa Pajak.

4.2.2.1. Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsioanl (JF) Pemeriksa Pajak

Sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan PMK Nomor 131 / PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, terdapat perluasan unsur dan sub unsur kegiatan dari pelaksanaan tugas jabatan JF Pemeriksa Pajak yang dilaksanakan dengan sistem klaster. Perubahan pelaksanaan tugas jabatan dengan

perluasan unsur dan sub unsur tersebut tentunya membawa implikasi adanya gap kompetensi antara JF Pemeriksa eksisting dengan jabatan lain yang sebelumnya tidak berada dalam unsur dan sub unsur JF Pemeriksa (JF Pemeriksa terdampak perluasan). Untuk menutup gap kompetensi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui program pembelajaran yang disusun guna membekali JF Pemeriksa terdampak perluasan dengan pengetahuan terkait pemeriksaan pajak. Program pembelajaran ini juga menyiapkan sumber daya manusia DJP dalam rangka mendukung Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/ *Core Tax* yang pada awalnya akan mulai diimplementasikan tahun 2024.

Berikut adalah daftar rangkaian program pembelajaran Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsioanl (JF) Pemeriksa Pajak dan PSIAP yang diselenggarakan tahun 2024 baik di Pusdiklat Pajak ataupun di Balai Diklat Keuangan.

Tabel IV.3: Program Unggulan Pusdiklat Pajak Tahun 2024

No.	Nama Program Pembelajaran	Jumlah Angkatan	Jumlah Realisasi Peserta
1	<i>E-learning Pengantar e-Audit Perpajakan I</i>	1	5344
2	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Exchange of Information</i>	3	58
3	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Business Intelligence</i>	3	72
4	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Compliance Risk Management</i>	3	72
5	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Criminal Investigation</i>	3	90
6	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Data Quality Management</i>	3	113
7	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Document Management System</i>	3	92
8	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Ekstensifikasi</i>	3	73
9	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Exchange of Information</i>	1	36
10	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Keberatan dan Banding</i>	3	132
11	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Knowledge Management</i>	3	95
12	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Layanan Perpajakan</i>	3	155
13	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Non-Keberatan</i>	3	73
14	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Operational Intelligence</i>	3	90
15	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Pembayaran</i>	2	75
16	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Pemeriksaan</i>	3	96
17	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Penagihan</i>	2	151
18	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Pengawasan</i>	3	93
19	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Pengelolaan SPT</i>	2	63
20	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Penilaian</i>	2	51
21	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul Registrasi</i>	2	66
22	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul TAM-PR</i>	2	56
23	<i>Pelatihan Master Trainer Aplikasi Coretax Modul TAM-RAS</i>	2	53

No.	Nama Program Pembelajaran	Jumlah Angkatan	Jumlah Realisasi Peserta
24	Pelatihan <i>Master Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Modul <i>Third Party Data Processing</i>	3	95
25	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bagi <i>Account Representative</i>	6	551
26	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bagi Pegawai Investigasi Internal	3	80
27	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bagi Pegawai Kepatuhan Internal	3	69
28	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Bagi Penelaah Keberatan	6	170
29	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Keberatan dan Banding	3	68
30	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Manajemen Administrasi Umum	7	390
31	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Manajemen Data	14	787
32	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Pelayanan dan Penyuluhan	25	1365
33	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Penagihan	2	34
34	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Penegakan Hukum dan Intelijen Perpajakan	1	34
35	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan	35	2352
36	Pelatihan <i>Trainer</i> Aplikasi <i>Coretax</i> Fungsi Penilaian	1	34
37	<i>Training of Trainer E-Audit</i> Perpajakan	1	99
38	Workshop Kapita Selektia Aplikasi <i>Coretax</i> dan Aplikasi INTENS	11	452
39	Workshop Kapita Selektia dan Session Plan Aplikasi <i>Coretax</i> serta Aplikasi INTENS	11	178

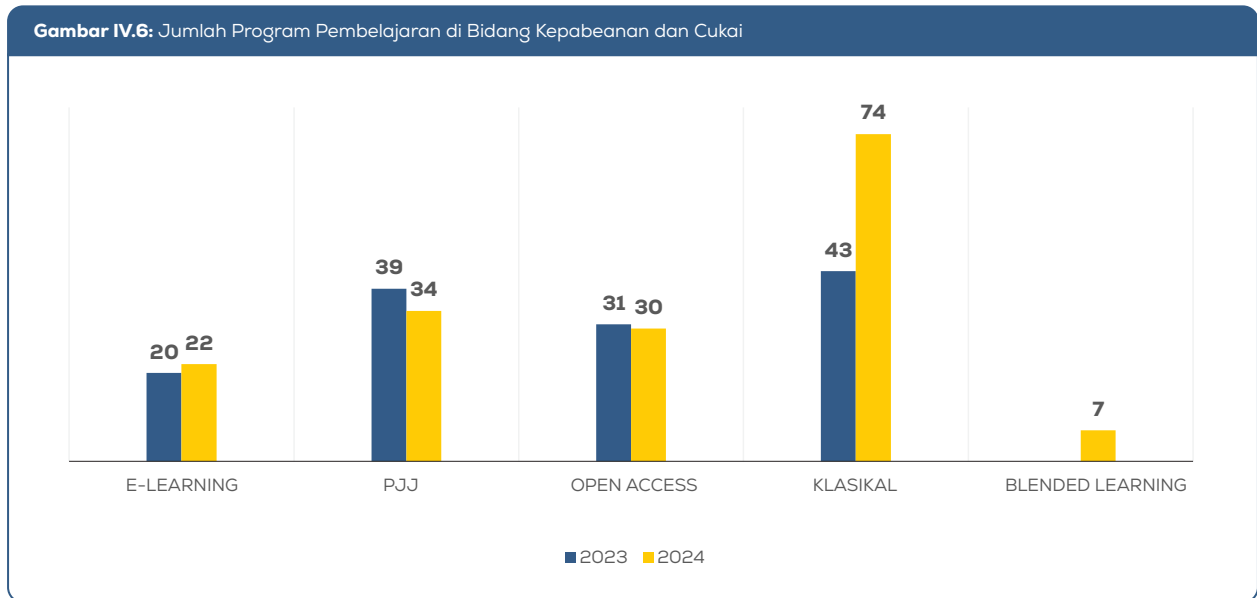
4.2.3 PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kemenkeu yaitu “mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif”, BPPK melalui Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang khususnya diperuntukkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparatur negara lainnya yang berhubungan erat dengan Kepabeanan dan Cukai. Kegiatan pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dengan berbagai metode

yang meliputi pembelajaran secara tatap muka (klasikal), Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *e-learning & microlearning* baik reguler ataupun *open access* serta pembelajaran dalam bentuk *Open Class*. Selain itu, sebagai *World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) for Asia Pacific Region*, Pusdiklat Bea dan Cukai bertugas memfasilitasi tindak lanjut program WCO di kawasan Asia Pasifik dengan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas kepabeanan dan pelatihan di berbagai bidang khusus.

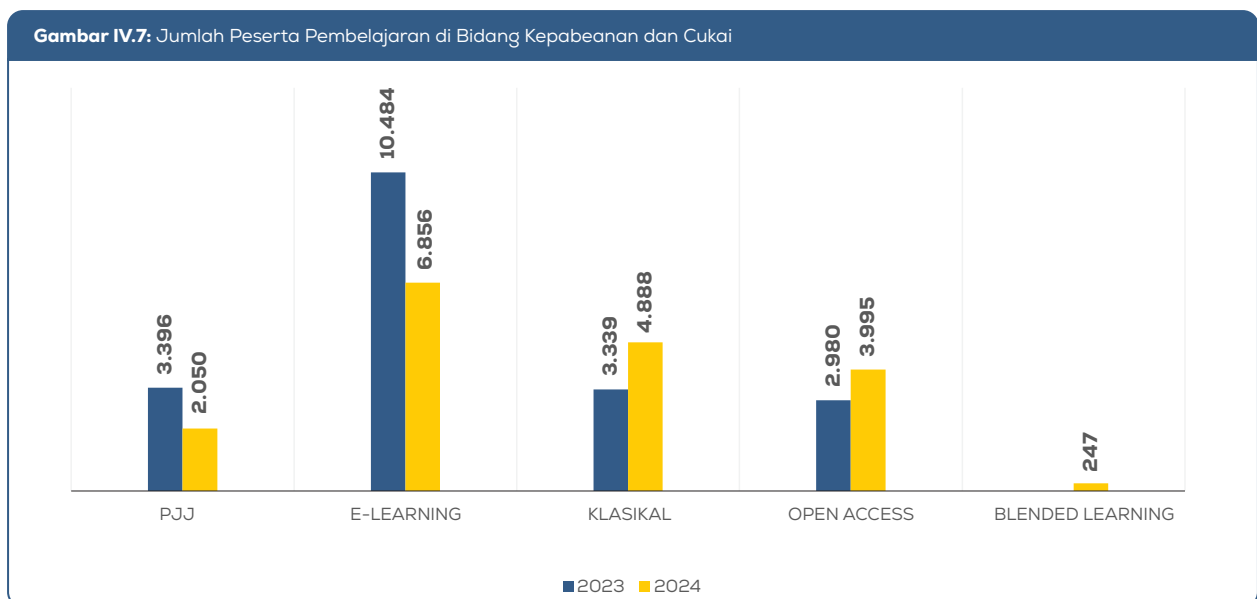
Pada tahun 2024 Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan sebanyak 167 program pembelajaran yang didominasi oleh pembelajaran digital. Jumlah tersebut meningkat 25,56% jika dibandingkan jumlah program pembelajaran yang

diselenggarakan pada tahun 2023 sebanyak 133 program pembelajaran. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan komposisi jumlah program pembelajaran pada Pusdiklat Bea dan Cukai selama tahun 2024.



Jumlah peserta pembelajaran pada program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai di tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah peserta pembelajaran di Pusdiklat Bea dan Cukai pada tahun 2024 adalah sebesar 18.036 dimana 17.551 merupakan peserta yang berasal

dari Kemenkeu dan 485 merupakan peserta Non Kemenkeu. Jumlah tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun 2023 sebanyak 20.199 orang. Berikut ini adalah perbandingan peserta pembelajaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2023 dan 2024.



Diantara berbagai program pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, Pusdiklat Bea dan Cukai juga memiliki

program unggulan berupa Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan

4.2.3.1 PELATIHAN TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK (DE-ESKALASI)

Program Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk petugas bea dan cukai dan/atau pegawai Kemenkeu lainnya yang memiliki kemampuan teknis pencegahan dan penanganan konflik (de-eskalasi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan secara efektif.

Selain diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai, Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) juga diselenggarakan di BDK Denpasar, BDK Yogyakarta dan BDK Pekanbaru. Berikut ini adalah rincian penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) sepanjang tahun 2024.

Tabel IV.4: Rincian Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi)

No.	Nama Program Unggulan	Lokasi	Waktu Penyelenggaraan	Peserta	
				Rencana	Realisasi
1	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan I	Pusdiklat Bea dan Cukai	13-16 Mei 2024	30	30
2	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan II	BDK Denpasar	28-31 Mei 2024	30	30
3	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan III	BDK Yogyakarta	10-13 Juni 2024	30	30
4	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan IV	BDK Pekanbaru	24-27 Juni 2024	30	30
5	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan V	BDK Yogyakarta	1-4 Juli 2024	30	30
6	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Untuk Pejabat Administrator	Pusdiklat Bea dan Cukai	26-27 Agustus 2024	30	30
7	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Untuk Pejabat Pengawas Angkatan I	Pusdiklat Bea dan Cukai	22-25 Juli 2024	30	30
8	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Untuk Pejabat Pengawas Angkatan II	Pusdiklat Bea dan Cukai	2-5 September 2024	30	30
9	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan VI	BDK Pekanbaru	23-26 September 2024	30	30
10	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Angkatan VI	Pusdiklat Bea dan Cukai	21-24 September 2024	30	30

4.2.3.2 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN SARANA PENGANGKUT (SARKUT) PERBATASAN DARAT

Pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu melaksanakan tugas pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai terhadap Sarana Pengangkut yang melalui Perbatasan Darat. Pelatihan ini ditujukan terutama untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas

di wilayah perbatasan darat.

Sepanjang tahun 2024, terselenggara dua angkatan Pelatihan Teknis Pengawasan Sarana Pengangkut (Sarkut) Perbatasan Darat di Pusdiklat Bea dan Cukai. Berikut ini adalah rincian realisasi Pelatihan Teknis tersebut.

Tabel IV.5: Rincian Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengawasan Sarana Pengangkut (Sarkut) Perbatasan Darat

No.	Nama Program Unggulan	Lokasi	Waktu Penyelenggaraan	Peserta	
				Rencana	Realisasi
1	Pelatihan Teknis Pengawasan Sarana Pengangkut (Sarkut) Perbatasan Darat Angkatan I	Pusdiklat Bea dan Cukai	30 September–9 Oktober 2024	30	30
2	Pelatihan Teknis Pengawasan Sarana Pengangkut (Sarkut) Perbatasan Darat Angkatan II	Pusdiklat Bea dan Cukai	14–23 Oktober 2024	30	30

4.2.3.3 PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO) REGIONAL TRAINING CENTER (RTC) ASIA/PACIFIC

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai WCO RTC Asia/Pacific, Pusdiklat Bea dan Cukai berperan dalam mengembangkan kompetensi *customs administrator* khususnya di kawasan Asia Pasifik. Sepanjang tahun 2024 telah diselenggarakan 4 kegiatan pelatihan internasional dan 1 kegiatan konferensi internasional dengan rincian sebagai berikut.

a. **Workshop on The Pre-Accreditation of Customs Modernization Advisors Specialized in Guman Resources Management and Development (HRMD)**

Kegiatan ini diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai, pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 11 peserta yang merupakan pegawai Administrasi Kepabeanan dari Indonesia, China, Japan, Nepal, PNG, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Sumber pendanaan kegiatan ini menggunakan mekanisme dari *sharing cost* WCO (CCF-Japan) dan BPPK (Pusdiklat Bea dan Cukai).

b. Pelatihan **Technical Assistance (TA) on Post Clearance Audit (PCA): Strategic Planning and Risk Management For Royal Malaysian Customs Departement Officer**

Kegiatan ini diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai, pada tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 3 Peserta dari *Royal Malaysian Customs Department (RMCD)*. Adapun sumber pendanaan menggunakan mekanisme *sharing cost* antara RMCD (peserta) dan Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK (Penyelenggaraan)

c. **World Customs Organization (WCO) Synthetic Drug Detection Project (SDDP) Mail Channel Regional Workshop**

Kegiatan diselenggarakan di KPPBC TMP Ngurah Rai, pada tanggal 2 s.d. 6 September 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 21 Peserta dan 9 *observer* yang merupakan pegawai Administrasi Kepabeanan dan Otoritas Pos dari India, Tonga Fiji, Mongolia, Solomon Islands, Vietnam, Indonesia, Maldives

dan Thailand. Adapun sumber pendanaan menggunakan mekanisme *sharing cost Bureau of Internasional Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) of The U.S Department of State*, Pusdiklat Bea dan Cukai, dan Direktorat KSIKC DJBC.

d. **World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies**

Kegiatan diselenggarakan di Wyndham Casablanca Hotel Jakarta pada tanggal 23 s.d. 27 September 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 33 peserta dari 24 Administrasi Kepabeanan yaitu Bangladesh, Cambodia, China, India, Iran, Indonesia, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Palau, PNG, Filipina, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Timor

Leste, Tonga, Vietnam, Brunei Darussalam, Hongkong, Jepang dan New Zealand. Adapun sumber pendanaan menggunakan mekanisme *sharing cost* antara WCO (CCF-China) dan BPPK (Pusdiklat Bea dan Cukai).

e. **4th WCO RTC Indonesia International Conference 2024: Building a Seamless Future Through Disruptive Technologies in Customs and Multi-Stakeholder Collaboration**

Dilaksanakan di Aula Mezzanine Kantor Pusat Kemenkeu dan *Zoom Meeting (Hybrid)*, 8 s.d. 9 Oktober 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 246 peserta terdaftar dari Indonesia, Australia, Fiji, Malaysia, Papua New Guinea, Nigeria, Vietnam, Jepang, Belanda, Timor Leste dan Maldives. Adapun sumber pendanaan berasal dari BPPK (Pusdiklat Bea dan Cukai).

4.2.4 PEMBELAJARAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung dua misi Kemenkeu, yaitu “memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif” dan “mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum”, BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara diarahkan untuk membangun bidang kompetensi sebagai berikut.

- a. Kompetensi Barang Milik Negara;
- b. Kompetensi Hukum;
- c. Kompetensi Lelang;
- d. Kompetensi Penilaian;
- e. Kompetensi Piutang;
- f. Kompetensi Kekayaan Negara Dipisahkan;
- g. Kompetensi Kekayaan Negara Lain-lain; serta
- h. Kompetensi Umum Kekayaan Negara.

Sedangkan pembelajaran di Bidang Perimbangan Keuangan diarahkan untuk membangun bidang kompetensi sebagai berikut.

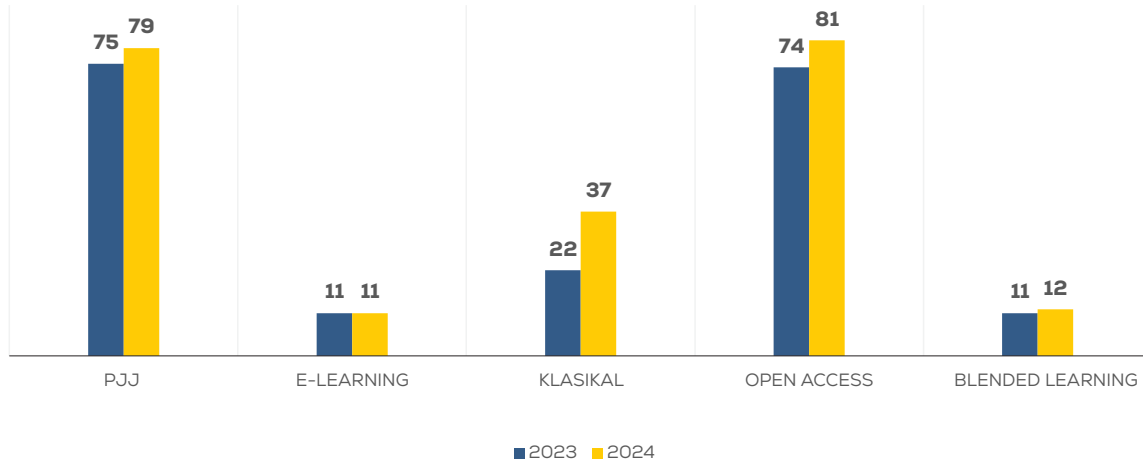
- a. Kompetensi Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. Kompetensi Keuangan Daerah;
- c. Kompetensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Kompetensi Pembiayaan Daerah;
- e. Kompetensi Transfer ke Daerah; serta
- f. Kompetensi Umum Perimbangan Keuangan;

Sebagai penyelenggara pembelajaran di Bidang Kekayaan dan Perimbangan Keuangan, *stakeholder* utama Pusdiklat KNPK adalah para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun demikian, karena kompetensi Barang Milik Negara merupakan kompetensi generik yang ada pada seluruh Instansi Pemerintah, Pusdiklat KNPK dapat pula melayani *stakeholder* yang berasal dari UEI lainnya di Kemenkeu, maupun Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (KLDI). Selain itu, terdapat kompetensi-kompetensi di Bidang Perimbangan Keuangan yang dibutuhkan pula oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun tingkat Desa. Kompetensi dimaksud diantaranya adalah kompetensi Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, *stakeholder* Pusdiklat KNPK juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun tingkat Desa. Selama periode tahun 2024, Pusdiklat KNPK telah menyelenggarakan 220 program pembelajaran dalam bentuk PJJ, *e-learning*, *blended learning*, *e-learning open*

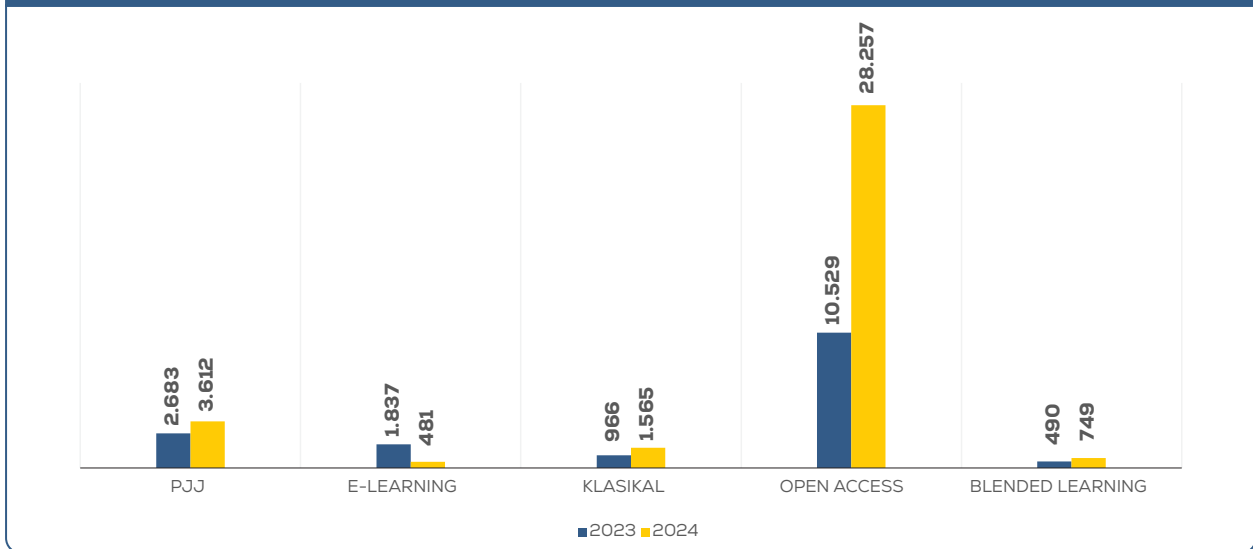
access ataupun klasikal. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK pada tahun 2023 yaitu sejumlah 193 program pembelajaran. Program pembelajaran yang dilaksanakan di Pusdiklat KNPK masih didominasi oleh pembelajaran digital. Pusdiklat KNPK juga menyelenggarakan program pembelajaran dengan metode lainnya seperti KCT dan KCOC sebagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang variatif, relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak tinggi. Berikut ini adalah gambaran komposisi jumlah program pembelajaran Pusdiklat KNPK selama tahun 2023 dan 2024

Gambar IV.8: Jumlah Program Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Sejalan dengan kenaikan jumlah program pembelajaran di Pusdiklat KNPK pada tahun 2024, jumlah peserta pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan juga mengalami kenaikan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah peserta pembelajaran di tahun 2024 adalah sebanyak 34.664 orang, meningkat jauh jika dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun 2023 sebanyak 16.505 orang.

Peningkatan terbesar terdapat pada pembelajaran *open access* dimana jumlah peserta pembelajaran *open access* pada tahun 2024 mencapai 28.257, naik lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah peserta pembelajaran *open access* tahun 2023 yang mencapai 10.529 orang. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan capaian peserta pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan selama tahun 2023 dan 2024.

Gambar IV.9: Jumlah Peserta Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pada tahun 2024, Pusdiklat KNPK mengukung Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN sebagai program unggulan. Program unggulan ini ditujukan agar para Kuasa Pengguna Barang (KPB) mampu melakukan optimalisasi BMN serta pemanfaatan BMN dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Substansi

pembelajaran menekankan pada praktik, analisis, studi kasus dan pembuatan rekomendasi sehingga para peserta di akhir kegiatan pembelajaran dapat menyusun rekomendasi optimalisasi pemanfaatan BMN di satuan kerja masing-masing. Penyelenggaraan program pembelajaran akan dilakukan baik di Pusdiklat maupun di Balai Diklat.

4.2.4.1 PELATIHAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pelatihan ini ditujukan terutama untuk ASN yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang/pengelola barang. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif akan mendorong produktivitas Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Produktivitas akan memberikan kontribusi dan manfaat misalnya pada pemasukan berupa penerimaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi dan *stakeholders*. Pelatihan ini mendukung terwujudnya optimalisasi Barang Milik Daerah yang akan memanfaatkan potensi fisik, lokasi, nilai jumlah/volume, legal dan ekonomis dari aset tersebut. Pelatihan ini diselenggarakan dengan model *blended learning* yang memadukan sesi tatap muka di kelas (klasikal) dengan sesi non tatap muka/tatap muka virtual (pelatihan jarak jauh). Pelatihan terdiri 10 mata pelajaran dengan total 78 jam pelatihan.

Selain diselenggarakan di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan KNPK (KNPK), pelatihan ini juga diselenggarakan di BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Pontianak dan BDK Makassar. Berikut ini adalah rincian dari penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah sepanjang tahun 2024.

Tabel IV.6: Rincian Pelaksanaan Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (*Blended Learning*)

No.	Nama Program Unggulan	Lokasi	Waktu Penyelenggaraan	Peserta
1	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak I	BDK Medan	PJJ= 29 Jul s.d. 07 Agu 2024 Klasikal = 19 s.d. 21 Agu 2024 AL/PKL= 08 s.d. 16 Agu 2024	32
2	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak II	BDK Palembang	PJJ= 26 Agu s.d. 04 Sep 2024 Klasikal = 17 s.d. 19 Sep 2024 AL/PKL= 05 s.d. 13 Sep 2024	32
3	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (<i>Blended Learning</i>) Ak I	BDK Pontianak	PJJ= 23 Sep s.d. 01 Okt 2024 Klasikal = 14 s.d. 16 Okt 2024 AL/PKL= 02 s.d. 11 Okt 2024	31
4	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak III	BDK Pekanbaru	PJJ= 30 Sep s.d. 09 Okt 2024 Klasikal= 21 s.d. 23 Okt 2024 AL/PKL= 10 s.d. 18 Okt 2024	32
5	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (<i>Blended Learning</i>) Ak II	BDK Malang	PJJ= 30 Sep s.d. 08 Okt 2024 Klasikal= 21 s.d. 23 Okt 2024 AL/PKL= 09 s.d. 18 Okt 2024	32
6	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak IV	BDK Makassar	PJJ= 07 s.d. 16 Okt 2024 Klasikal= 28 s.d. 30 Okt 2024 AL/PKL= 17 s.d. 25 Okt 2024	31
7	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak V	Pusdiklat KNPK	PJJ= 14 s.d. 23 Okt 2024 Klasikal= 04 s.d. 06 Nov 2024 AL/PKL= 24 Okt 2024 s.d. 01 Nov 2024	35
8	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Ak VI	BDK Pontianak	PJJ= 21 s.d. 30 Okt 2024 Klasikal= 11 s.d. 13 Nov 2024 AL/PKL= 31 Okt 2024 s.d. 08 Nov 2024	31
9	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (<i>Blended Learning</i>) Ak III	BDK Yogyakarta	PJJ= 21 s.d. 29 Okt 2024 Klasikal= 11 s.d. 13 Nov 2024 AL/PKL= 30 Okt 2024 s.d. 08 Nov 2024	32
10	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (<i>Blended Learning</i>) Ak IV	BDK Cimahi	PJJ= 04 s.d. 12 Nov 2024 Klasikal= 02 s.d. 04 Des 2024 AL/PKL= 13 s.d. 22 Nov 2024	32

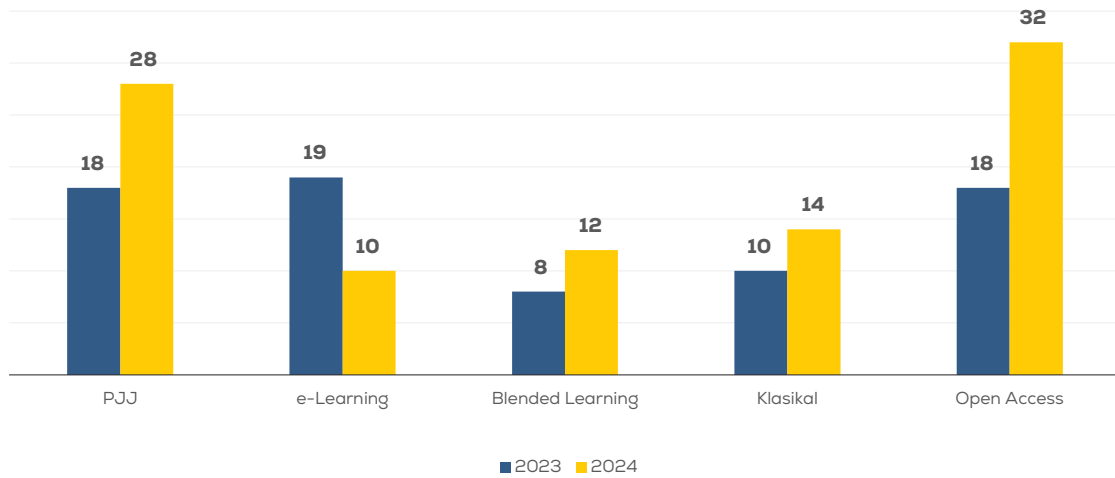
4.2.5 PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL

Dalam rangka mendukung salah satu misi Kemenkeu yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020 - 2024 yaitu “mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM) menyelenggarakan berbagai program pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajerial bagi para pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu. Dengan berbagai program pembelajaran tersebut, diharapkan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu semakin memiliki kompetensi manajerial dan sosiokultural

yang tinggi. Selama tahun 2024 Pusdiklat KM merealisasikan 96 program pembelajaran yang didominasi oleh program pembelajaran dalam bentuk *open access*. Realisasi program pembelajaran di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana terdapat 75 program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.

Berikut ini, dapat dilihat perbandingan komposisi jumlah program pembelajaran pada Pusdiklat KM selama tahun 2023 dan 2024.

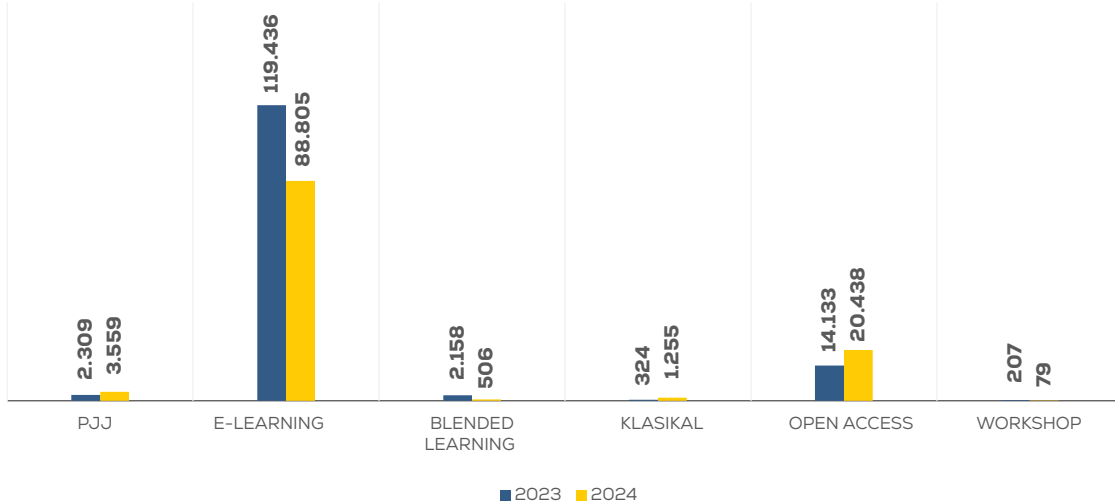
Gambar IV.10: Jumlah Program di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial



Meskipun jumlah program pembelajaran di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun jumlah peserta pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah peserta pembelajaran di Bidang

Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2024 adalah sebanyak 114.642 orang, menurun 15,1% dibandingkan jumlah peserta pembelajaran pada tahun 2023 yang berjumlah 138.567 orang. Berikut ini adalah perbandingan komposisi Jumlah realisasi peserta pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial selama tahun 2023 dan 2024.

Gambar IV.11: Jumlah Peserta Pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial



Program unggulan yang diusung oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tahun 2024 adalah program *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh Pegawai pada jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Kemenkeu khususnya untuk pegawai yang akan atau baru saja menjalani proses delayering. Pembelajaran Digital terkait ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya *agile and adaptive mindset* dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pada era baru (FWS/ *Collaboration Way of Working (CWOW)*). Adapun *output* yang ingin dicapai dari program unggulan

ini adalah terwujudnya SDM Kemenkeu yang mampu beradaptasi dan mengelola perubahan sehingga dapat berperan dan terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal untuk melakukan transformasi yang efektif.

Rangkaian program unggulan di Pusdiklat KM ini diawali dengan pelaksanaan Seminar Digital Kemenkeu *Corporate University Talk (KCT)* dengan judul "*Adaptive and Agile: An Exit Strategy For Change*" pada tanggal 28 Mei 2024 di Aula Mezzanine Kemenkeu. Kegiatan yang diikuti oleh 1.176 peserta baik luring ataupun daring ini sekaligus menandai peluncuran *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*.

4.2.5.1 PROGRAM E-LEARNING MANAGING CHANGE: BEING ADAPTIVE AND AGILE

Program ini diperuntukkan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan pegawai Kemenkeu dalam mengelola perubahan akibat adanya perubahan kebijakan organisasi maupun perubahan yang terjadi secara global.

E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile merupakan *Massive Open Online Course (MOOC)* yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada peserta secara luas tanpa batasan geografis dan tanpa biaya apapun sehingga memungkinkan semua pegawai Kemenkeu yang memiliki akses internet untuk mengikuti pembelajaran tersebut. *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile* bersifat *mandatory* bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu.

E-Learning ini terdiri dari empat mata pelajaran pokok, yaitu 1) Ekosistem Kerja Baru (EKB)

Kemenkeu; 2) Penerapan *Change Management*; 3) Pengelolaan Perubahan dengan *Growth Mindset*; dan 4) *Adaptive* dan *Agile* dalam Sistem Kerja Dinamis.

Sesuai dengan kalender pembelajaran Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial tahun 2024, *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile* diselenggarakan sebanyak tiga angkatan. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*.

1. Angkatan I dilaksanakan pada 28 Mei s.d. 26 Juni 2024;
2. Angkatan II dilaksanakan pada 9 Juli s.d. 7 Agustus 2024; dan
3. Angkatan III dilaksanakan pada 21 Agustus s.d. 20 September 2024.

Adapun realisasi peserta untuk tiap angkatan adalah sebagai berikut.

Tabel IV.7: Sebaran Peserta *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*

No.	Unit Eselon I	Angkatan I	Angkatan II	Angkatan III	Total Peserta
1	Setjen	833	825	837	2.495
2	Itjen	220	261	171	652
3	DJA	322	230	220	772
4	DJP	13.820	17.449	10.694	41.963
5	DJBC	1.999	4.072	4.398	10.469
6	DJPB	1.961	1.717	1.968	5.646
7	DJPK	166	2.611	19	2.796
8	DJKN	1.110	175	168	1.453
9	DJPPR	178	311	4	493
10	BKF	169	101	143	413
11	BPPK	483	736	4	1.223
12	LNSW	49	27	50	126

Pada bagian akhir dari *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*, peserta akan memberikan evaluasi penyelenggaraan di platform KLC dalam bentuk reviu terhadap penyelenggaraan pembelajaran. Dari hasil reviu yang diberikan oleh para peserta, *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*

mendapatkan rating sebesar 4,98 (dari skala 5). Selain itu terdapat juga 20.654 ulasan positif dari peserta yang telah mengikuti *e-learning* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peserta *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile* merasa puas terhadap program *E-Learning Managing Change: Being Adaptive and Agile*.

4.2.6 PEMBELAJARAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA LAINNYA

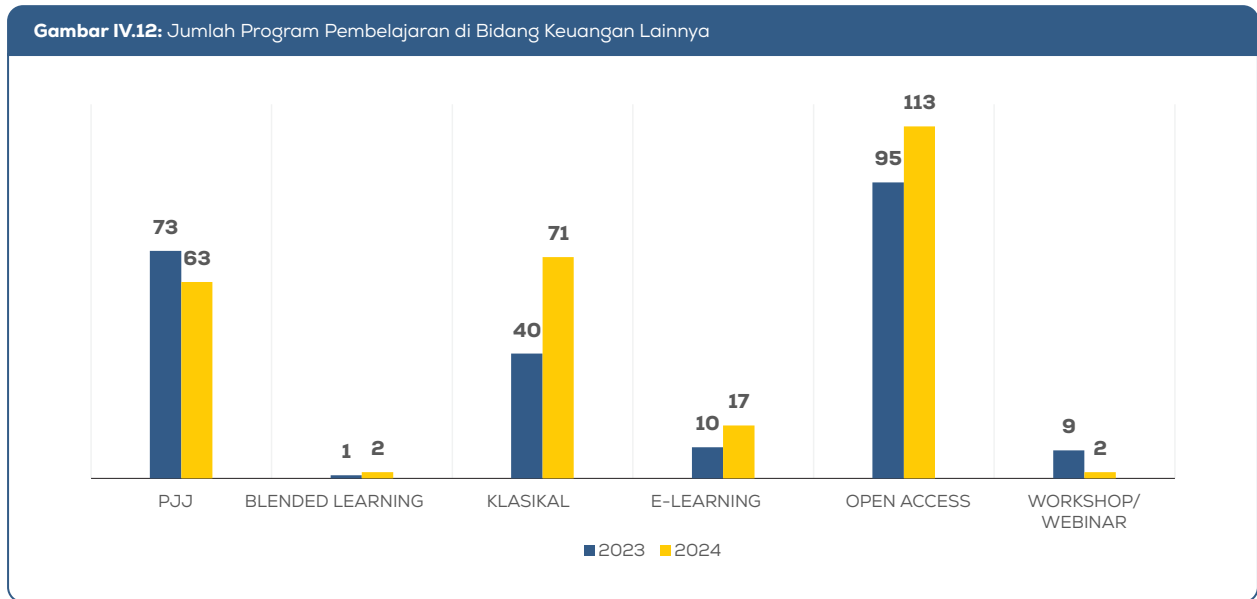
Selain program pembelajaran di bidang anggaran, perbendaharaan, pajak, bea dan cukai, kekayaan negara, perimbangan keuangan, kepemimpinan, dan manajerial, BPPK melalui Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU) menyelenggarakan berbagai program pembelajaran dalam rangka mendukung salah satu misi Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024, yaitu “mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”.

Pusdiklat KU memiliki beberapa mitra utama yang harus dilayani yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BPPK, Sekretariat Jenderal (Setjen), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sehingga Pusdiklat KU mempunyai program yang

sangat beragam. Terdapat 9 (sembilan) rumpun pembelajaran yang dikelola oleh Pusdiklat KU, yaitu akuntansi, bahasa, hukum, kebijakan fiskal dan ekonomi makro, manajemen SDM, pengawasan keuangan, penulisan ilmiah, sistem informasi, dan manajemen organisasi.

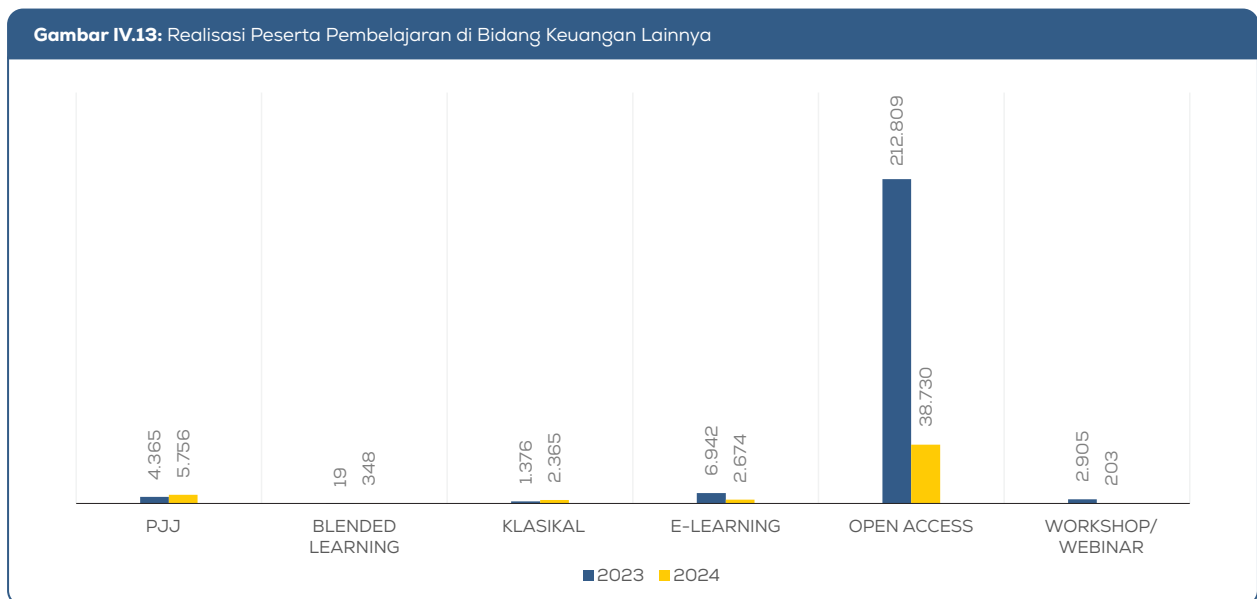
Selama periode tahun 2024, Pusdiklat Keuangan Umum telah menyelenggarakan 268 program pembelajaran. Sama seperti tahun sebelumnya, program pembelajaran di Pusdiklat Keuangan Umum masih didominasi oleh pembelajaran digital sebanyak 197 program sedangkan pembelajaran klasikal sebanyak 71 program. Jumlah program pembelajaran yang diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah program pembelajaran pada tahun 2023.

Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan komposisi jumlah program pembelajaran Pusdiklat KU selama tahun 2023 dan 2024.



Dari segi jumlah peserta pembelajaran, pada tahun 2024 Pusdiklat Keuangan Umum mengalami penurunan jumlah peserta yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah peserta pada tahun 2024 adalah sebanyak 50.076 orang, menurun jauh jika dibandingkan realisasi peserta pembelajaran pada tahun 2023 yang sebanyak 228.416 orang. Realisasi peserta

pembelajaran dengan metode *open access* mengalami penurunan yang paling signifikan, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat program pembelajaran *open access* yang bersifat *mandatory* di Pusdiklat Keuangan Umum. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan realisasi peserta pembelajaran di bidang keuangan lainnya selama tahun 2023 dan 2024.



Pusdiklat Keuangan Umum mengusung pembelajaran pembiayaan hijau sebagai program unggulan di tahun 2024. Pembelajaran pembiayaan hijau merupakan rangkaian kegiatan dari *grand design* dukungan Pusdiklat Keuangan Umum dalam mengawal *green financing* terkait keperluan perubahan iklim di Indonesia melalui “*Green and Sustainable Finance: Human Capital Development and Literacy Series*”. *Green and Sustainable Finance: Human Capital Development and Literacy Series* merupakan dukungan kegiatan penyiapan sumber daya manusia dan edukasi

yang dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun (2023 s.d. 2025) untuk mendukung akselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah nyata penanggulangan isu perubahan iklim.

Program unggulan di Pusdiklat Keuangan Umum direalisasikan melalui dua metode yaitu 1) *E-Learning* Kebijakan dan Instrumen Pembiayaan Hijau (*Green Financing*); dan 2) Seminar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG.

4.2.6.1 E-LEARNING KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN HIJAU (GREEN FINANCING)

E-Learning Kebijakan dan Instrumen Pembiayaan Hijau (*Green Financing*) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan *green economy* dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Materi program pembelajaran ini mencakup urgensi penanganan risiko perubahan iklim, pembangunan rendah karbon dan *green economy*, kebijakan pembiayaan hijau (*green financing*), serta transisi ekonomi hijau (*green transition*).

Materi program pembelajaran dikemas menjadi 4 (empat) *microlearning* yang disusun secara sekuen dan dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta yang terdiri dari:

1. *Microlearning* Urgensi Penanganan Risiko Perubahan Iklim;
2. *Microlearning* Pembangunan Rendah Karbon dan *Green Economy*;
3. *Microlearning* Kebijakan Pembiayaan Hijau (*Green Financing*); dan
4. *Microlearning* Transisi Ekonomi Hijau (*Green Transition*).

Sasaran peserta program pembelajaran ini adalah pegawai di Kemenkeu, pegawai di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, dan masyarakat umum yang memiliki minat terkait *green economy/green financing*.

4.2.6.2 SEMINAR MOBILISASI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS ESG

Seminar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, mendorong implementasi praktik terbaik, mengidentifikasi tantangan serta peluang investasi berkelanjutan, dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Program Unggulan Pusdiklat Keuangan Umum dalam rangka mendukung implementasi ekonomi hijau untuk keperluan

perubahan iklim di Indonesia, dengan tema besar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2024 di Aula Pusdiklat Keuangan Umum ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *United Nations Development Programme* (UNDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan PT. Harapan Interaksi Swadaya (*Greenhope*).

Seminar Mobilisasi Pembiayaan untuk Pembangunan Berbasis ESG diikuti oleh 440 peserta dimana 75 peserta mengikuti kegiatan

secara luring dan 365 peserta lainnya mengikuti secara daring.

4.3. PENGELOLAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

BPPK memiliki tugas dan fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi yang tertuang dalam Perpres 57 Tahun 2020 dan PMK 118/

PMK.01/2021. Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPK, yaitu:

4.3.1 SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN OLEH PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Sertifikasi Ahli Kepabeanan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pada tahun 2024 Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan tiga kali Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Periode I ujian dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 dan diselenggarakan di 12 kota di seluruh Indonesia (Jakarta, Balikpapan, Batam, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Pontianak). Jumlah peserta hadir ujian sebanyak 588 orang, atau 92,89% dari total peserta terdaftar sebanyak 633 orang. Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Februari Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor 110 Tahun 2024 tanggal 3 April 2024 dengan hasil sebanyak 147 peserta dinyatakan lulus atau 25,00% dari total peserta yang mengikuti ujian.

Pada periode II (Periode Juni) penyelenggaraan ujian dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di 12 kota di seluruh Indonesia (Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan Balikpapan). Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan periode Juni

2024 adalah sebanyak 706 orang atau 97,51% dari total peserta terdaftar sebanyak 724 orang. Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Juni Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor 180 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Juni Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebanyak 204 peserta dinyatakan lulus atau 28,90% dari total peserta yang mengikuti ujian.

Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode III (Periode Oktober) diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 dan diselenggarakan di 12 kota di seluruh Indonesia (Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan Balikpapan) dengan kehadiran peserta ujian sebanyak 796 orang atau 95,67% dari total peserta terdaftar sebanyak 832 peserta. Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Oktober Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor 253 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebanyak 237 orang dinyatakan lulus atau 29,77% dari total peserta yang mengikuti ujian.

4.3.2 SERTIFIKASI KOMPETENSI KEUANGAN NEGARA DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN OLEH PUSDIKLAT KNPK

Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan oleh Pusdiklat KNPK yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-2/PP/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan di Lingkungan BPPK. Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, Pusdiklat KNPK telah menyelenggarakan 22 kegiatan uji kompetensi yang diikuti oleh 502 peserta. Kegiatan sertifikasi/ uji kompetensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.8: Pelaksanaan Uji Kompetensi Keuangan Negara di Pusdiklat KNPK Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan	Lokasi Penyelenggaraan	Total Peserta
1	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan Jabatan Lainnya ke Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama	01-Feb-24	Online (kantor masing-masing peserta)	23
2	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka kenaikan jenjang keahlian JF AKPD Ahli Muda	20-Feb-24	BDK Pekanbaru	2
3	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka kenaikan jenjang keahlian JF AKPD Ahli Madya	20-Feb-24	BDK Cimahi	1
4	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan Jabatan Lainnya ke Jabatan Fungsional Penilai Ahli Pertama (Kementerian ESDM)	27-Feb-24	PKN Stan	6
5	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka perpindahan jabatan lainnya ke jabatan fungsional penata laksana barang terampil	27 Feb-18 Maret 2024	PKN STAN, BDK, Kanwil DJKN, KPKNL	28
6	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka perpindahan jabatan lainnya ke jabatan fungsional penata laksana barang mahir	27 Feb-18 Maret 2024	PKN STAN, BDK, Kanwil DJKN, KPKNL	57
7	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka perpindahan jabatan lainnya dan kenaikan jenjang ke jabatan fungsional penata laksana barang penyelia	29 April-21 Mei 2024	PKN STAN, BDK, Kanwil DJKN, KPKNL	49
8	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Kenaikan Jenjang Penilai Ahli Pertama ke Ahli Muda	2-17 Mei 2024	Pusdiklat KNPK	39
9	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan Jabatan Lainnya ke Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda	23-Apr-24	Online (kantor masing-masing peserta)	9
10	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan Jabatan Lainnya ke Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama	29-Apr-24	Online (kantor masing-masing peserta)	26
11	Serfikasi Kompetensi Penilaian Properti Dasar Mahasiswa PKN STAN	28 Juni 2024	PKN Stan	85
12	Serfikasi Kompetensi Penilaian Bisnis Dasar Mahasiswa PKN STAN	1 Juli 2024	PKN Stan	65
13	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda ke Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya	5-16 Agustus 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	12
14	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Gelombang II (Pegawai Kemenkeu) Tahun 2024	25-27 September 2024	Luring di DJPK dan daring	15

No.	Nama Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan	Lokasi Penyelenggaraan	Total Peserta
15	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	21-24 Oktober 2024	Luring di Pusdiklat AP	18
16	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	21-24 Oktober 2024	Luring di Pusdiklat AP	14
17	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	21-24 Oktober 2024	Luring di Pusdiklat AP	4
18	Ujian Ulangan Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama ke Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	26 Agustus - 12 September 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	4
19	Ujian Ulangan Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan Jabatan Lainnya ke Jabatan Fungsional Penilai Ahli Pertama (Kementerian ESDM)	26 Agustus - 12 September 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	5
20	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama	1-2 Oktober 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	12
21	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama ke Ahli Muda	1-2 Oktober 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	6
22	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Dalam Rangka Perpindahan dari Jabatan Lain	28 Nov - 6 Desember 2024	Online (kantor masing-masing peserta)	22

4.3.3 SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS ANGGARAN OLEH PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Sertifikasi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor Per-7/PP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor Per-1/PP/2021. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku pembina Jabatan

Fungsional Analisis Anggaran bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyelenggarakan Uji Kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang dan perpindahan dari jabatan lain. Berikut ini adalah rincian pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 22 Agustus 2024.

Tabel IV.9: Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

No.	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
1	Ahli Muda (CFO)	9	8
2	Ahli Madya (CFO)	6	6
3	Ahli Muda (COO)	12	12
4	Ahli Madya (COO)	21	20
	48	46	28

Adapun untuk uji kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan lain sepanjang tahun 2024 terlaksana sebanyak dua angkatan dimana

angkatan pertama diselenggarakan 27 s.d. 28 Oktober 2024 dan angkatan kedua diselenggarakan 9 s.d. 18 Desember 2024.

Tabel IV.10: Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

No.		Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Angkatan I				
1	Ahli Madya (CFO)	1	1	0
Angkatan II				
1	Ahli Pertama (CFO)	84	82	2
2	Ahli Muda (CFO)	1	1	0
3	Ahli Pertama (COO)	376	309	67
4	Ahli Muda (COO)	53	44	9
5	Ahli Madya (COO)	2	2	0
		516	438	78

4.3.4 SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Berdasarkan PMK 175/PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak, salah satu syarat utama bagi seseorang untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak adalah harus melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). USKP diselenggarakan untuk mengukur kompetensi dan keahlian calon konsultan pajak dalam bidang perpajakan. Adapun tingkatan Sertifikasi dan Izin Praktik yang diperoleh melalui USKP, terdiri dari:

1. Tingkat A: Untuk Wajib Pajak orang pribadi, kecuali Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

2. Tingkat B: Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam negeri, kecuali Wajib Pajak badan yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3. Tingkat C: Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam negeri dan Wajib Pajak badan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sepanjang tahun 2024, BPPK menyelenggarakan tiga kali USKP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.11: Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Tahun 2024

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Level Sertifikasi	Peserta Ujian	Lokasi	Peserta Lulus
1	24 s.d. 25 April 2024	A-Baru	1.323	Pusdiklat Pajak, Pusdiklat AP, Sekretariat BPPK, Pusdiklat AP, BDK, KPPN, P2PK	10
2	28 s.d. 29 Agustus 2024	A-Baru	1.561	Pusdiklat Pajak, Pusdiklat AP, Sekretariat BPPK, BDK, KPPN, P2PK	9
3	3 s.d. 5 Desember 2024	A-Mengulang B-Baru C-Baru	2.114	Pusdiklat Pajak, Pusdiklat AP, Pusdiklat BC, Aula Sabang DJBC, Sekretariat BPPK, BDK, GKN, KPKNL, P2PK	A : 433 B : 24 C : 7

4.4. PENGELOLAAN AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239-K.1/PDP.09/2017, pada tanggal 19 Desember 2017 BPPK menerima penghargaan berupa sertifikat atas pengakuan dari LAN Nomor 070/K.1/PDP.09 sebagai instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis untuk seluruh Pelatihan Teknis yang berkaitan dengan Bidang Keuangan Negara di bawah Lingkungan Kemenkeu dan Lembaga Pelatihan Pemerintah lainnya. Dengan demikian, lembaga pelatihan yang akan menyelenggarakan pelatihan di bidang keuangan negara harus melalui akreditasi dari BPPK. Pedoman pelaksanaan akreditasi ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-3/PP/2018 tentang Akreditasi Program Pelatihan di bidang Keuangan Negara.

Sepanjang tahun 2024 terdapat tiga lembaga pelatihan yang mengajukan permohonan Akreditasi Program Pelatihan di Bidang Keuangan Negara, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah. Adapun program yang diajukan oleh masing-masing lembaga pelatihan adalah sebagai berikut.

- 1. BPSDM Provinsi Sumatera Barat**
 - a. Bendahara Pengeluaran Substansi APBD;
- 2. Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama**
 - a. Pelatihan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Pelatihan Pengelolaan BMN; dan
- 3. BPSDM Provinsi Jawa Tengah**
 - a. Pelatihan Teknis Perbendaharaan
 - b. Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, belum terdapat penetapan hasil akreditasi dari ketiga pengajuan tersebut. Adapun progress untuk proses pengajuan akreditasi tersebut.

1. BPSDM Provinsi Sumatera Barat
 - Telah dilaksanakan Rapat Penilaian Akhir dengan hasil BPSDM Sumbar mendapatkan status Terakreditasi C
2. Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama
 - a. Telah dilakukan rapat konsultasi terkait pengajuan akreditasi program
 - b. Telah dilakukan ToT kepada widyaiswara dan pejabat pengelola keuangan dan pengelola BMN.
 - c. Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag akan menyelenggarakan Pelatihan Bendahara dan Pelatihan Pengelolaan BMN untuk melanjutkan proses pengajuan akreditasi program.
3. BPSDM Provinsi Jawa Tengah
 - a. Telah dilakukan pendampingan oleh BDK Yogyakarta dan telah memenuhi syarat dokumen akreditasi diatas 70% untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
 - b. Sedang disusun konsep *confirmation to proceed*, SK Tim Akreditasi Program, dan lini masa.

4.5. PENGELOLAAN BEASISWA

Selain melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi SDM Kemenkeu juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan gelar. BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM) memiliki tugas dan fungsi utama berupa pengelolaan beasiswa yang meliputi perencanaan, penyiapan dan pemantauan pelaksanaan program beasiswa di dalam negeri maupun luar negeri di lingkungan Kemenkeu. Jumlah karyasiswa yang dikelola oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan

Manajerial sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 277 karyasiswa dimana sejumlah 69 orang belum penempatan, 195 orang merupakan karyasiswa aktif dan 13 orang telah menyelesaikan studi.

Rincian karyasiswa yang dikelola oleh Pusdiklat KM sampai dengan Desember 2024 tertuang dalam tabel berikut

Tabel IV.12: Jumlah Karyasiswa yang Dikelola Pusdiklat KM

No.	Unit Eselon I	Jumlah Karyasiswa Ministerial			
		Belum Penempatan	Aktif	Selesai Studi	Total
1	Setjen	3	15	3	21
2	DJA	5	5	0	10
3	DJP	21	88	0	109
4	DJBC	14	20	2	36
5	DJPB	5	14	1	20
6	DJKN	1	18	4	23
7	DJPK	2	1	0	3
8	DJPPR	1	0	0	1
9	ITJEN	12	16	2	30
10	BKF	1	3	1	5
11	BPPK	4	14	0	18
12	LNSW	0	1	0	1

4.5.1 BEASISWA MINISTERIAL SCHOLARSHIP (MINTS)

Pada tahun 2024, BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (KM) kembali membuka kesempatan bagi para pegawai Kemenkeu untuk mengikuti seleksi program beasiswa Kemenkeu (*Ministerial Scholarship*). *Ministerial Scholarship* merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kemenkeu untuk melanjutkan

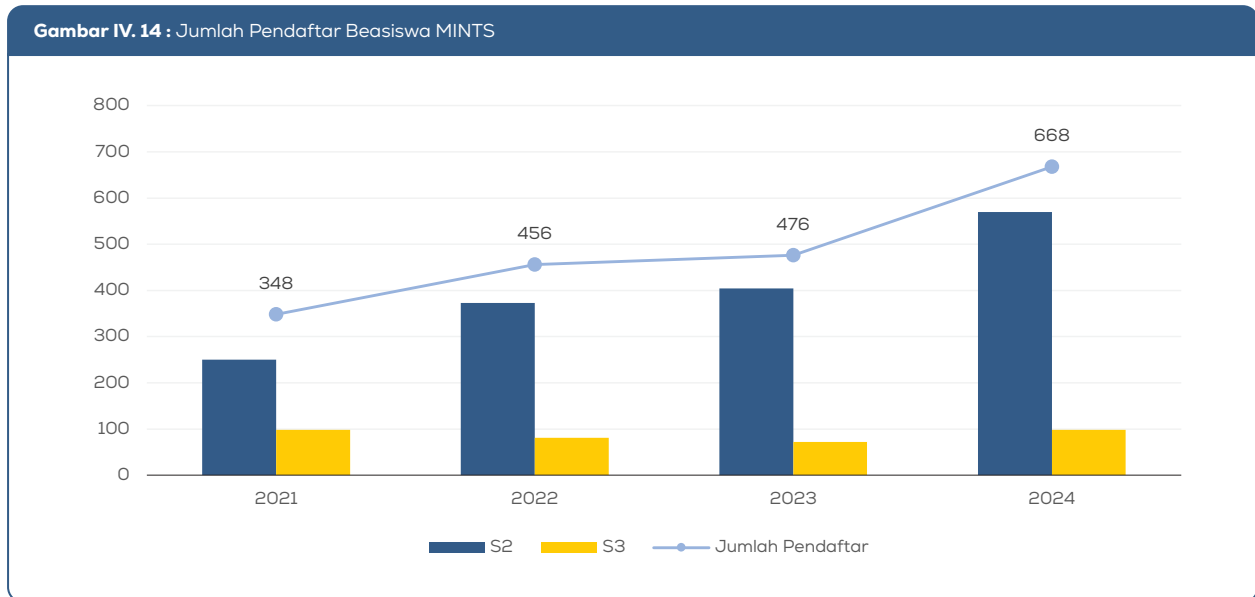
pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kemenkeu dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kemenkeu. Para alumni *Ministerial Scholarship* diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kemenkeu di masa mendatang.

Ministerial Scholarship memiliki karakteristik yang berbeda dengan beasiswa lainnya dimana setidaknya terdapat empat karakteristik yang membedakan beasiswa *Ministerial Scholarship* dengan beasiswa lainnya.

1. Tujuan Program
Program beasiswa *Ministerial Scholarship* memiliki misi khusus untuk membentuk kader pemimpin Kemenkeu di masa depan.
2. Persyaratan Pendaftar
Para pendaftar *Ministerial Scholarship* adalah mereka yang masuk dalam kategori “Kelompok Pegawai Potensial”, diantaranya: talent, pegawai pemenang kejuaraan, pegawai yang pernah menerbitkan publikasi, pegawai teladan/terbaik, pegawai inovatif, dan pegawai yang terlibat dalam squad team Kemenkeu.

3. Universitas Tujuan
Para penerima beasiswa *Ministerial Scholarship* diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan di universitas dengan program studi yang masuk peringkat 30 besar dunia (*by subject*).
4. Target IELTS
Pada level individu, setiap karyasiswa *Ministerial Scholarship* diharapkan memperoleh IELTS paling kurang 7.0.

Pada Tahun 2024, Pusdiklat KM melalui Bidang Manajemen Beasiswa kembali menyelenggarakan Seleksi Beasiswa *Ministerial Scholarship*. Sama seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Seleksi Beasiswa *Ministerial Scholarship* dilakukan melalui empat tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi psikotes, dan seleksi wawancara. Jumlah pendaftar beasiswa *Ministerial Scholarship* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024



tercatat total 668 pegawai Kemenkeu mendaftarkan pada Seleksi Beasiswa *Ministerial Scholarship* (570 Program S2 dan 98 Program S3).

Pada tahapan pertama yaitu seleksi administrasi terdapat 593 peserta yang berhasil lolos (503 Program S2 dan 90 Program S3), kemudian pada tahapan kedua seleksi akademik terdapat

175 peserta yang lolos (158 Program S2 dan 17 Program S3), pada tahapan ketiga seleksi psikotes terdapat 80 peserta yang lolos (73 Program S2 dan 7 Program S3) dan di tahap terakhir seleksi wawancara terdapat 53 peserta yang lolos (50 Program S2 dan 3 Program S3).

4.5.2 BEASISWA INSTITUSIONAL

Sebagai pengelola beasiswa di lingkungan Kemenkeu, Pusdiklat KM juga bertanggung jawab atas pengelolaan proses seleksi administrasi Beasiswa Instiusional. Beasiswa Instiusional merupakan program beasiswa yang didanai oleh penyedia beasiswa, seperti LPDP, AAS dan Chevening yang diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu. Pada tahun 2024 ini Pusdiklat KM memberikan penawaran kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kemenkeu sebanyak 30 penawaran program beasiswa, diantaranya:

1. Beasiswa Magister (S2) Pusdiklatren Bappenas Tahap 2 Tahun 2024 – DXHR;
2. Beasiswa S2/S3 Fulbright Tahun 2024;
3. Beasiswa S2/S3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahap I Tahun 2024;
4. Beasiswa Magister (S2) *The Government of Brunei Darussalam Scholarship* Tahun 2024;
5. Beasiswa Magister (S2) *Korea International Cooperation Agency (KOICA) Batch I* Tahun 2024;
6. Beasiswa S2/S3 *New Zealand Scholarship* Tahun 2024;
7. Beasiswa S2/S3 *Korea International Cooperation Agency (KOICA) Batch II* Tahun 2024;
8. Beasiswa *Australia Awards Scholarship (AAS)* Tahun 2024;
9. Beasiswa Magister (S2) Luar Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2024;
10. Beasiswa Doktoral (S3) *Islamic Development Bank (IsDB) Merit Scholarship Program for Hight Technology*;
11. Beasiswa Magister (S2) Dalam Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2024;
12. Beasiswa Magister (S2) *Australia Awards Indonesia Nusantara* Tahun 2024;
13. Beasiswa Program Magister (S2) Universitas Pertahanan Tahun 2024;
14. Beasiswa Jepang – *IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) Open Track AY2024*;
15. Beasiswa S2/S3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahap II Tahun 2024;
16. Beasiswa Master *Degree Programme Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR)*;
17. Beasiswa LPDP – AAS – 30 Agustus 2024;
18. Beasiswa Chevening – 5 November 2024;
19. Beasiswa STIN Program Studi Kajian Intelijen – 16 Desember 2024;
20. Beasiswa STIN Program Studi Intelijen Medik (DJP dan DJBC) – 13 Januari 2025;
21. Beasiswa *LeeKuanYewSchool* – 30 September 2024;
22. Beasiswa *Singapore Ministry of Foreign Affairs, Postgraduate Scholarship* – Informasi lengkap ada di *website KTLN* – 31 Desember 2024;
23. Beasiswa *JISPA Partnership Track AY2025* – 1 November;
24. Beasiswa Kominfo x Chevening – 5 November;
25. Beasiswa PEPP Universitas Tsukuba – 15 November;
26. Beasiswa JICA SDGs – 18 Oktober;
27. Beasiswa Kementerian Kominfo Kelas Khusus DN – 21 Oktober (ITB) dan 31 Oktober (Universitas Telkom);
28. Beasiswa LPDP – *Georgetown SFS* – 8 November;
29. Beasiswa *JISPA Open-Track AY2025* – 1 Desember; dan
30. Beasiswa *KOICA Batch 1 TA 2025/2026*.

4.6. PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Selain mengelola pembelajaran di bidang Keuangan Negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, BPPK juga mengelola Program Pendidikan Vokasi di bidang keuangan negara melalui Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. PKN STAN semula Bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kemudian bertransformasi di tahun 2015.

PKN STAN memiliki visi menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PKN STAN menetapkan misi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu tinggi sebagai hasil sintesis pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan negara;
2. membangun iklim kehidupan akademik yang membangun pola pikir kreatif, kritis, saling menghargai, menjunjung etika, dan berwawasan kebangsaan dalam rangka membentuk pengelola keuangan negara yang memiliki intelektualitas tinggi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan memegang teguh nilai-nilai Kemenkeu;

3. memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara; dan
4. mengembangkan sistem tata kelola pendidikan tinggi berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

Dalam menjalankan misi yang telah ditetapkan, PKN STAN berkomitmen untuk melakukan:

1. pembentukan dan pembangunan karakter mahasiswa;
2. pembentukan semangat kebangsaan, toleransi dan kebhinekaan;
3. pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan minat bakat; dan
4. pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan secara ilmiah dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya.

Komitmen tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebijakan pemerintah, serta perwujudan kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perguruan tinggi, PKN STAN melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4.6.1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKN STAN adalah Pendidikan Vokasi dengan jenjang pendidikan Program Diploma III dan Program Sarjana Terapan guna menyiapkan

Mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan di bidang keuangan negara. Terdapat sembilan Program Studi di PKN STAN yang terdiri dari D-III Akuntansi, D-III Pajak, D-III PBB/Penilai, D-III

Kepabeanaan dan Cukai, D-III Kebendaharaan Negara, D-III Manajemen Aset, D-IV Akuntansi Sektor Publik, D-IV Manajemen Keuangan Negara,

dan D-IV Manajemen Aset Publik. Adapun jumlah mahasiswa untuk tiap program studi termuat dalam tabel berikut.

Tabel IV.13: Rincian Jumlah Mahasiswa PKN STAN

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1	Akuntansi Sektor Publik Sarjana Terapan	1402
2	Manajemen Keuangan Negara Sarjana Terapan	1284
3	Manajemen Aset Publik Sarjana Terapan	564
4	Diploma III Akuntansi	249
5	Diploma III Pajak	264
6	Diploma III PBB/Penilai	145
7	Diploma III Kepabeanaan dan Cukai	108
8	Diploma III Kebendaharaan Negara	118
9	Diploma III Manajemen Aset	46
Jumlah		4180

Pada Tahun 2024, PKN STAN kembali menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan rincian berikut.

1. SPMB Reguler

Merupakan seleksi calon mahasiswa Program Sarjana Terapan yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/Sederajat);

SPMB Reguler sendiri terdiri dari beberapa jalur penerimaan, yaitu:

- Jalur Reguler : merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kemenkeu, Kementerian/Lembaga Lainnya atau Pemerintah Daerah.
- Jalur Afirmasi Kewilayahan : merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk lulusan pendidikan menengah atas yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kemenkeu, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah diutamakan pada wilayah afirmasi tersebut. Pada tahun 2024, wilayah afirmasi yang ditetapkan meliputi 137 kota/kabupaten di 24 provinsi, yakni 8 provinsi di Indonesia Bagian Barat, 7 provinsi di Indonesia Tengah, dan 9 provinsi di Indonesia Bagian timur;
- Jalur Pembibitan, merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru lulusan pendidikan menengah atas melalui mekanisme kerja sama PKN STAN dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2024, pemerintah daerah yang melakukan kerja sama dalam program pembibitan adalah 3 provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua Barat Daya, serta 24 kabupaten/kota di 12 Provinsi, yakni 10 Provinsi di Indonesia Bagian Barat dan 2 provinsi di Indonesia Tengah.

Adapun hasil pelaksanaan SPMB Reguler tertuang dalam tabel berikut.

Tabel IV.14: Hasil Pelaksanaan SPMB Reguler Tahun 2024							
No	Jalur	Kuota	Adm	SKD	Lanjutan I	Lanjutan II	Lulus
1	Reguler	417	7.845	6.824	1.254	488	443
2	Afirmasi Kewilayahan	105	583	543	178	135	105
3	Pembibitan	200	1.141	392	392	196	174
Total		722	9.859	1.824	1.824	819	722

Peserta yang dinyatakan lulus pada SPMB tersebut dialokasi ke dalam tiga program studi sebagai berikut.

Tabel IV.15: Alokasi Hasil SPMB Reguler Tahun 2024		
No	Program Studi	Kuota
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan (ASP)	417
2	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan (MKN)	105
3	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan (MAP)	200
Total		722

2. SPMB Alih Program

Merupakan seleksi calon mahasiswa baru lulusan PKN STAN yang telah berstatus sebagai PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Program Diploma III atau Program

Sarjana Terapan (Tugas Belajar). Hasil SPMB Alih Program pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.16: Hasil Pelaksanaan SPMB Alih Program Tahun 2024						
No	Jalur	Kuota	TPA dan TBI	Tes Psikologi	Tes	Lulus
1	Kemenkeu - Afirmasi	455	694	392	169	157
2	Kemenkeu - Non Afirmasi	490	1.141	680	335	325
3	Kemenkeu - <i>Blended, Learning</i>	75	83	65	40	40
4	Kementerian PUPR	50	71	44	19	19
5	KLDP*	85	345	106	39	35
Total		1.145	2.334	1.287	602	576

Peserta yang dinyatakan lulus pada SPMB tersebut dialokasikan ke dalam tujuh program studi sebagai berikut.

Tabel IV.17: Alokasi Hasil SPMB Alih Program Tahun 2024

No	Jalur	Kemenkeu			Non Kemenkeu	
		Afirmasi	Non Afirmasi	Blended Learning	PUPR	KLPD
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	95	101	-	19	35
2	Diploma III Akuntansi	7	47	5	-	-
3	Diploma III Kepabeanaan dan Cukai	9	1	14	-	-
4	Diploma III Kebendaharaan Negara	4	16	-	-	-
5	Diploma III Manajemen Aset	5	9	-	-	-
6	Diploma III Pajak (Pajak)	21	87	21	-	-
7	Diploma III PBB/Penilai	18	64	-	-	-

3. SPMB Kerja Sama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

Merupakan seleksi calon mahasiswa Program Sarjana Terapan bagi lulusan pendidikan menengah dari RDTL (Kerja Sama Kemenkeu

RI dengan Kemenkeu RDTL). Hasil SPMB RDTL pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.18: Alokasi Hasil SPMB RDTL Tahun 2024

No	Program Studi	Kuota
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan (ASP)	5
2	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan (MKN)	5
3	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan (MAP)	5
Total		15

4. SPMB Program *The Indonesian Aid Scholarship* (TIAS)

Merupakan penerimaan mahasiswa internasional melalui Program TIAS dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan

Internasional. Hasil pelaksanaan SPMB Program TIAS adalah sebagai berikut.

Tabel IV.19: Alokasi Hasil SPMB Program TIAS Tahun 2024

No	Program Studi	Kuota
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan (ASP)	15
2	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan (MKN)	11
3	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan (MAP)	10
Total		36

5. SPMB Tugas Belajar Berkelanjutan

Merupakan program PKN STAN dengan memberikan kesempatan bagi lulusan terbaik Program Diploma III Tahun 2024 untuk meneruskan pendidikan melalui skema Tugas Belajar Berkelanjutan. Sebanyak 17

mahasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang Program Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Alih Program.

4.6.2 PENELITIAN

Salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN adalah pelaksanaan penelitian. Sampai bulan Desember 2024, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) di Politeknik Keuangan Negara STAN mengelola 152 penelitian yang terdiri dari penelitian lanjutan dari tahun 2023 sebanyak 29 penelitian dan 123 penelitian yang diajukan

di tahun 2024. Diantara penelitian tersebut, terdapat penelitian kolaborasi yang merupakan penelitian bersama antara dosen PKN STAN dengan akademisi maupun praktisi dari instansi lain baik dalam maupun luar negeri. Dari total 152 penelitian yang dikelola pada tahun 2024, 114 penelitian telah selesai dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.20: Daftar Penelitian Selesai di Tahun 2024

No	Judul Penelitian	Skema
1	Identifikasi Risiko-Risiko Utama dalam Pengadaan Pembangunan Gedung (Studi Kasus Kemenkeu)	Kolaborasi Dalam Negeri
2	Pengaruh Social Norms Sebagai Antiseden <i>Personal Norms</i> dan <i>Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance</i> Dengan Patriotism Sebagai Moderator Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Generasi	Tim Internal
3	Perpajakan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (<i>Taxing the State Universities: Causes and Consequences</i>)	Tim Internal
4	Persepsi Pegawai Terkait Kebijakan Mutasi antar Unit Eselon 1 di Kemenkeu	Kolaborasi Dalam Negeri
5	Analisis atas Aspek Perencanaan dan pengendalian dalam Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum	Kolaborasi Dalam Negeri
6	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan IKN: Sustainability Pembangunan dan Fiskal?	Tim Internal
7	Pengaruh Pendidikan terhadap Kesenjangan Pendapatan di DKI dan Jawa Barat	Tim Internal
8	Penerapan PSAK 71 dan Risiko pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan di Indonesia	Tim Internal
9	Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis Artificial Intelligence pada Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi	Tim Internal
10	Peran Perempuan dalam Perekonomian Masyarakat Baduy	Tim Internal
11	Efektifitas Pelaporan SPT Pajak Melalui Aplikasi <i>E-Filing</i>	Tim Internal
12	Penerapan <i>Social Enterprise Model Canvas</i> (SEMC) pada BUMDesa di Kabupaten Klaten	Kolaborasi Dalam Negeri
13	Peningkatan Kompetensi Analisis Pegawai Muda Kemenkeu melalui Pendekatan Penugasan dan Ujian Berbasis Proyek	Tim Internal
14	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022	Individu

No	Judul Penelitian	Skema
15	Implementasi Kebijakan P2SK melalui Optimalisasi Peran UMKM dan Perbankan Syariah untuk Menguatkan Ekosistem Industri Halal Menuju Keunggulan Kompetitif	Kolaborasi Dalam Negeri
16	Pengaruh De Minimis Threshold dan Tarif Bea Masuk terhadap Perilaku Konsumen dalam Belanja Barang Impor Melalui <i>E-Commerce</i>	Kolaborasi Dalam Negeri
17	Membangun Ketahanan Fiskal Nasional melalui Implementasi Kebijakan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024	Kolaborasi Dalam Negeri
18	Kesiapan BUM Desma LKD Kabupaten Serang untuk Mengimplementasikan Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa	Kolaborasi Dalam Negeri
19	Perlindungan Hukum Profesi Penilai di Indonesia	Kolaborasi Internasional
20	Analisis Kemajuan Infrastruktur dan Pemanfaatan Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang	Kolaborasi Dalam Negeri
21	Biaya Kepatuhan Pajak: Pemetaan Literatur dan Potensi Penelitian Lanjutan	Individu
22	Potensi Ekspor Produk Farmasi dan Kosmetik Indonesia ke Negara OIC	Individu
23	Apakah Dana Desa dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Berperan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?	Tim Internal
24	Tinjauan Atas Proses Pencairan Dana Pada Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN (Studi Kasus Pembayaran Honor Mengajar 2023)	Kolaborasi Dalam Negeri
25	Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	Individu
26	Probability Keputusan Upaya Hukum Keberatan di Bidang Kepabeanan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai	Kolaborasi Dalam Negeri
27	Kepatuhan Rencana dan Realisasi Penarikan Dana (RPD) Satuan Kerja	Tim Internal
28	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Pinjaman Lembaga Keuangan Desa Indonesia dalam Pinjaman Kelompok Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Serang)	Kolaborasi Dalam Negeri
29	Menelaah Lembaga Perencanaan dan Penganggaran di Berbagai Negara	Individu
30	Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
31	Dampak Penurunan Kinerja Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Pada Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Perspektif Teori Keagenan	Kolaborasi Dalam Negeri
32	Pengaruh <i>Mandatory Spending</i> , Kualitas Laporan Keuangan dan Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi	Individu
33	<i>Encouraging Environmental Behavior in Higher Education: A Survey to Students of Faculty Economics and Business in Indonesia</i>	Kolaborasi Dalam Negeri
34	Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Emirate Arab di Sektor <i>Modest Fashion</i>	Tim Internal
35	Peningkatan Tata Kelola Penjaminan Pemerintah Pada Skema Penugasan BUMN Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur	Kolaborasi Dalam Negeri
36	Persentase Nilai Kontrak dalam Set Aside Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Usaha Kecil (Studi Empiris Pada Kemenkeu dan Provinsi Papua Barat)	Tim Internal
37	Valuasi Dan Penyajian Aset Spektrum Frekuensi Sebagai Potensi Sumber <i>Underlying Asset</i> Sukuk Negara	Kolaborasi Dalam Negeri
38	Preferensi Generasi Z Untuk Berinvestasi Pada Instrumen Surat Berharga Negara	Individu
39	Peran Penjaminan Pemerintah dalam Menyukseskan Proyek Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Kolaborasi Dalam Negeri
40	Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Karakteristik Kementerian Negara/Lembaga	Individu
41	Peran Reformasi Birokrasi dalam Memediasi Pengaruh Kondisi Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah	Tim Internal

No	Judul Penelitian	Skema
42	Analisis Perhitungan Biaya Produksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pelayanan yang Disediakan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kolaborasi Dalam Negeri
43	Benchmarking Pengelolaan Program Pensiun ASN dengan <i>International Best Practice: Cost and Benefit Analysis</i>	Individu
44	Pengaruh Infrastruktur Konektifitas dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
45	Peran <i>Supply Chain Finance</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor (Studi Kasus Eksportir Ikan di Indonesia)	Tim Internal
46	Pembaharuan Regulasi Pemilihan Umum: Desain Kewajiban Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	Kolaborasi Dalam Negeri
47	Upaya peningkatan Kompetensi <i>e-filing</i> WP OP melalui program relawan pajak	Tim Internal
48	Penerapan Model <i>Delone</i> dan <i>McLean</i> untuk Menguji Kesuksesan Aplikasi SIPD di Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
49	Dampak Hilirisasi Nikel Indonesia terhadap Ekspor Nikel Serta Kinerja Perusahaan Nikel	Kolaborasi Dalam Negeri
50	Analisis Efisiensi, Perbandingan Tool dan Potensi Integrasi Model DEA pada Perguruan Tinggi di Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
51	<i>Role of Customs on Employment at West Java</i> Dampak Kepabeanaan terhadap Tenaga Kerja di Jawa Barat	Kolaborasi Dalam Negeri
52	Penggunaan <i>Model Computable General Equilibrium</i> dalam Simulasi Dampak Insentif Fiskal pada Industri Daur Ulang terhadap Perekonomian Banten	Kolaborasi Dalam Negeri
53	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai terhadap Penerimaan Cukai MMEA di Kanwil DJBC Banten	Kolaborasi Dalam Negeri
54	Atribut Penting dalam Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDES	Tim Internal
55	Isu Terkini Riset Akuntabilitas di Akuntansi Sektor Publik: Review Literatur dan Penelitian Masa Depan	Kolaborasi Dalam Negeri
56	Analisis Program Bantuan Pemerintah terhadap Kemandirian Pesantren di DKI Jakarta	Kolaborasi Dalam Negeri
57	Pengukuran Perbedaan Respon <i>Generative-AI</i> dan Manusia dalam Ujian Akuntansi: Implikasi dalam Penilaian Akademik	Kolaborasi Dalam Negeri
58	Pengaruh Kepemimpinan, Pendidikan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan BUMDesa	Kolaborasi Dalam Negeri
59	Pengembangan Framework Pengukuran Kinerja Sistem Informasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kolaborasi Dalam Negeri
60	Efektivitas Jabatan Fungsional Penilai Keuangan Negara Di Luar Kemenkeu	Kolaborasi Dalam Negeri
61	Analisis Atas Proses Pembelajaran Praktikum Guna Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa	Tim Internal
62	Penyajian dan Pengungkapan Aset Sumber Daya Alam (SDA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Kolaborasi Dalam Negeri
63	Analisis Kepuasan Pelanggan Tax CLinic PKN STAN	Kolaborasi Dalam Negeri
64	Ekstensifikasi Sistem Pembayaran Lelang	Kolaborasi Dalam Negeri
65	Model Korporasi BUMDesa untuk Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Desa	Kolaborasi Dalam Negeri
66	Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten/Kota: Peran Pemerintah Daerah, Kualitas Institusi, Perekonomian Daerah, dan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri

No	Judul Penelitian	Skema
67	Estimasi Tarif Sewa Aset Badan Layanan Umum dengan Metode Alternatif	Tim Internal
68	Analisis Akuntansi Aset Jasa Konsesi dalam Kerjasama Publik dan Badan Usaha (KPBU). Studi Kasus: KPBU pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kolaborasi Dalam Negeri
69	Pengelolaan Aset dalam Abandonment and Site Restoration Pascaoperasi Migas	Kolaborasi Dalam Negeri
70	Model Pengadilan Pajak di Indonesia dan di Negara Lain	Kolaborasi Dalam Negeri
71	Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Upaya Banding Administratif	Kolaborasi Dalam Negeri
72	Tantangan Implementasi XBRL dalam Pelaporan Pajak di Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
73	<i>Audit Plan</i> Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak	Kolaborasi Dalam Negeri
74	Pembaruan Kurikulum Program Studi Diploma III Pajak	Kolaborasi Dalam Negeri
75	Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tarif 11 % pada Minyak Goreng Kemasan	Kolaborasi Dalam Negeri
76	Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Perspektif <i>Tax Revenue</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	Kolaborasi Dalam Negeri
77	Penggalian Potensi dan Strategi Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Sukamara	Kolaborasi Dalam Negeri
78	Pajak Pusat Dan Pajak Daerah: Manakah Yang Lebih Berperan Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia Indonesia?	Kolaborasi Dalam Negeri
79	Reformulasi Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kolaborasi Dalam Negeri
80	Analisis Ekonomi Regional Kalimantan Timur: Pengaruh Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Struktur Perekonomian Kalimantan Timur	Individu
81	Analisis Kinerja Belanja Kementerian/Lembaga dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Kolaborasi Dalam Negeri
82	Pengaruh Kebijakan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia	Individu
83	Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Intensi untuk Patuh Pajak Para Pelaku UMKM	Kolaborasi Dalam Negeri
84	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Tim Internal
85	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi UKM Sebagai Upaya Menumbuhkan Intensi untuk Patuh Pajak Para Pelaku UMKM	Kolaborasi Dalam Negeri
86	Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost and Benefits Analysis</i>) Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat; Studi Kasus PT XYZ	Kolaborasi Dalam Negeri
87	Analisis Akurasi Dan Keadilan Pengenaan Pajak Properti (PBB-P2) Di Kota Tangerang Selatan: Komparasi Studi Rasio dan Koefisien Gini	Kolaborasi Dalam Negeri
88	Analisis Pengaruh Preferensi Tarif, <i>Rules of Origin</i> , Fasilitas Perdagangan, dan Pembatasan Ekspor terhadap Pemanfaatan <i>Asean-China Free Trade Agreement</i> (ACFTA) di Negara-Negara Asean	Kolaborasi Dalam Negeri
89	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan BUMDes	Kolaborasi Dalam Negeri
90	Optimalisasi Layanan Fasilitas PKS: Model Kuantitatif Berbasis Niat Penggunaan, Adopsi Peraturan, dan Karakteristik Aturan dengan Variabel Moderator Pemahaman Fasilitas PKS oleh Pengguna Jasa Kepabeanaan	Tim Internal
91	Apakah BUM Desa Kabupaten Pandeglang Siap Mengimplementasikan Panduan Pelaporan Keuangan BUM Desa? (Studi Kasus di 4 Klasifikasi BUM Desa)	Tim Internal

No	Judul Penelitian	Skema
92	Peran Manajemen SDM dalam Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja BUM Desa	Kolaborasi Dalam Negeri
93	Tinjauan Atas Belanja Perjalanan Dinas (Eperjadin) menggunakan Platform Pembayaran Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kolaborasi Dalam Negeri
94	Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusiaprovinci Kepulauan Riau	Kolaborasi Dalam Negeri
95	Tata Kelola Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Sebagai Upaya Terstruktur Dan Sistemik Untuk Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa	Kolaborasi Dalam Negeri
96	Faktor Kesehatan dan Mitigasi Risiko untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Kolaborasi Dalam Negeri
97	Manajemen Penerapan <i>Theory of Planned Behavior</i> dan <i>Outcome-Based Regulation Theory</i> Untuk Peningkatan Kepatuhan Pelaku Impor Barang Bawaan Penumpang Atas Kewajiban Pajaknya Dengan Menggunakan Structural Equation Modelling (Studi Kasus Pada Bandara Soekarno Hatta Tangerang)	Tim Internal
98	Perencanaan Audit Berbasis Risiko Pada BUMN X	Individu
99	<i>Can't Academics in Property Valuation be Experts in That Field?: Difficulties Raised by Decision in Angkasa Pura I v. Kulon Progo Indonesia</i>	Tim Internal
100	Peranan Belanja Fungsi Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Individu
101	<i>New Design of Blended Learning for Understanding State Finances</i>	Tim Internal
102	Implementasi Manajemen Perubahan untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi di Era Digital	Individu
103	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Studi Kasus Tahun 2019-2021	Kolaborasi Dalam Negeri
104	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Intervensi Fiskal: Mampukah Keduanya Mengurangi Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur?	Individu
105	Memaksimalkan Nilai Perusahaan melalui Kinerja Ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasca Pandemi COVID-19: Studi pada Perusahaan SubSektor Barang Konsumsi	Individu
106	<i>Analysis of the Economic Impact of Implementing VAT and Import Duties on the Indonesia-Japan Premium Beef Trade under the IJEPA-FTA Scheme: A CGE-GTAP Approach</i>	Kolaborasi Dalam Negeri
107	Manajemen Kepabeanaan Barang Tidak Berwujud: Tantangan, Peluang, dan Peran Teknologi Baru dalam Mengelola Importasi Barang Digital	Kolaborasi Dalam Negeri
108	Optimalisasi Penerapan Kebijakan <i>Treasury Deposit Facility</i> (Pendekatan <i>Data Mining</i>)	Kolaborasi Dalam Negeri
109	<i>How can accelerating BEV's Success Program Through Risk Management?</i>	Tim Internal
110	Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Pengurangan Kemiskinan Melalui Kemudahan Akses Pada Keuangan Mikro Syariah Digital dengan Menggunakan Pendapatan Desa sebagai Variabel Moderator	Individu
111	Pengaruh Penerapan Tarif Volatil Pada Hotel Politeknik Pariwisata	Kolaborasi Dalam Negeri
112	Potensi dan Dampak Ekonomi dari Ekstensifikasi Cukai Bahan Bakar Minyak	Individu
113	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Kolaborasi Dalam Negeri
114	Analisa Model Prediksi Nilai Impor dan Ekspor antara Indonesia aan Mozambique	Individu

Dalam rangka mendorong kemajuan penelitian secara nasional, PKN STAN bekerja sama dengan Kemenkeu Satu menyelenggarakan *Public Sector International Conference (PSIC) 2024* yang

merupakan kegiatan ilmiah berskala internasional yang digagas oleh konsorsium sejumlah Perguruan Tinggi pada tanggal 11-12 September 2024 di Senggigi, Nusa Tenggara Barat.

4.6.3 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

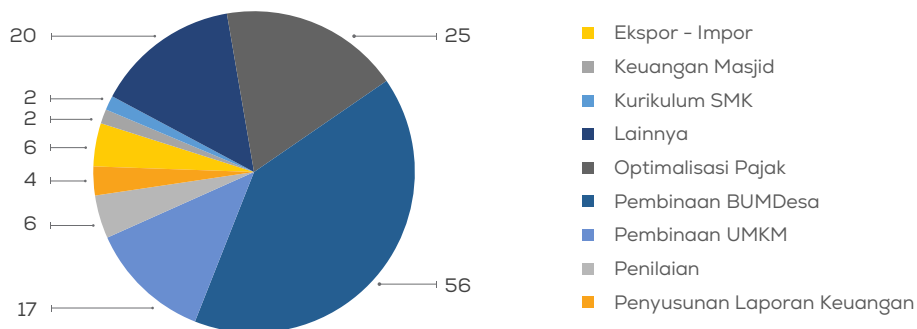
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan melalui pendayagunaan kepakaran dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat direncanakan dengan baik, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan luaran (*outcome*) yang berdampak nyata (*impactful*) bagi mitra, mengintegrasikan keilmuan, menciptakan kolaborasi institusi dan pada akhirnya mampu membantu pemerintah dalam program pemberdayaan dan kemandirian masyarakat bagi pembangunan regional dan nasional.

Pada tahun 2024, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan skema pelatihan dan pendampingan serta narasumber. Sampai dengan Desember 2024 terdapat 138 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

telah diajukan proposalnya. Dari 138 kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari skema pelatihan dan pendampingan sebanyak 123 kegiatan (89,13%) sedangkan untuk skema narasumber terdapat 15 kegiatan (10,87%). Kegiatan pendampingan dilakukan secara daring, luring, dan *hybrid* (perpaduan antara daring dan luring). Pendampingan secara *hybrid* (luring dan dilanjutkan pendampingan daring) dilakukan karena dosen tidak memungkinkan untuk terus berada di lokasi pengabdian kepada masyarakat baik dari sisi waktu maupun anggaran. Adapun skema narasumber dilakukan secara luring maupun daring.

Dari 138 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diajukan proposalnya, 134 kegiatan telah selesai dilaksanakan di tahun 2024. Tema yang dominan diangkat adalah terkait Pembinaan BUMDesa disusul. Tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV. 15 : Komposisi Tema Proposal Pengabdian Masyarakat Tahun 2024



4.7. LEARNING ORGANIZATION

Untuk meningkatkan kemampuan merespons perubahan dan kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian di tingkat nasional dan global, Kemenkeu melaksanakan implementasi Organisasi Pembelajar atau *Learning Organization* (LO). LO merupakan organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar (dalam hal ini adalah SDM Kemenkeu) agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu.

Setiap unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan harus mengimplementasikan *Learning Organization*. Implementasi LO dilaksanakan melalui penerapan sepuluh komponen LO sesuai KMK 283/KMK.011/ 2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kemenkeu yang terdiri atas: *Strategic Fit and Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning solutions; Learning spaces; Learners' performance; Leaders' Participation In Learning Process;* dan *Feedback*

Dalam rangka implementasi LO di lingkungan Kemenkeu tahun 2024, telah dilakukan penilaian sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kemenkeu tahun 2020 - 2024. Penilaian ini dilakukan oleh Komite LO berdasarkan instrumen penilaian tingkat implementasi LO yang ditetapkan melalui KMK Nomor 2/KM.11/2023 tentang Perubahan Kedua atas KMK 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) dan Komite *Learning Organization* di lingkungan Kemenkeu.

Tingkat implementasi LO diukur menggunakan tiga metode penilaian, yaitu: survei, *self assessment*, dan penilaian komite. Hasil penilaian metode ini berkontribusi dalam nilai akhir implementasi LO

dengan pembobotan tertentu. Metode survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada unit sampel penilaian tingkat implementasi LO. Metode *self assessment* merupakan penilaian implementasi LO yang dilakukan secara mandiri oleh unit sampel dengan menggunakan data yang berasal dari unit tersebut. Terakhir, metode penilaian komite merupakan penilaian implementasi LO pada Unit Eselon I oleh Komite LO dengan menggunakan data yang diperoleh dari BPPK selaku pengelola pembelajaran di Kemenkeu.

Total unit yang menjadi sampel pada Kemenkeu pada tahun 2024 adalah 65 unit. Unit sampel penilaian tingkat implementasi LO pada tahun 2024 telah ditentukan pada masing-masing Unit Eselon I/Non Eselon di Kemenkeu yang terdiri dari beberapa kategori berikut.

1. Sekretariat;
2. Unit Eselon II yang berkedudukan di Jakarta;
3. Kantor Wilayah atas Satuan Kerja yang setara yang berkedudukan di pulau Jawa;
4. Kantor Wilayah atas Satuan Kerja yang setara yang berkedudukan di luar pulau Jawa;
5. Kantor Pelayanan atau Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja yang setara yang berkedudukan di pulau Jawa; dan
6. Kantor Pelayanan atau Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja yang setara yang berkedudukan di luar pulau Jawa.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai total implementasi LO di Kemenkeu adalah 94,22, melebihi target kinerja tahun 2024 sebesar 90. Rincian nilai Kemenkeu pada tiga metode penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai dari metode survei (bobot 40%) adalah 90,84.

2. Nilai dari metode *self-assessment* (bobot 30%) adalah 98,82.
3. Nilai dari penilaian komite (bobot 30%) adalah 94,12.

Pada lingkup BPPK, hasil penilaian tingkat implementasi LO tahun 2024 adalah sebesar 96,31, melebihi target tahun 2024 sebesar 90. Nilai BPPK pada tiga metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai dari metode survei (bobot 30%) adalah 94,25;
2. Nilai dari metode *self-assessment* (bobot 30%) adalah 100,00; dan
3. Nilai dari metode penilaian komite (bobot 30%) adalah 95,36.

4.8. KNOWLEDGE MANAGEMENT

Sebagai organisasi yang terus melakukan transformasi, Kementerian Keuangan memiliki segudang data dan pengetahuan, baik yang bersifat eksplisit maupun tacit (melekat pada individu pegawai). Agar pengetahuan tersebut tidak hilang, maka Kementerian Keuangan melakukan serangkaian proses manajemen pengetahuan, yaitu identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, pemanfaatan, dan pemantauan pengetahuan, secara terstruktur dan sistematis. Organisasi mendukung pemelajar untuk melakukan proses manajemen pengetahuan dengan cara memberikan penugasan dan mendorong inisiatif yang tercermin dalam 6 sub komponen berikut.

1. Identifikasi.

Organisasi menentukan pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu untuk didokumentasikan sebagai aset intelektual. Aset intelektual adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi.

2. Dokumentasi.

Organisasi melakukan kegiatan pendokumentasian pengetahuan (*knowledge capture*) untuk menghasilkan aset intelektual. Aset intelektual ini dapat dituangkan

dalam bentuk berupa audio, video maupun audiovisual.

3. Pengorganisasian.

Organisasi menata aset intelektual dan melakukan penjaminan mutu. Penataan aset intelektual ini dapat dilakukan dengan cara katalogisasi, klasifikasi, penyusunan abstraksi, dan pemberian indeks.

4. Penyebarluasan.

Organisasi menyediakan aset intelektual dan disebarluaskan melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC), serta dapat diakses oleh seluruh pengguna KLC.

5. Penerapan.

Organisasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengaplikasian atau pemanfaatan aset intelektual oleh pengguna KMS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

6. Pemantauan.

Organisasi memastikan kesesuaian antara aset intelektual yang terdapat dalam KMS dengan kebutuhan penggunaannya.

Banyak hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mendukung dan mengoptimalkan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya:

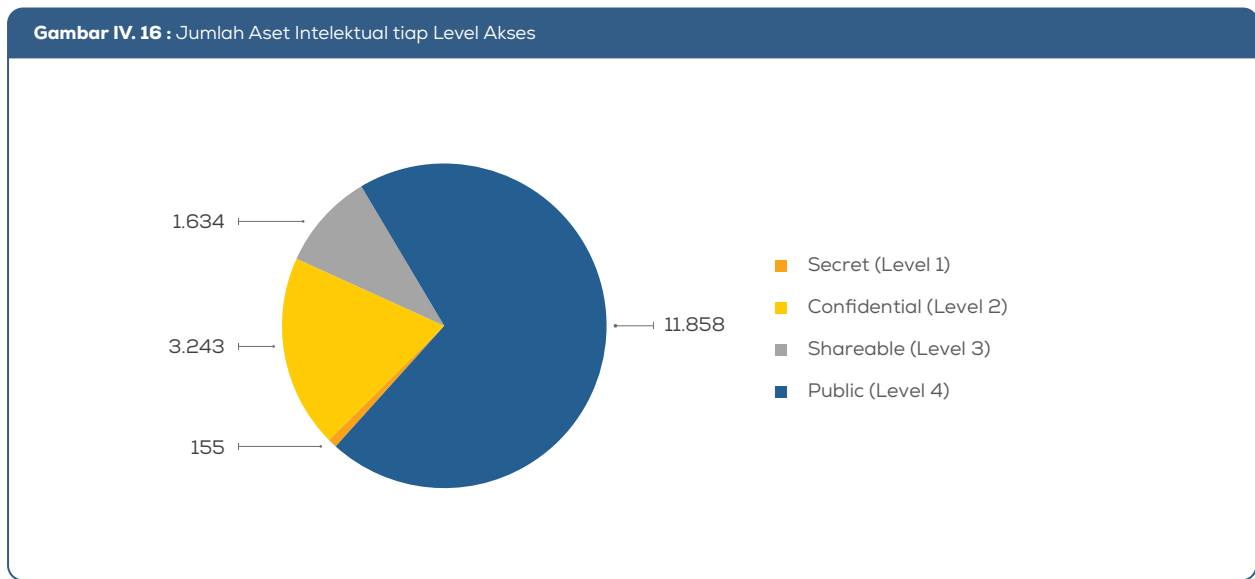
1. Pada tahun 2022, telah disusun tools pengukuran maturitas manajemen pengetahuan menggunakan framework Asian

Productivity Organization (APO). Berdasarkan tools tersebut, telah dilakukan pengukuran maturitas MP Kementerian Keuangan, dengan hasil pengukuran tingkat maturitas tahun 2024: 95,24%

2. Pengembangan KLC sebagai LKMS Kementerian Keuangan untuk mengelola pengetahuan dari setiap level akses aset intelektual, yaitu:
 - a. Level 1 (*secret*): dapat diakses oleh individu tertentu.
 - b. Level 2 (*confidential*): dapat diakses oleh internal unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun aset intelektual.
 - c. Level 3 (*shareable*): dapat diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu.
 - d. Level 4 (*public*): dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

3. Pada tahun 2024, BPPK telah melengkapi infrastruktur manajemen pengetahuan sebagaimana diamankan di dalam PMK Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ditetapkannya KMK Nomor 2/KM.11/2024 tentang Cetak Biru Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 3/KM.11/2024 tentang Penghargaan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya di tingkat BPPK, sampai dengan berakhirnya tahun 2024 jumlah aset intelektual yang telah diproduksi oleh BPPK terdapat sebanyak 16.890 aset intelektual dengan level akses yang beragam. Jumlah aset intelektual untuk masing-masing level akses dijabarkan dalam gambar berikut.



Pada tahun 2024, BPPK kembali melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen pengetahuan dengan merujuk pada APO (*Asian Productivity Organization*) - *Levels of Knowledge Management Maturity*. Tingkat kematangan manajemen pengetahuan diukur dengan tujuh kategori yang terdiri dari tingkat maturitas pimpinan, tingkat maturitas proses bisnis, tingkat maturitas kesiapan SDM, tingkat maturitas teknologi digital, tingkat maturitas kesiapan proses MP, tingkat maturitas belajar dan inovasi,

dan tingkat maturitas dampak keberhasilan manajemen pengetahuan. Dari hasil pengukuran tersebut tingkat maturitas manajemen pengetahuan di BPPK pada tahun 2024 memperoleh total skor 205 (dari nilai maksimal 210), naik dari tahun 2023 yang memperoleh total skor 190. Tingkat Maturitas Manajemen Pengetahuan di BPPK berada pada level 5 (*maturity*) dari skala 5 yang menunjukkan bahwa BPPK telah mengimplementasikan manajemen pengetahuan secara optimal.

4.9. PEMBELAJARAN TERINTEGRASI

Untuk mendukung Kemenkeu *Corporate University* sebagai salah satu Infrastruktur pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kemenkeu, BPPK mengembangkan pendekatan pembelajaran terintegrasi yang merupakan bagian dari implementasi *learning organization* khususnya komponen *leaders' participation in learning process* terkait pemberian akses dan kesempatan belajar kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kemenkeu, pembelajaran terintegrasi dilaksanakan untuk:

1. Mewujudkan budaya belajar bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu;
2. Memberikan peningkatan akses pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kemenkeu secara tepat waktu dan selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
3. Memperkuat performa individu, tim, dan organisasi melalui peningkatan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kemenkeu.

Adapun penjelasan dari setiap model dalam pembelajaran terintegrasi, yaitu:

1. belajar mandiri (*self learning*), merupakan proses pemelajar aktif dan berinisiatif, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam merencanakan (mengidentifikasi kebutuhan belajar, memformulasi tujuan belajar, dan mengidentifikasi sumber pembelajaran) melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar, sesuai

kebutuhannya dengan tetap melalui persetujuan atasan langsungnya;

2. pembelajaran terstruktur (*structured learning*), merupakan pembelajaran yang dilaksanakan melalui metode yang terstruktur dalam berbagai pelatihan di dalam kelas (klasikal) maupun di luar kelas (non klasikal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), merupakan aktivitas pembelajaran kolaboratif yang dilakukan pegawai, baik secara individu maupun berkelompok, dalam sebuah komunitas maupun bimbingan di luar kelas, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/orang lain, seperti coaching and mentoring, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), patok banding (*benchmarking*), dan keikutsertaan dalam komunitas belajar (CoP); dan
4. pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung (*learning from experience/learning while working*), merupakan aktivitas pembelajaran terintegrasi yang dilakukan pegawai, baik secara individu maupun berkelompok di tempat kerja melalui praktik langsung, seperti magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), *action learning*, gugus tugas, tugas tambahan, dan pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Sebagai upaya untuk terus mendukung implementasi Pembelajaran Terintegrasi, pada tahun 2024, BPPK telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan Keputusan Kepala BPPK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Panduan Operasional

Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan BPPK; dan

2. Menetapkan IKU *Mandatory* berupa Indeks penyelesaian *Individual Development Plan* (IDP) bagi seluruh pelaksana, pejabat fungsional, pejabat pengawas dan pejabat administrator di lingkungan BPPK.

Pada tahun 2024, penilaian pembelajaran terintegrasi kembali dinilai dalam satu kesatuan dengan penilaian *Learning Organization*. Adapun komponen penilaian pembelajaran terintegrasi adalah sebagai berikut.

- a. Analisis Pembelajaran;

- b. Desain Pembelajaran;
- c. Pengembangan Pembelajaran;
- d. Penyelenggaraan Pembelajaran;
- e. Evaluasi Pembelajaran;
- f. Dukungan Organisasi dalam Pembelajaran Terintegrasi;
- g. Dukungan Manajemen Pengetahuan dalam Pembelajaran Terintegrasi.

Berdasarkan hasil penilaian atas 7 (tujuh) komponen diatas hasil penilaian tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi di BPPK pada tahun 2024 adalah 95,61.

4.10. SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN 2024

Dalam rangka mengukur indeks kepuasan pengguna layanan serta untuk menggali *feedback* dari pengguna layanan yang dapat menjadi *input* dalam perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, BPPK bekerja sama dengan Tim Peneliti Independen dari Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK). Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) layanan BPPK yang menjadi objek SKPLPK, yaitu:

1. Layanan Pelatihan Klasikal

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor 6 Tahun 2024, Pelatihan Klasikal adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi sesuai bidang dan jenjang jabatan yang dilakukan melalui tatap muka antara Pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama. Pelatihan klasikal dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kesepakatan antara Unit Pengguna dan Unit Pengelola;
- b. membutuhkan level keterlibatan (*engagement*) peserta yang tinggi;

- c. terdapat kegiatan praktik kerja lapangan atau kegiatan praktik penggunaan aplikasi; dan/atau
- d. membutuhkan peralatan yang tidak dapat disediakan secara mandiri oleh peserta.

2. Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN

BPPK melalui Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mengelola Pendidikan Vokasi untuk mempersiapkan putra dan putri terbaik bangsa agar dapat berkarir di bidang pengelolaan keuangan negara, baik di Kemenkeu maupun Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD) di luar Kemenkeu.

Ruang lingkup SKPL BPPK 2024 mencakup sembilan aspek pelayanan yang mengacu pada Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan satu aspek e-service sebagai berikut.

- a. Aspek Persyaratan;
- b. Aspek Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- c. Aspek Waktu Penyelesaian;

- d. Aspek Biaya/Tarif;
- e. Aspek Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- f. Aspek Kompetensi Pelaksana;
- g. Aspek Perilaku Pelaksana;
- h. Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
- i. Aspek Sarana dan Prasarana; dan
- j. Aspek *E-Service*.

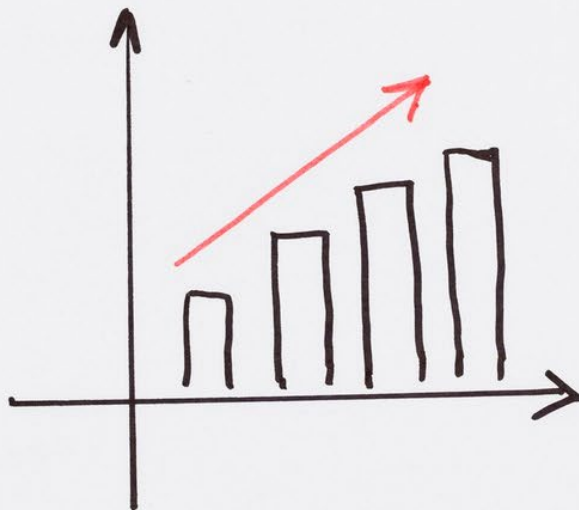
Penggalian data dilakukan pada 6 (enam) kota yang menjadi lokus SKPL BPPK 2024. Lokus pada penggalian data tersebut meliputi Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Ambon.

Dalam penggalian data tersebut, Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada berhasil mengumpulkan data dari 378 responden pengguna layanan BPPK dimana 278 responden adalah pengguna Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN dan 100 responden lainnya adalah pengguna layanan Pelatihan Klasikal. Penilaian positif diberikan oleh pengguna layanan BPPK yang terlihat dari IKPL agregat berada pada angka 4,71 dari skala 5 (kategori "sangat puas"). Sebagai informasi tambahan, Indeks kepuasan agregat BPPK pada tahun 2024 berada di atas skor target Renstra dan Indeks Kepuasan Agregat Kemenkeu.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan IKPL BPPK untuk setiap layanan.

Tabel IV.21: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) BPPK Tahun 2024

No.	Layanan	IKPL Per Layanan	IKPL Agregat
1	Pelatihan Klasikal	4,86	4,71
2	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN	4,66	



BAB 5:

TATA KELOLA PEMERINTAHAN



5.1. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian intern di lingkungan BPPK dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu. Untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai dengan rancangan yang ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal sebagai lini kedua. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 477/KMK.09/2021 Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu.

Pada tahun 2024, pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA). Hasil EPITE yang dilaksanakan pada tahun 2024 seluruhnya mendapatkan kategori Tinggi walaupun terdapat dua temuan yang berdampak rendah (inconsequential), menunjukkan sistem pengendalian intern secara umum telah diterapkan secara efektif oleh unit-unit di lingkungan BPPK.

Adapun PPITA dilaksanakan melalui Pemantauan Pengendalian Utama atas proses bisnis sebagai berikut :



- a. Penerbitan dan Penyampaian Dokumen Tagihan/Pembayaran (Honorarium Narasumber/ Tenaga Pengajar dan Perjadin);
- b. Pengadaan Barang dan Jasa (Tender/Seleksi, langsung, dan *e-purchasing*)
- c. Pendidikan Pascasarjana;
- d. Evaluasi Pembelajaran Level 2 di PKN STAN

Hasil PPITA juga menunjukkan sebelas temuan namun keseluruhannya berdampak rendah (Inconsequential) sehingga simpulan penerapan sistem pengendalian intern pada pelaksanaan proses bisnis (aktivitas) telah diterapkan secara efektif.

Selain pemantauan terkait pelaksanaan proses bisnis, dilaksanakan pula pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai sebagai early warning kepada manajemen untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh pegawai BPPK. Hasil pemantauan kode etik dan kode perilaku pada 2024 terdapat satu temuan dan berdampak rendah (Inconsequential).

Pemantauan-pemantauan lain yang dilaksanakan oleh UKI dalam menunjang penerapan sistem pengendalian intern yaitu reviu atas manajemen risiko, penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi, Penilaian dan Monev ZI WBK/WBBM, dan pemantauan tindak lanjut

hasil Survei Penilaian Integritas. Dalam kaitannya dengan core business BPPK, dilaksanakan audit penjaminan mutu pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan melalui KEP-94/PP/2021 Tentang Standar Mutu Pembelajaran di Lingkungan BPPK.

5.2. MANAJEMEN RISIKO

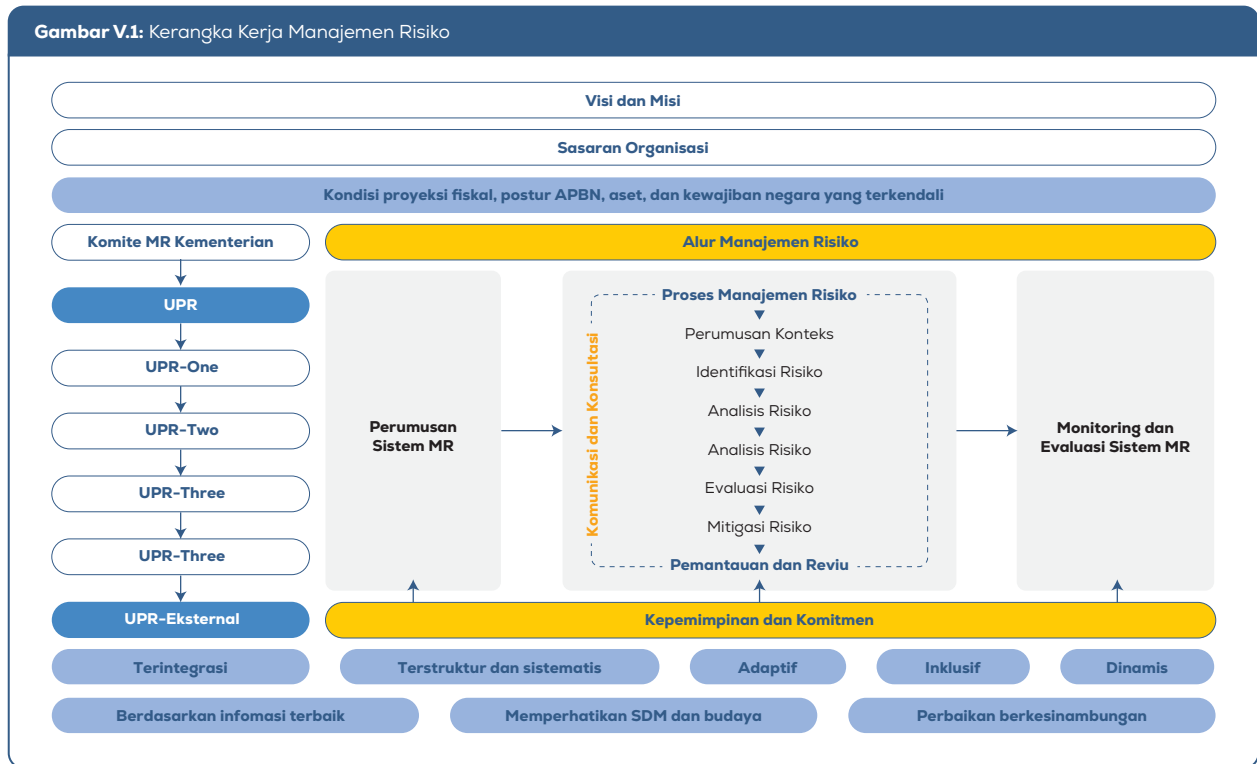
Kemenkeu di dalam struktur pemerintahan memiliki peran vital selaku pengelola keuangan dan kekayaan negara. Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, Kemenkeu dihadapkan pada kondisi penuh dengan ketidakpastian baik dari faktor internal organisasi sendiri maupun dari faktor eksternal organisasi. Kondisi ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi visi dan misi dari Kemenkeu selaku pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Dalam prosesnya, lembaga pemerintahan sebagai organisasi dan tidak terkecuali BPPK

sebagai salah satu unit eselon satu di Kemenkeu perlu memperhatikan adanya setiap risiko dalam mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko yang dihadapi sehingga dapat meminimalkan ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian berlebih dan dapat memanfaatkan potensi dari setiap peluang yang ada untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Pengelolaan risiko di BPPK diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko yang disusun dan mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan Kemenkeu.

5.2.1 KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko di lingkungan Kemenkeu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Kemenkeu tidak terkecuali di BPPK. Adapun kerangka kerja manajemen risiko mengacu pada PMK 222/PMK.01/2021 juncto KMK 105/KMK.01/2022

mengadopsi COSO:2017 dan ISO 31000:2018, dengan dilakukan penyempurnaan atas tujuan, struktur, dan prinsip manajemen risiko. Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko BPPK sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



5.2.2 UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Upaya peningkatan budaya risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu untuk mencapai sasaran. Dalam upaya peningkatan budaya risiko BPPK diwujudkan dalam bentuk:

1. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya

manajemen risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*.

3. Penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik.
4. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.
5. Pelaksanaan Seminar ataupun FGD dengan tema terkait manajemen risiko.

5.2.3 IMPLEMETASI MANAJEMEN RISIKO DI BPPK

Pada proses manajemen risiko BPPK tahun 2024, dari dua belas sasaran organisasi, dilakukan identifikasi dan analisis pada awal tahun. Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut terdapat 11 (sebelas) risiko yang perlu dilakukan mitigasi namun karena adanya adendum pada triwulan II (Juni 2024) maka total risiko yang perlu dilakukan mitigasi menjadi 12 (dua belas) risiko.

Berdasarkan laporan pemantauan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan IV 2024, terdapat satu risiko yang berada pada level tinggi, satu risiko berada pada level sedang dan sepuluh risiko berada pada level rendah.

Berikut ini adalah daftar risiko yang dimitigasi pada BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

Tabel V.1: Daftar Risiko BPPK yang Dimitigasi Pada Tahun 2024

No. Risiko	Risiko yang dimitigasi	P24	Q4	Residual
Downside Risk				
1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan	17	11	11
1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	17	18	11
2.1	Persentase alumni yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri	12	12	8
3.1	Pembatalan pengiriman peserta pembelajaran oleh stakeholder	13	11	11
5.1	Tidak tersusunnya standar pengelolaan kelihan pelanggan di PKN STAN	17	11	11
5.2	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	17	11	11
7.1	Proses Manajemen Pengetahuan di Kemenkeu tidak berjalan secara efektif	14	11	11
9.4	Penyelesaian IS RBTK tidak sesuai dengan rencana	17	11	11
10.2	Nilai IKKPA Satker dan Eselon I BPPK tidak mencapai target	14	11	13
10.4	Penyelesaian transit office dan hunian sementara Kemenkeu tidak sesuai jadwal	13	10	10
11.1	Persepsi negatif atas pemberitaan di media sosial tentang layanan BPPK	12	8	8
Upside Risk				
6.2	Pemanfaatan aplikasi/data analytic dalam pencapaian kinerja organisasi	9	9	12

5.3. WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemenkeu bagi pelapor yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu Republik Indonesia.

Pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kemenkeu akan merahasiakan identitas diri Pelapor sebagai whistleblower. Kemenkeu menghargai informasi

yang dilaporkan. Fokusnya adalah kepada materi informasi yang dilaporkan saja. Tata Cara Pelaporan ada 9 (sembilan) tahapan yang sudah tercantum pada home page www.wise.kemenkeu.go.id. Sepanjang tahun 2024, terdapat 8 (delapan) aduan masuk melalui WISE Kemenkeu telah tuntas ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.4. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

5.4.1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPPK merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan sumber daya manusia

yang berkompeten serta profesional melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPK menerapkan strategi Kemenkeu *Corporate University* untuk menjadikan Kemenkeu sebagai *knowledge institution* melalui *learning organization*. Dana yang digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di BPPK, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu BPPK termasuk ke dalam kategori badan publik yang wajib menerapkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BPPK sebagai badan publik terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor

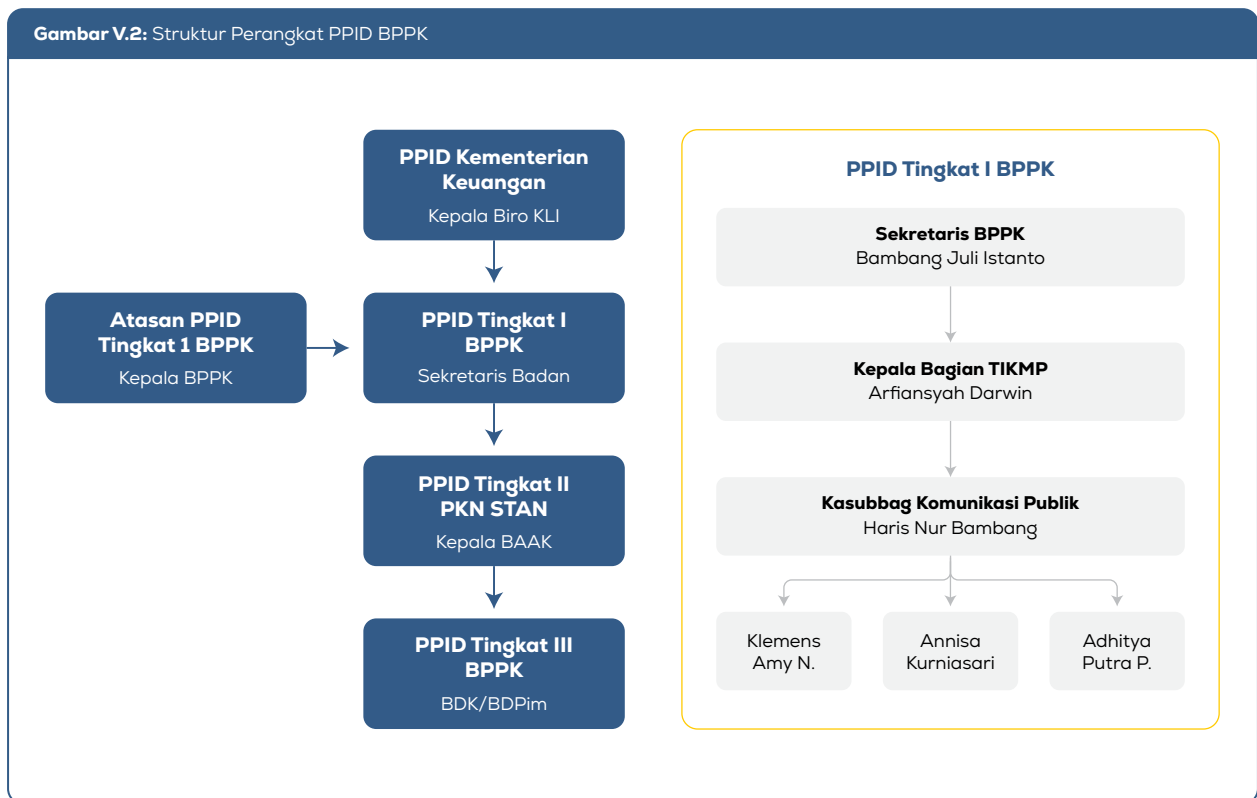
351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenkeu, ditetapkan bahwa BPPK merupakan bagian dari Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu dengan Sekretaris BPPK sebagai PPID Tingkat I BPPK.

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID Tingkat I BPPK sebagai bagian dari perangkat PPID di lingkungan Kemenkeu berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yang secara operasional unit pengelola layanan informasi Publik di PPID Tingkat I BPPK dilaksanakan oleh Subbagian Komunikasi Publik pada Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan.

5.4.2 STRUKTUR PERANGKAT PPID TINGKAT I BPPK

BPPK telah menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi komunikasi publik atau kehumasan yang bertanggung jawab untuk

melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPK.



Petugas layanan PPID di lingkungan BPPK terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan sebagai unit pengelola layanan informasi publik PPID Tingkat I BPPK;
- b. Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai unit pengelola layanan informasi Publik PPID Tingkat II BPPK;
- c. Balai Diklat Kepemimpinan dan seluruh Balai Diklat Keuangan di lingkungan BPPK sebagai unit pengelola layanan informasi Publik PPID Tingkat III BPPK; dan
- d. Seluruh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPPK sebagai penyedia dan pengelola informasi.

5.4.3 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPPK telah menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi komunikasi publik atau kehumasan yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPK.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. pencantuman informasi profil unit organisasi BPPK di setiap halaman website unit,
2. layanan informasi melalui Kemenkeu PRIME,
3. pengelolaan laporan layanan informasi publik.

Dalam melakukan layanan informasi, BPPK menyediakan beberapa kanal yang dapat digunakan untuk mengelola pertanyaan, memberikan bantuan atas pertanyaan yang diberikan oleh pemohon informasi dan memberikan laporan untuk peningkatan pelayanan. Kanal tersebut terdiri atas:

1. *Call Center* 134, dan
2. Aplikasi Kemenkeu PRIME yang dapat diakses melalui website BPPK dan *Kemenkeu Learning Center* (KL).

Selain melalui kanal sebagaimana dimaksud, BPPK juga mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, melalui pemanfaatan KLC sebagai *Learning and Knowledge Management System* yang menyediakan pembelajaran dan dokumen pengetahuan untuk mendukung pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara yang tidak hanya dapat diakses oleh pegawai Kemenkeu, namun dapat pula diakses oleh masyarakat umum. Melalui pemanfaatan KLC tersebut, diharapkan

masyarakat dapat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*.

Implementasi keterbukaan informasi publik juga sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, BPPK terus menyajikan materi pembelajaran dan dokumen pengetahuan seputar informasi publik pada KLC dan kanal sosial media resmi BPPK, baik dalam bentuk media visual maupun audio visual.

Penetapan informasi publik di lingkungan BPPK sebagai penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menginventarisasi informasi-informasi yang berada dalam penguasaan BPPK;
- b. kategorisasi informasi, sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. menyusun usulan Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi BPPK;
- d. mengajukan usulan informasi publik dan usulan klasifikasi Informasi BPPK;
- e. uji konsekuensi oleh PPID Kemenkeu;
- f. penetapan dalam Daftar Informasi Publik Kemenkeu dan Klasifikasi Informasi Kemenkeu.

Setelah ditetapkan, informasi publik di lingkungan BPPK dipublikasikan pada website BPPK, diantaranya data yang termasuk dalam kategori "Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala" berupa:

- a. Informasi tentang profil BPPK;
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BPPK;
- c. Ringkasan laporan keuangan;
- d. Ringkasan laporan akses informasi publik;
- e. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh BPPK;
- f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak- pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BPPK maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPPK;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;
- i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor BPPK; dan
- j. Informasi mengenai keuangan negara.

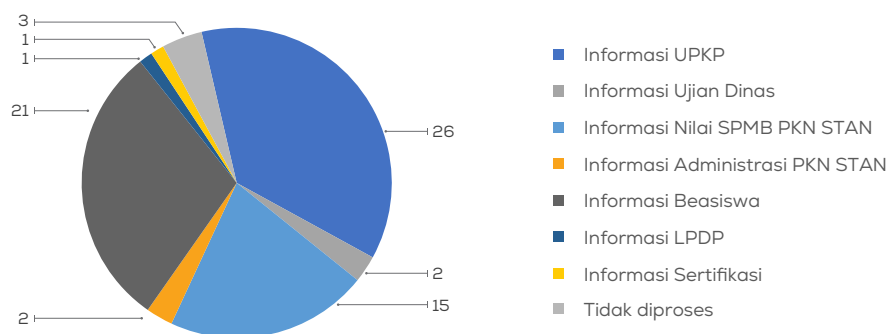
5.4.4 STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPPK TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2024, PPID Tingkat I BPPK menerima dan memproses layanan permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID, e-mail ppidbppk@kemenkeu.go.id, permohonan informasi publik yang diteruskan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kemenkeu selaku PPID Kemenkeu serta melayani dengan terbuka jika ada pemohon yang datang secara langsung. Selain melalui kanal PPID dimaksud, permintaan informasi

terkait BPPK juga dilayani melalui *Call Center* 134, dan melalui aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* Kemenkeu PRIME yang dapat diakses pada KLC dan *website* BPPK.

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Tingkat I BPPK pada tahun 2024 sejumlah total 68 (enam puluh delapan) pemohon. Dengan komposisi topik permohonan sebagaimana gambar berikut:

Gambar V.3: Topik Permohonan Informasi Publik kepada BPPK Tahun 2024



Terdapat 3 permohonan informasi publik yang tidak diproses karena ketidaklengkapan dokumen kependudukan.

Adapun gambaran dari tindak lanjut atas permintaan informasi publik adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel V.2: Tindak Lanjut atas Permintaan Informasi Publik kepada BPPK Tahun 2024

Bulan	Jumlah Permohonan	Tidak Diproses	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dipenuhi		Jumlah Permohonan yang Ditolak/ Tidak Diberikan
				Sepenuh-nya	Sebagian	
Januari	20	-	7,3 hari	20	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	2	-	13 hari	2	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	2	1	14 hari	1	-	-
Juli	1	-	10 hari	1	-	-
Agustus	1	-	20 hari	-	-	1
September	3	-	10,67 hari	3	-	-
Oktober	11	1	9 hari	10	-	-
November	27	1	10,57 hari	8	17	1
Desember	1	-	3 hari	-	1	-
Total	68	3	10,84 hari	45	18	2

Dengan demikian, tidak terdapat *pending matters* yang dimiliki oleh BPPK pada tahun 2024. Terdapat satu pemohon yang mengajukan keberatan dan telah selesai diproses sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sehingga tidak berlanjut ke sengketa, tidak ada sengketa informasi publik, dan tidak ada permohonan informasi publik yang tertunda proses penyelesaiannya.



BAB 6:

KEMITRAAN STRATEGIS



Salah satu arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPPK 2020-2024 adalah Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kemenkeu *Corporate University*. Adapun salah satu strategi yang dilaksanakan oleh BPPK untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi terbaik.

Pada periode tahun 2024, terdapat beberapa bentuk kemitraan strategis yang diselenggarakan oleh BPPK, yaitu meliputi:

- a. **Kerja Sama Program Pembelajaran (KSPP);**
- b. **Implementasi MoU/Perjanjian yang telah ditandatangani; dan**
- c. **Kemitraan Strategis Lainnya.**



6.1. KERJA SAMA PROGRAM PEMBELAJARAN (KSPP) KEUANGAN NEGARA

BPPK sebagai unit di lingkungan Kemenkeu yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang keuangan negara, dapat mengambil peran dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah di bidang keuangan negara. Salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah yang dilakukan oleh BPPK adalah dengan melakukan Kerja Sama Program

Pembelajaran (KSPP). Menurut Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2020 tentang Kerja Sama Program Pembelajaran Keuangan Negara di Lingkungan BPPK, KSPP merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk bantuan kedinasan yang dilaksanakan oleh BPPK untuk pemenuhan kebutuhan mitra kerja sama. Mitra kerja sama adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara

negara lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada tahun 2024, BPPK telah menyelenggarakan

6 program Kerja Sama Program Pembelajaran (KSPP). Adapun kegiatan KSPP dimaksud adalah sebagai berikut.

No	Nama Mitra	Nama Program Pembelajaran	Waktu Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
1	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan	Pelatihan Effective Coaching and Mentoring Skills bagi ASN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga	3 s.d.7 Juni 2024	60
2	Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan	Pelatihan Aplikasi SIMAN Pengguna Barang Tahun 2024	17 Juli 2024	80
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB BKKBN	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara bagi Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	18 Juli 2024	33
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB BKKBN	Lokakarya Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26 Agus – 3 Sept 2024	59
5	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Pelatihan Jarak Jauh Penatausahaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang	30 Sept – 4 Okt 2024	30
6	BPSDM Daerah Provinsi Lampung	Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7 - 11 Okt 2024	60

6.2. NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Sepanjang tahun 2024 telah ditandatangani sebanyak 10 MoU/PKS (non KC-GTC) dan sebanyak 4 PKS (KC-GTC) oleh Kepala BPPK, serta sebanyak 8 PKS oleh Sesban selaku KPA. Sehingga total

keseluruhan MoU/PKS yang ditandatangani pada tahun 2024 adalah sebanyak 22. Berikut ini adalah rincian 10 MoU/PKS (non KC-GTC) yang ditandatangani oleh Kepala BPPK.

No	Nama Mitra	Mengenai	Keterangan
1	Lee Kuan Yew, School of Public Policy, National University of Singapore	Letter of Confirmation-Leadership and Public Policy 29 April – 30 May 2024	Tanggal: 09-01-2024 UIC: Pusdiklat KM
2	BPSDM Kementerian Hukum	Pelatihan dan Kajian Bersama di Bidang Keuangan Negara dan Hukum	Tanggal: 7-11-2024 UIC: Pusdiklat AP
3	Capabuild	Cooperation on the Human Resources Development in Taxation	Tanggal: 12-11-2024 UIC: Pusdiklat Pajak
4	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Program Penguatan Kapasitas Pelatihan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Perubahan Iklim dalam rangka Implementasi Protokol Montreal	Tanggal: 24-10-2024 UIC:Pusdiklat BC
5	Curtin University	Pendidikan Perpajakan dan Pengembangan Tax Clinic	Tanggal: 30-10-2024 UIC: PKN STAN

No	Nama Mitra	Mengenai	Keterangan
6	JPPH Malaysia	On the Provision of Research, Training, and Education in the Field of Real Estate	Tanggal: 8-10-2024 UIC: Pusdiklat KNPK & PKN STAN
7	University of Canberra	Study Abroad Agreement	Tanggal: 22-5-2024 UIC: PKN STAN
8	University of Canberra	Kolaborasi Program Akademik dan Pengembangan Profesional	Tanggal: 10-9-2024 UIC: PKN STAN
9	LDKPI	Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah kepada Timor-Leste berupa Program Pengembangan Eksekutif: Pelatihan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah	Tanggal: 31-07-2024 UIC: PKN STAN
10	LDKPI	Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah kepada Tanzania berupa Program Eksekutif Pengembangan Sistem Electronic Single Window (ESW)	Tanggal: 11-11-2024 UIC: PKN STAN

Berikut ini adalah rincian 4 PKS (KC-GTC) yang ditandatangani oleh Kepala BPPK.

No	Nama Mitra	Mengenai	Keterangan
1	Universitas Pertiba	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal: 29-01-2024 UIC: Pusdiklat AP
2	Universitas Bangka Belitung	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Tanggal: 30-01-2024 UIC: Pusdiklat AP
3	Fakultas FEB Universitas Halu Oleo	Pengembangan Kompetensi, Kurikulum Pendidikan, dan Kajian/ Penelitian	Tanggal: 25-11-2024 UIC: Pusdiklat AP
4	Fakultas FEB Universitas Sebelas Maret	Pengembangan Kompetensi, Kurikulum Pendidikan, dan Kajian/ Penelitian	Tanggal: 22-12-2024 UIC: Pusdiklat AP & KNPK

Berikut ini adalah rincian 8 PKS yang ditandatangani oleh Sekretaris BPPK.

No	Nama Mitra	Mengenai	Keterangan
1	PPSDM MIGAS	Pengiriman peserta pelatihan dari ITJEN	Tanggal: 31-01-2024 UIC: Pusdiklat KU
2	Pusdiklat BPS	Pengiriman peserta pelatihan dari DJKN - PKS 1	Tanggal: 21-02-2024 UIC: Pusdiklat KU
3	Pusdiklat BPS	Pengiriman peserta pelatihan dari DJKN - PKS 2	Tanggal: 21-02-2024 UIC: Pusdiklat KU
4	Pusdiklatwas BPKP	Pengiriman peserta pelatihan dari DJKN	Tanggal: 19-04-2024 UIC: Pusdiklat KU
5	Pusdiklatwas BPKP	Pengiriman peserta pelatihan dari ITJEN	Tanggal: 22-05-2024 UIC: Pusdiklat KU
6	POLRI	Pendidikan dan Latihan PPNS DJBC	Tanggal: 28-3-2024 UIC: Pusdiklat BC
7	POLRI	Pendidikan dan Latihan PPNS DJP	Tanggal: 14-6-2024 UIC: Pusdiklat Pajak
8	BP3KSDMT Kemenhub	Penyelenggaraan Orientasi Pembentukan Karakter bagi PPPK di Lingkungan Kemenkeu	Tanggal: 6-9-2024 UIC: Pusdiklat KM

6.3. KERJA SAMA LAINNYA

Selain dalam bentuk KSPP dan pelaksanaan Mou/Nota Kesepahaman, BPPK juga menyelenggarakan kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama strategis lainnya. Berikut ini adalah kerja sama strategis lainnya yang dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2024.

- 1. Kerja sama Beasiswa antara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dengan Bina Nusantara dan Universitas Brawijaya**
 - a. Bina Nusantara
 - S1 Sistem Informasi *Online Learning* (Nov 2022 - Nov 2024) (30 pegawai)
 - S1 Sistem Informasi Melalui RPL (Sept 2023 - pertengahan 2026) (30 pegawai)
 - b. Universitas Brawijaya
 - S1 Ilmu Hukum Melalui RPL (2,5 tahun intake Feb 2024) (30 pegawai)
- 2. Kerja sama Kemenkeu *Corpu Goes To Campus* antara Pusdiklat AP dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.**
 - a. IPDN (2023-2025)
 - b. UNJ (2023-2026)
 - c. Universitas Bangka Belitung (2024-2029)
 - d. Universitas Pertiba (2024-2028)
 - e. Universitas Halu Olay (2024-2027)
 - f. Universitas Sebelas Maret (2024-2027)
- 3. Kerja sama penyelenggaraan pembelajaran antara Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai dan POLRI**
 - a. Diklat Pembentukan PPNS & Diklat Manajemen PPNS bagi DJP dan DJBC (Tahun 2024)
 - b. Diklat Pembentukan PPNS & Diklat Manajemen PPNS bagi DJP (Tahun 2025)
 - c. Pelatihan Teknis PPNS (Manajerial dan Non Manajerial) bagi DJBC (Tahun 2025)
- 4. Regional Training Center World Customs Organization**
 - a. *Workshop on The Pre-Accreditation of Customs Modernization Advisors Specialized in Human Resources Management and Development* (HRMD) pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2024.
 - b. Pelatihan *Technical Assistance (TA) on Post Clearance Audit (PCA): Strategic Planning and Risk Management For Royal Malaysian Customs Department Officer* pada tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2024.
 - c. *World Customs Organization (WCO) Synthetic Drug Detection Project (SDDP) Mail Channel Regional Workshop* pada tanggal 2 s.d. 6 September 2024.
 - d. *World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies* pada tanggal 23 s.d. 27 September 2024.
 - e. *4th WCO RTC Indonesia International Conference 2024: Building a Seamless Future Through Disruptive Technologies in Customs and Multi-Stakeholder Collaboration* yang diselenggarakan pada 8 s.d. 9 Oktober 2024.
- 5. Kerja sama Pusdiklat Keuangan Umum dengan BPKH**
 - a. KCT: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji untuk Kemaslahatan Umat (2022)
 - b. Ngopi Hitam: Kupas Tuntas Transparansi Keuangan Haji (2023)
 - c. *Microlearning* Alur Pendaftaran Haji, *Microlearning* Pelunasan Biaya dan Mekanisme Pembatalan Haji, dan *Microlearning* Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dalam Keuangan Haji, dan *Microlearning* "Dana Haji Kita Kemana Saja" (2024)
 - d. Penyusunan KC Pengembangan Dana Haji Indonesia oleh Kepala Divisi Riset dan Pengembangan BPKH dan KC Keuangan Haji oleh Eri Hariyanto (WI Madya KU) (2024)

Kerja sama ini masih akan dilanjutkan, adapun rencana kerja sama yang akan dilakukan pada tahun 2025 diantaranya adalah pelaksanaan Kajian Akademis, permintaan dan pertukaran data untuk penyusunan Buku, penyelenggaraan Webinar Pengelolaan Keuangan Haji.

6. Kerja sama antara Pusdiklat KNPk, PKN STAN dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

Ditawarkan Oleh BPPK 2025

- a. Pusdiklat KNPk: Pelatihan Penilaian Tanah Koridor, Reklame, dan Bongkaran untuk Instansi Pengguna dan Pelatihan Penggunaan Drone dan Pengelolahn Data untuk Kepentingan Penilaian
- b. PKN STAN: *Student Exchange dan Lecture Exchange*

Diminta Oleh BPPK 2025

- a. Pusdiklat KNPk: Kursus Penilaian Harta Pertanian: Hortikultura dan Penilaian Harta Tanah Komersial dan Industri

- b. PKN STAN: *Student Exchange dan Lecture Exchange*

7. Kerja sama antara *University of Canberra* dan PKN STAN

- a. Pada 2024, PKN STAN melakukan pengiriman 3 mahasiswa untuk belajar selama satu semester (19 Juli 2024 - 16 Nov 2024) dalam Program *Student Mobility Awards* (SMA) dan 2 (dua) orang dosen untuk memperoleh pengalaman akademik internasional selama 8 (delapan) minggu (13 Sept 2024 s.d. 9 Nov 2024 dalam Program *Academic Mobility Awards* (AMA), di *University of Canberra*.
- b. Pada 2025, Program akan diperluas untuk tenaga kependidikan di PKN STAN dalam Program *Academic Staff Mobility Awards*.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia